

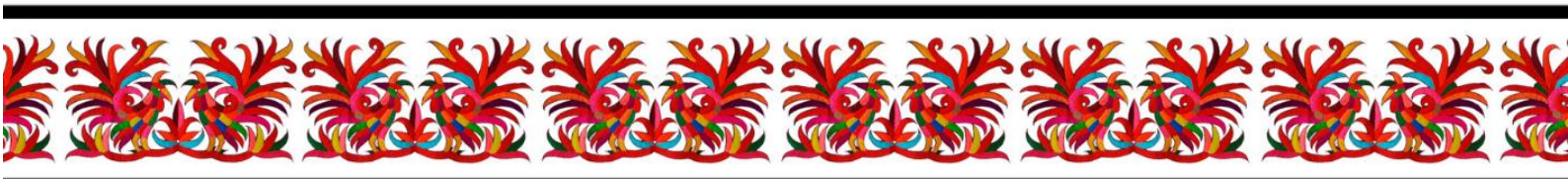
# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN KUTAI BARAT



TAHUN 2023

*"SEMOGA HARI ESOK LEBIH BAIK DARI HARI INI"*





## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur terpanjat kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kutai Barat tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan sarana pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan bersama seluruh perangkat daerah selama tahun 2023 sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance). Dengan menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026. Wujud akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan tidak saja mempertanggungjawabkan hasil akhir dan manfaat dari terlaksananya program dan kegiatan yang dirasakan oleh masyarakat, namun pada hal yang lebih mendasar yaitu apakah program dan kegiatan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta berdampak pada perubahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara substansif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini disusun dengan menggunakan data realisasi



kinerja yang ada dalam LKjIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Materi LKjIP mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program, dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk Tahun 2021-2026. LKjIP juga memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dan dapat dijadikan sebagai bahan koreksi guna meningkatkan kinerja pemerintah pada masa mendatang.

Berbagai keberhasilan terhadap pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat tidak terlepas dari hasil kerja keras semua pihak yang terlibat di dalamnya yaitu Aparatur Pemerintah di semua jenjang pemerintahan, pihak swasta dan masyarakat tentunya, baik dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan maupun pengawasannya yang dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, yang telah turut membantu dalam penyelesaian laporan ini, semoga laporan kinerja ini bermanfaat dan dapat menjadi umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat Kutai Barat yang kita cintai.

**Sendawar, 26 Maret 2024**

**BUPATI KUTAI BARAT**

**FX, YAPAN, SH, MH**



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam perencanaan strategik melalui pelaporan yang dilaksanakan secara periodik. Dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026 yang disahkan pada tanggal 25 Oktober 2021, terdapat 9 sasaran strategis dan 23 Indikator Kinerja Utama.

Tahun 2023 adalah tahun Ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026.

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen outcome oriented yang dijadikan sebagai instrument dalam mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, transparan dan responsif terhadap aspirasi publik. Implementasi SAKIP di Kabupaten Kutai Barat merupakan suatu keharusan sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai media kontrol, boster dan alat ukur penilaian kualitas kinerja untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Dalam perspektif yang lebih luas SAKIP juga berfungsi sebagai media



pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat kepada publik dalam merefleksikan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Barat Tahun 2021 - 2026.

Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam tahun pertama RPJMD 2021 – 2026 ini diukur dengan membandingkan antara Rencana Kinerja (Performance Plan) yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya Kesenjangan Kinerja (Performance Gap) antara rencana kinerja dan realisasinya serta tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa mendatang. Metode pengukuran ini dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis terhadap pencapaian 9 sasaran strategis, dihitung sebagai realisasi kinerja tahunan berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Dalam mengukur capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis tersebut, dibantu dengan dukungan indikator-indikator kinerja setingkat outcome yang sebagian besar diambil dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian diperoleh hasil akumulatif dari 9 sasaran strategis dan 23 IKU yang ditetapkan dengan nilai pencapaian rata-rata sebesar 139,43%. Adapun hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 secara spesifik dijelaskan sebagai berikut :



1. Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tahun keempat RPJMD 2021 – 2026 menganalisa dan mengukur 9 sasaran dengan 23 indikator kinerja sasaran dengan realisasi sebagai berikut:
  - a. Sebanyak 8 sasaran atau sebesar 88,89 % dengan Capaian Kinerja Melampaui Target.
  - b. Sebanyak 1 sasaran atau sebesar 11,11 % dengan Capaian Kinerja Sangat Baik.
2. Interpretasi kategori pengukuran indikator kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa :
  - a. Sebanyak 13 Indikator Kinerja Utama atau 56,52 % dengan kategori Melampaui Target.
  - b. Sebanyak 1 Indikator Kinerja Utama atau 4,35 % dengan kategori Mencapai Target.
  - c. Sebanyak 9 Indikator Kinerja Utama atau 39,13 % dengan kategori Belum Mencapai Target.
3. Kategori dan nilai capaian pada pengukuran 9 Sasaran sebagai berikut :
  - a. Sasaran dengan kategori Melampaui Target (MT ), (nilai diatas 100)
    1. Meningkatnya peran sektor unggulan daerah berbasis kluster terhadap perekonomian daerah, dengan capaian 140,64%;
    2. Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan Wirausahawan Lokal baru, dengan capaian 297,65%;
    3. Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat Kutai Barat, dengan capaian 112%
    4. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, dengan capaian 102,97%;



5. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, dengan capaian 100,05%
  6. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah dengan capaian 109,88%
  7. Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar, dengan capaian 184,32%
  8. Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan dengan Capaian 111,40%
- b. Sasaran dengan kategori Sangat Baik (SB ), (nilai 85,00 - 100 )
1. Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup, dengan capaian 96,1 %

Selanjutnya dilihat dari sisi Akuntabilitas Kinerja Keuangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Kabupaten Kutai Barat setelah perubahan APBD 2023 yang ditargetkan berjumlah Rp. 3.602.666.831.166,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.186.162.530.843,27.
2. Total Anggaran Belanja yang ditargetkan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4.510.943.671.026,00 Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp. 3.306.625.833.450,43 atau persentase penyerapan belanja sebesar 73,30%.
3. Pada Belanja operasi yang ditargetkan sebesar Rp. 2.526.504.326.629,00 terealisasi Rp. 1.816.676.262.964,67 atau 71,90%.
4. Belanja Modal ditargetkan sebesar Rp 1.399.783.821.461,00 terealisasi sebesar 1.012.317.513.126,76 atau 72,32 %.
5. Belanja Tidak Terduga ditargetkan sebesar Rp. 120.000.000.000,00 terealisasi Rp. 12.976.534.423,00 atau 10,81 %.
6. Belanja Transfer ditargetkan Rp. 464.655.522.936,00,00 realisasi Rp. 464.655.522.936,00 atau 100%.



## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GRAFIK .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. DASAR HUKUM .....	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN .....	5
D. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT .....	18
E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN .....	45
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	47
2.1 RENCANA STRATEGIS .....	47
2.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023 .....	57
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	59
2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 .....	61
2.5 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023 .....	64
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	66
3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	66
3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISA KINERJA SASARAN STRATEGIS .....	71
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	76
ANALISIS CAPAIAN SASARAN	
SASARAN 1 .....	81
SASARAN 2 .....	102
SASARAN 3 .....	112
SASARAN 4 .....	120
SASARAN 5 .....	131
SASARAN 6 .....	140



SASARAN 7 .....	149
SASARAN 8 .....	185
SASARAN 9 .....	201
3.4 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	215
3.5 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN .....	218
BAB IV PENUTUP .....	222
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah .....	6
Tabel 1.2 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Kampung.....	21
Table 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	23
Tabel 1.4 Luas Wilayah, Jumlah KK, Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan .....	24
Tabel 1.5 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2019-2022.....	27
Tabel 1.6 PDRB Atas Dasar arga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2021 (Juta Rupiah) .....	28
Tabel 1.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2022 (Persen) .....	32
Tabel 1.8 Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022	35
Tabel 1.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018-2023 .....	36
Tabel 1.11 Rincian Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN/TKK.....	42
Tabel 1.12 Rincian Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN/TKK Berdasarkan Gender.....	42
Tabel 1.13 Rincian Jumlah ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 Berdasarkan Golongan Ruang dan Gender.....	43
Tabel 1.14 Rincian Jumlah Eselon di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2023 .....	43
Tabel 1.15 Jumlah ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 Berdasarkan Pendidikan .....	44
Tabel 1.16 Rincian Jumlah Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 Berdasarkan Pendidikan .....	44
Tabel 1.17 Data Non ASN/ Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Tenaga Kependidikan (Guru) Tahun 2023.....	45
Tabel 1.18 Data Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Tenaga Adm.	



Penyelenggara Kependidikan Tahun 2023.....	45
Tabel 2.1 Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah .....	49
Tabel 2.2 Janji Bupati dan Wakil Bupati Terpilih .....	52
Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026.....	56
Tabel 2.4 Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026 .....	60
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023.....	62
Tabel 2.6 Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2023 .....	64
Tabel 2.7 Alokasi Anggaran Per Indikator Sasaran Tahun 2023 .....	65
Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja Indikator .....	67
Tabel 3.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja Sasaran .....	68
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 .....	69
Tabel 3.4 Jumlah Indikator Per Sasaran .....	74
Tabel 3.5 Rekapitulasi Capaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 2023 .....	73
Tabel 3.6 Pengkategorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 .....	74
Tabel 3.7 Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2023 .....	77
Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 2023 .....	77
Tabel 3.9 Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 .....	79
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Meningkatnya Peran Sektor Unggulan Daerah Terhadap Perekonomian (PDRB) Tahun 2023 .....	81
Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023 .....	84
Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Akhir RPJMD .....	82



Tabel 3.13 Persentase Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2023 ...	84
Tabel 3.14 Perbandingan Persentase Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha.....	85
Tabel 3.15 Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah) .....	86
Tabel 3.16 Perbandingan Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Barat dengan Provinsi .....	87
Tabel 3.17 Jumlah Cakupan Penyediaan Sarana Pertanian Tahun 2023 .....	88
Tabel 3.18 Jumlah Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Tahun 2023 .....	89
Tabel 3.19 Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .....	89
Tabel 3.20 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian .....	89
Tabel 3.21 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.....	90
Tabel 3.22 Persentase Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha .....	91
Tabel 3.23 Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan .....	92
Tabel 3.24 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan Tahun 2021-2023 (Ton) .....	94
Tabel 3.25 Persentase Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2023....	97
Tabel 3.26 Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2023 .....	98
Tabel 3.27 Perbandingan Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Barat dengan Provinsi .....	99
Tabel 3.28 Jumlah Wisatawan Kabupaten Kutai Barat 2017-2023.....	100
Tabel 3.29 Capaian Kinerja Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan Wirausahawan Lokal Baru Tahun 2023 .....	102
Tabel 3.30 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023.....	103
Tabel 3.31 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Akhir	



RPJMD .....	103
Tabel 3.32 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Barat .....	104
Tabel 3.33 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.....	105
Tabel 3.34 Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil.....	108
Tabel 3.35 Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil.....	109
Tabel 3.36 Capaian Kinerja PDRB Perkapita .....	112
Tabel 3.37 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023 .....	112
Tabel 3.38 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Akhir RPJMD .....	113
Tabel 3.39 PDRB Perkapita Kabupaten Kutai Barat .....	114
Tabel 3.40 Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 .....	115
Tabel 3.41 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah) .....	117
Tabel 3.42 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Persen) .....	118
Tabel 3.43 Capaian Kinerja Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup Tahun 2023 .....	120
Tabel 3.44 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023.....	121
Tabel 3.45 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Akhir RPJMD .....	121
Tabel 3.46 Indeks Kualitas Air Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2023.....	122
Tabel 3.47 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kutai Barat .....	125
Tabel 3.48 indeks Kualitas Lahan Kabupaten Kutai Barat .....	128
Tabel 3.49 Capaian Kinerja Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Tahun 2023.....	131
Tabel 3.50 Perbandingan Capaian Kinerja .....	131
Tabel 3.51 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Akhir RPJMD .....	132
Tabel 3.52 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Barat .....	133



Tabel 3.53 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2023 .....	134
Tabel 3.54 Harapan Lama Sekolah .....	135
Tabel 3.55 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2023 .....	136
Tabel 3.56 Angka Kelulusan Paket A, B dan C .....	137
Tabel 3.57 Capaian Kinerja Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat.....	140
Tabel 3.58 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023.....	140
Tabel 3.59 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Akhir RPJMD .....	141
Tabel 3.60 Usia Harapan Hidup Kabupaten Kutai Barat .....	141
Tabel 3.61 Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2023 .....	142
Tabel 3.62 Capaian Kinerja Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah .....	149
Tabel 3.63 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023.....	150
Tabel 3.64 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Akhir RPJMD .....	150
Tabel 3.65 Indeks Kepuasan Masyarakat .....	152
Tabel 3.66 Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pada Perangkat Daerah.....	153
Tabel 3.67 Saran dan Rekomendasi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.....	154
Tabel 3.68 Nilai SAKIP Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2023.....	164
Tabel 3.69 Rekapitulasi Penilaian Hasil Evaluasi AKIP.....	165
Tabel 3.70 Opini BPK Kabupaten Kutai Barat.....	167
Tabel 3.71 Nilai LPPD Kabupaten Kutai Barat.....	171
Tabel 3.72 Hasil EPPD T.A 2023 Terhadap LPPD T.A 2022 .....	172
Tabel 3.73 Progres Perkembangan Kampung .....	177
Tabel 3.74 Progres Perkembangan Kampung Per Kecamatan .....	177
Tabel 3.75 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kutai Barat .....	182



Tabel 3.76 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur .....	183
Tabel 3.77 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar Tahun 2023.....	185
Tabel 3.78 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023.....	186
Tabel 3.79 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir RPJMD .....	186
Tabel 3.80 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak.....	188
Tabel 3.81 Cakupan Layanan Air Minum Sistem Perpipaan Perunit Pengolahan (WTP dan IKK) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023	190
Tabel 3.82 Data yang Terfasilitasi Spam Pedesaan .....	191
Tabel 3.83 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik.....	193
Tabel 3.84 Perbandingan Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 .....	194
Tabel 3.85 Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH .....	196
Tabel 3.86 Jumlah Unit RTLH .....	197
Tabel 3.87 Data Luas Kawasan Permukiman Kumuh dan Jumlah RTLH di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023.....	197
Tabel 3.88 Data Jumlah Rumah Di Kabupaten Kutai Barat .....	198
Tabel 3.89 Data Jumlah Rumah Tidak Layak Huni.....	199
Tabel 3.90 Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan Tahun 2023 .....	201
Tabel 3.91 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023.....	202
Tabel 3.92 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Akhir RPJMD .....	202
Tabel 3.93 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Kabupaten Kutai Barat.....	204
Tabel 3.94 Panjang Jalan Di Kabupaten Kutai Barat Menurut Status Tahun 2023.....	205
Tabel 3.95 Kondisi Jalan di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 .....	205
Tabel 3.96 Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Kutai Barat	



Tahun 2019-2023.....	207
Tabel 3.97 Rekap Penyediaan Layanan Internet Satelite-Vsat Di Kecamatan Se-Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2023 .....	209
Tabel 3.98 Rekap Data Cakupan Area Telekomunikasi Dengan Transmitter Menara Telekomunikasi Di Kecamatan Se-Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2023.....	210
Tabel 3.99 Analisis Atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya.....	216
Tabel 3.100 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Program dan Kegiatan .....	219



## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Kutai Barat Setelah Pemekaran Berdasarkan Topografi .....	20
Grafik 1.2 Persentase PDRB Kabupaten Kutai Barat Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2023 .....	29
Grafik 1.3 Persentase PDRB Kabupaten Kutai Barat Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2023 .....	31
Grafik 1.4 PDRB Per Kapita Kutai Barat .....	34
Grafik 1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	37
Grafik 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	71
Grafik 3.2 Pengkategorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran .....	76
Grafik 3.3 Persentase Distribusi PDRB atas Dasar Harga Belaku Menurut Lapangan Usaha .....	85
Grafik 3.4 Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat .....	86
Grafik 3.5 Persentase Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha .....	91
Grafik 3.7 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan Tahun 2021-2023 (Ton) .....	95
Grafik 3.8 Persentase Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha .....	97
Grafik 3.9 Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha .....	99
Grafik 3.10 Jumlah Wisatawan Kabupaten Kutai Barat .....	101
Grafik 3.11 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	104
Grafik 3.12 Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil .....	108
Grafik 3.13 Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil .....	110
Grafik 3.14 PDRB Perkapita Kabupaten Kutai Barat .....	114
Grafik 3.15 Indeks Kualitas Air.....	122
Grafik 3.16 Indeks Kualitas Udara.....	125
Grafik 3.17 Indeks Kualitas Lahan .....	128



Grafik 3.18 Rata-rata Lama Sekolah.....	133
Grafik 3.19 Harapan Lama Sekolah .....	135
Grafik 3.20 Usia Harapan Hidup .....	142
Grafik 3.21 Indeks Kepuasan Masyarakat.....	152
Grafik 3.22 Nilai SAKIP.....	164
Grafik 3.23 Nilai LPPD .....	171
Grafik 3.24 Indeks Pembangunan Gender.....	182
Grafik 3.25 Persentase Penduduk Berkases Air Minum Layak .....	189
Grafik 3.26 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik .....	193
Grafik 3.27 Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH.....	196
Grafik 3.28 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2023 .....	204
Grafik 3.29 Cakupan Layanan Telekomunikasi.....	207



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Kutai Barat .....	18
---	----



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh Pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Untuk mewujudkan Pemerintahan daerah yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang pada intinya mengharuskan Pemerintah Kabupaten beserta perangkatnya untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atau menyampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** sebagai laporan yang merupakan kewajiban pelaporan pelaksanaan pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan



keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Sebagai penjabaran dari Perpres Nomor 29 Tahun 2014, Pemerintah membuat petunjuk teknis (juknis) Sistem AKIP berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 ini disusun sehubungan dengan komponen dari Sistem AKIP yakni pelaporan kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Penyusunan LKjIP Tahun 2023 Kabupaten Kutai Barat berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian LKjIP Kabupaten Kutai Barat menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada



Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi dan Kepada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) yang telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2023 yaitu RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026.

## **B. DASAR HUKUM**

Pelaksanaan Penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 dilandasi oleh beberapa ketentuan hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5395);



5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikiator Kinerja Utama (IKU);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Nomor 4);



## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pemerintah daerah diminta untuk menyampaikan “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)” kepada Presiden. Dengan demikian maka penyusunan LKjIP ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan secara periodik, diukur dengan seperangkat indikator kinerja non-keuangan (*performance indicator*) dan menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden yang proses penyusunannya telah dikembangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **2. Tujuan**

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan masyarakat).
- Sebagai media pertanggungjawaban kepada publik, meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah dan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Organisasi Pemerintah serta meminimalkan peluang terciptanya korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah.
- Sebagai alat kendali dan sarana untuk menilai kinerja sehingga dapat mendorong terwujudnya *good governance* yang



memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah serta partisipasi masyarakat.

### **3. Permasalahan Pembangunan**

#### **3.1 Permasalahan Umum**

Setiap daerah pasti menghadapi berbagai permasalahan dalam pembangunan. Permasalahan pembangunan daerah bersifat dinamis, baik yang disebabkan faktor internal maupun eksternal, terlebih daerah yang tergolong masih baru seperti Kabupaten Kutai Barat. Permasalahan umum yang masih dihadapi oleh Kabupaten Kutai Barat dalam pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan antara lain:

Tabel 1.1  
Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2020, LPE Kab. Kutai Barat berada pada posisi -2,92.	Kondisi pandemi ini menyebabkan lesunya ekonomi masyarakat.	Masifnya penyebaran kasus Covid-19 di Kutai Barat dengan kasus terkonfirmasi sejumlah 7.033 jiwa (Agustus 2021) dan 235 jiwa meninggal. Untuk menekan penyebaran tersebut, diberlakukan pembatasan kegiatan dan pergerakan masyarakat.
		Sektor ekonomi penopang utama PDRB seperti sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan - 3,67%.	Harga Komoditi pertambangan dan penggalian yang terpengaruh oleh kondisi ekonomi dunia.
		Sektor pertanian dalam arti luas yang pada tahun 2020 juga	Peremajaan perkebunan masih kurang optimal karena tingginya biaya peremajaan. Ketersediaan benih unggul masih kurang.



		menunjukkan pertumbuhan negative sebesar -1,99%.	agroindustri Sumber Daya Lokal di Kabupaten Kutai Barat Belum mampu dikelola secara sinergis, inovatif berdaya saing nasional. Belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas. Belum optimalnya dukungan sarana prasarana dalam pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas.
		Belum optimalnya kontribusi sektor Perdagangan dan jasa.	Masih tingginya ketergantungan terhadap komoditi strategis dari luar daerah.
			Masih minimnya pelaku UMKM yang diberdayakan.
			Sektor pariwisata belum terkelola secara optimal, sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata masing kurang.
		Belum optimalnya kontribusi sektor.	lingkungan perairan sebagai media Sumber daya perikanan Mengalami penurunan Kualitas.
Budidaya perikanan keramba dan kolam belum optimal.			
2	Angka Kemiskinan menunjukkan trend meningkat sejak 5 tahun terakhir. Di tahun 2020, angka kemiskinan sebesar 9,29% urutan tertinggi ke-3 setelah Mahakam Ulu dan Kutai Timur. <i>Sumber: BPS Kaltim.</i>	Masih tingginya angka pengangguran. Tahun 2019 sebesar 5,08% dan meningkat 0,22% dari tahun 2018. Tahun 2020, belum ada data di BPS.	Lulusan masih belum sesuai dengan kebutuhan tempat kerja. Pencari kerja didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan maksimal SLTA.
			Angkatan kerja sebagian besar berasal dari perdesaan.
			Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal.
			Meningkatnya pemutusan hubungan kerja.
			Belum berkembangnya sarana dan prasarana pelatihan Balai Latihan Kerja yang dapat membekali keterampilan penduduk sebelum bekerja.



		Sebagian besar penduduk masih menggantungkan penghasilan usahanya di sub-sektor pertanian dengan nilai tambah yang relatif kecil.	Penyuluh PPL kerja belum maksimal untuk pertanian.
		Ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini di tunjukkan dari Indeks Gini yang meningkat selama 3 tahun terakhir Tahun 2020 sebesar 0,338 meningkat 0,004 dari tahun 2019.	Kurangnya inovasi di bidang pertanian dan perkebunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani.
			Pusat-pusat perekonomian masih berada dekat dari lingkup ibu kota kabupaten.
			Masih kurangnya akses pasar pelaku ekonomi, terutama pelaku ekonomi ditingkat pedesaan.
3	Pemenuhan kebutuhan primer Masyarakat (Air Minum, Sanitasi, listrik, rumah layak huni serta akses jalan dan jembatan dan telekomunikasi) belum optimal.	Masih terdapat 6,26% rumah tangga di Kutai Barat yang pada tahun 2020 belum memiliki Listrik. ( <i>Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 2020</i> ).	Menurunnya pengeluaran perkapita penduduk Kutai Barat. Tahun 2020 menempati urutan terendah ke-2 se-Provinsi Kalimantan Timur (9.712 Ribu Rp / Kapita / Tahun). * <i>Sumber: BPS Kaltim.</i>
			Kondisi geografis Kutai Barat yang mengakibatkan sulitnya penyaluran listrik (terutama listrik negara) ke daerah-daerah pelosok.
			Dari 1.286,97 Km jalan yang menjadi tanggungjawab kabupaten di tahun 2020, jalan mantap sebesar 55,7%. Selain ruas jalan konektivitas, infrastruktur Kawasan permukiman juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
		Belum optimalnya penuntasan jalan konektivitas yang menghubungkan antar kampung serta sistem drainase di kawasan	Belum optimalnya keterhubungan jaringan jalan yang menghubungkan antar



		Perkotaan Sendawar.	kampung.
		Belum optimalnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pekerjaan Umum.	Masih terdapat permukiman kumuh dengan luasan 1045,63 Ha dan terdapat rumah tidak layak huni sejumlah 10.652 Unit.
			Biaya operasional PDAM masih tinggi untuk biaya produksi (untuk bahan kimia), dan memerlukan sumber air baku lain selain sungai Mahakam.
			Jaringan pipa distribusi primer, sekunder, tersier dan sambungan rumah belum mencakup seluruh wilayah dalam cakupan layanan PDAM.
			Akses air minum layak baru mencapai 67,37% melalui jaringan perpipaan (PDAM) dan Non PDAM serta 4,82% melalui Jaringan non perpipaan. Masih terdapat 27,81% yang belum memperoleh akses terhadap air minum layak.
			Akses terhadap layanan pengelolaan air limbah layak sebesar 77,1%, akses Belum Layak 5,92% dan masih melakukan BABS (tanpa akses) 15,44%. Sedangkan akses Aman Air Limbah baru mencapai 1,54%. (Sumber: website Monev STBM 2020, diolah).
			Capaian Pengelolaan Persampahan masih rendah. Capaian penanganan sampah sebesar 51,5% (dalam wilayah Perkotaan Sendawar dan sekitarnya), sedangkan capaian pengurangan sampah masih 0%. Pengelolaan sampah masih terpusat di



			TPA, belum ada aktivitas pengurangan dan pemilahan sampah mulai dari titik lokasi timbulnya sampah.
			Masih rendahnya luas lahan pertanian yang mendapat layanan irigasi. Rasio jaringan irigasi 9.127 m terhadap luas lahan budidaya pertanian 2.570 Ha pada tahun 2020 sebesar 3,55.
			Lokasi pembangunan prasarana irigasi belum terkoneksi langsung dengan lahan pertanian.
			Belum tersedianya database (peta lahan pertanian, daerah irigasi dan sawah beririgasi).
		Masih adanya desa/titik area blank spot.	Kurang optimalnya koordinasi sektor pertanian dan sektor sumber daya air.
			Kewenangan untuk menambah tower dan BTS bukan berada di tangan Pemerintah daerah.
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kutai Barat masih rendah. Tahun 2020, menduduki peringkat terendah ke-2 se Kalimantan Timur (71,19). <i>*Sumber: BPS Kaltim.</i>	Masih rendahnya usia harapan hidup. Pada tahun 2020 menempati urutan ke- 6 se- Provinsi Kalimantan Timur (72,86). <i>*Sumber: BPS Kaltim.</i>	Kualitas Jaringan telekomunikasi di beberapa area perlu ditingkatkan.
			1. Kasus Stunting/gizi buruk masih tinggi.
			2. Jumlah Kasus Penyakit Menular Masih tinggi.
			3. Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, Diabet, ODGJ) masih ada dan cenderung meningkat.
			4. Masih kurangnya Tenaga Kesehatan terutama pada faskes dikampungkampung dan terbatasnya dokter-dokter spesialis.
			5. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kesehatan, terutama ketersediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan di Rumah sakit dan faskes faskes tingkat kampung.
			6. Prilaku sosial masyarakat yang masih menggunakan sungai sebagai tempat untuk BAB dan



			pembuangan limbah rumah tangga.
			7. Penduduk di sekitar sungai yang masih menjadikan air sungai sebagai sumber air bersih, sehingga menimbulkan berbagai penyakit.
			8. Sistem Pelayanan Rumah Sakit yang belum maksimal, terutama ketersediaan ruang perawatan medis, ICU dan sarana kesehatan rumah sakit lainnya termasuk Sistem Informasi Pelayanan Rumah Sakit.
			9. Kurangnya sarana sanitasi dan air bersih rumah tangga, yang menyebabkan tingginya kasus penyakit yang diakibatkan dari faktor kebersihan.
			10. Permasalahan lingkungan hidup seperti kesadaran masyarakat terkait kebersihan dan pengelolaan limbah dan sampah yang belum optimal.
	Rata-rata lama sekolah masih sangat rendah. Tahun 2020 menempati urutan ke 3 terendah se Provinsi Kalimantan timur (8,47). <i>*Sumber : BPS Kaltim.</i>		1. Sarana dan prasarana pendidikan masih sangat terbatas, termasuk di dalamnya ketersediaan guru. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas proses belajar-mengajar.
			2. Pasokan listrik yang tidak mencukupi ikut mengganggu proses belajar dan mengajar.
			3. Belum meratanya tenaga pendidik diikuti dengan masih rendahnya tingkat sertifikasi tenaga kependidikan.
			4. Pengembangan nilai, keragaman, dan kekayaan adat budaya masih belum tertangani secara optimal dan sistematis.
			5. Faktor ekonomi ikut mempengaruhi kemauan anak-anak usia sekolah untuk belajar. Lebih banyak anak-anak usia sekolah ikut membantu orang tuanya Bekerja.

Sumber : RPJMD Kab. Kutai Barat 2021-2026



### **3.2 Permasalahan Khusus (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan).**

#### **1. Urusan Pendidikan**

- Angka putus sekolah tinggi pada jenjang SMA dan SMK karena faktor ekonomi dan akses (geografis, sarana transportasi).
- Rendahnya kualitas pendidikan mengacu pada hasil UAS SD dan SMP.
- Banyak guru yang belum berpendidikan S1 dan guru PTT yang berlatar belakang pendidikan non-keguruan.
- Sarana Pendukung Kurang (lab, buku, alat peraga dan lain-lain).

#### **2. Urusan Kesehatan**

- Rasio pelayanan Rumah Sakit yang belum merata.
- Ketersediaan tenaga kesehatan yang belum memenuhi standar nasional.
- Kekosongan obat, proses lelang baru dimulai pada bulan juni.
- Jumlah tenaga kesehatan pada puskesmas terlatih masih kurang (terlatih APN, MTBS, BBLR, SDIDTK, dsb).
- Jumlah pengelola program promkes masih kurang.
- Sebagian pengelola program promkes di PKM belum mengetahui uraian tugas sebagai penyuluh.
- Kondisi gedung Rumah Sakit banyak yang tidak sesuai persyaratan.
- Masih ada peralatan canggih yang belum beroperasi karena SDM belum Bersertifikasi
- Pervalensi penyakit tidak menular yang terus meningkat.

#### **3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- Konektivitas di daerah tertinggal dan antar kawasan masih terbatas.
- Aksesibilitas antar kampung, kecamatan dan pusat kegiatan ekonomi belum maksimal.
- Alih fungsi lahan tinggi dan konversi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- Belum efektifnya penataan ruang sebagai alat untuk mengembangkan wilayah yang dapat mengakomodasikan



kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, lintas pelaku pembangunan dan lintas sumber pembiayaan.

- Cakupan layanan infrastruktur dasar untuk air minum dan air limbah dan perumahan permukiman belum 100% memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Penyediaan layanan air minum layak dan layanan sanitasi untuk air limbah dan persampahan (sesuai target SPM berdasarkan Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota) serta listrik bagi masyarakat belum dapat berjalan secara optimal.
- Sistem irigasi pertanian belum dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal. Pemerintah Daerah sudah membangun system irigasi. Data menunjukkan DAK Penugasan selama tahun 2017, 2018 dan 2019 selalu ada pembangunan atau pemeliharaan jaringan irigasi, akan tetapi belum dapat dioptimalkan penggunaan oleh masyarakat dikarenakan ada beberapa titik area pertanian/perkebunan/sawah yang jauh dari jaringan irigasi sehingga perlu ada sinkronisasi/pembaharuan data arean pertanian/perkebunan/persawahan.

#### **4. Urusan Perencanaan dan Pembangunan**

- Sinkronisasi perencanaan pembangunan belum terlaksana secara optimal.
- Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah masih lemah.
- Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD masih belum berjalan beriringan.
- Kegiatan penelitian yang berkaitan dengan pembangunan dan inovasi daerah masih belum berkembang.
- Kompetensi sumber daya manusia dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah masih sangat terbatas.

#### **5. Urusan Perumahan dan Permukiman**

- Masih terdapat penduduk yang bertempat tinggal di hunian tidak layak.



- Pembenahan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni masih belum berjalan optimal.
- Masih terjadi backlog perumahan.

#### **6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

- Angka kriminalitas yang cukup tinggi.
- Jumlah demonstrasi yang anarkis masih cukup tinggi.
- Angka penyalahgunaan narkoba yang cukup besar.

#### **7. Urusan Sosial**

- Belum optimalnya Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

#### **8. Urusan Ketenagakerjaan**

- Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka.
- Masih tingginya angka pengangguran terdidik.
- Masih rendahnya kualitas tenaga kerja
- Belum optimalnya fungsi sarana hubungan industrial.

#### **9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- Capaian IPG dan IDG yang belum optimal.
- Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang belum optimal.

#### **10. Urusan Pangan**

- Belum optimalnya pemerataan pemanfaatan hasil produksi pangan pada musim panen dan paceklik.
- Belum optimalnya nilai PPH (Pola Pangan Harapan) masyarakat Kutai Barat.
- Masih terdapat desa rawan pangan Kutai Barat
- Rendahnya pengawasan pangan yang beredar.

#### **11. Urusan Pertanahan**

- Belum semua bidang tanah memiliki kepastian hukum.
- Masih terjadinya sengketa dan konflik pertanahan.

#### **12. Urusan Lingkungan Hidup**

- Permasalahan alih fungsi lahan yang memicu konflik sosial (hutan menjadi perkebunan dan pertambangan).
- Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam memelihara Kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan masih



tingginya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam.

- Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah.
- Belum tercapainya gungsi kawasan lindung secara optimal.

### **13. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- Kepemilikan dokumen kependudukan (terutama akta kelahiran, akta kematian dan akta perkawinan) oleh penduduk terutama pada keluarga miskin masih rendah.

### **14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung**

- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program-program pemberdayaan masyarakat.
- Kapasitas dan peran kelembagaan pemberdayaan masyarakat masih relatif rendah.

### **15. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- Ketahanan Keluarga. Rapuhnya ketahanan penyebab berbagai permasalahan keluarga seperti kasus perceraian dan KDRT.
- Distribusi penduduk yang tidak merata.

### **16. Urusan Perhubungan**

- Belum adanya pelabuhan besar untuk angkutan air.
- Belum adanya terminal tipe B/C yang refresentatif.

### **17. Urusan Komunikasi & Informatika**

- Kurangnya integrasi berbagai interface pelayanan publik.

### **18. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

- Rendahnya daya saing koperasi dibanding pelaku usaha non koperasi.
- Rendahnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia.
- Masih adanya koperasi yang tidak aktif.
- Masih belum optimalnya kontribusi UKM dalam perekonomian daerah.
- Daya saing produk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah lebih rendah dibanding barang luar.
- Inovasi produksi, proses masih kurang.
- Kemitraan dengan lembaga keuangan dalam pembiayaan



belum terwujud.

**19. Urusan Penanaman Modal**

- Rendahnya Investasi baik PMA maupun PMDN.
- Penyebaran investasi antar kecamatan yang tidak merata.

**20. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

- Minimnya sarana olahraga.
- Belum optimalnya layanan pendidikan keolahragaan.
- Belum optimalnya pembudayaan olahraga.
- Belum optimalnya pengembangan kapasitas/pemberdayaan kaum muda yang berkontribusi pada pembangunan.

**21. Urusan Statistik**

- Penyediaan data untuk analisis belum memadai.

**22. Urusan Kebudayaan**

- Masih banyaknya cagar budaya dan warisan budaya yang belum tertangani secara optimal.
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya.
- Minat masyarakat untuk berkunjung ke museum masih rendah karena daya tarik dan promosi yang kurang serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya museum.
- Belum optimalnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, bahasa, seni dan tradisi luhur.

**23. Urusan Perpustakaan**

- Rendahnya minat baca masyarakat.
- Belum optimalnya pinjam silang antar perpustakaan.

**24. Urusan Kearsipan**

- Penyelenggaraan kearsipan dan pemanfaatan arsip yang belum optimal.

**25. Urusan Persandiaan**

- Jumlah sandiman yang belum optimal (ketersediaan SDM sandi yang berkualifikasi terbatas).

**26. Urusan Perikanan**

- Masih tingginya illegal Fishing (penggunaan Racun, Setrum).



- Belum ada pelabuhan ikan dan penampungan.
- Belum optimalnya kapasitas SDM dan kelembagaan perikanan.
- Penyediaan kebutuhan ikan di Kutai Barat masih banyak dipasok dari luar daerah.
- Konsumsi ikan di masyarakat Kutai Barat relatif rendah dibanding tingkat nasional.

#### **27. Urusan Pariwisata**

- Kurangnya Produk Wisata Berkelas Dunia.
- Pengeluaran wisatawan masih rendah.
- Lama tinggal wisatawan yang masih rendah.
- Objek daya tarik wisata belum optimal dikembangkan.
- Sarana prasarana pendukung pariwisata masih terbatas.
- Belum memiliki ikon wisata yang mampu bersaing dengan Kabupaten lain.
- Kesiapan masyarakat sebagai tuan rumah masih perlu ditingkatkan.

#### **28. Urusan Pertanian**

- Keterbatasan Kapasitas SDM Pertanian.
- Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan) belum optimal.
- Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
- Produksi dan produktivitas pertanian masih rendah.
- Sektor pertanian belum terkait dengan industri pengolahan.
- Tenaga penyuluh pertanian masih terbatas.
- Dukungan subsistem agribisnis masih belum tersedia (penyediaan bibit, budidaya, pemasaran dan permodalan).

#### **29. Urusan Kehutanan**

- Masih terdapat lahan kritis di kawasan hutan.
- Masih terjadi kerusakan hutan.
- Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan lain yang tidak berizin.

#### **30. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

- Belum optimalnya penyediaan listrik di Kampung.
- Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan.

- Belum optimalnya konversi energi.

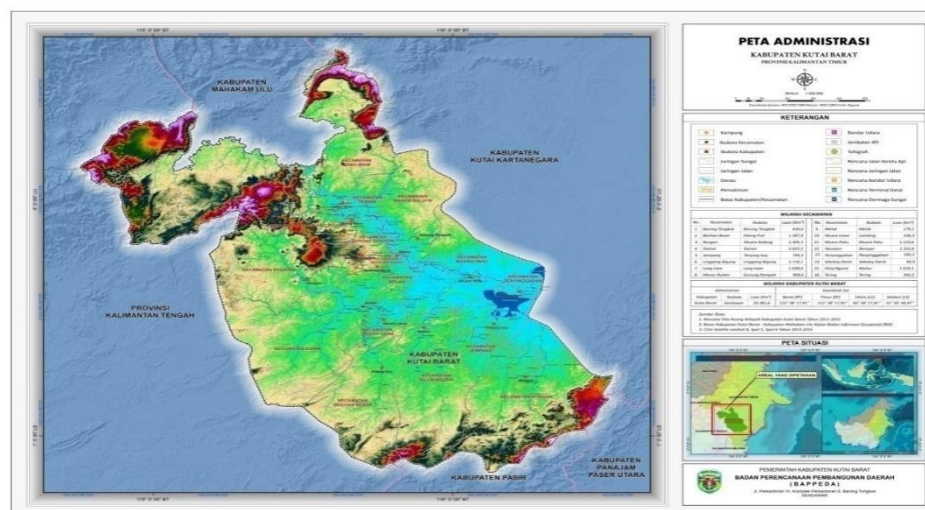
### **31. Urusan Perdagangan**

- Persaingan usaha sektor perdagangan sangat kompetitif, dan memarginalisasi pelaku skala kecil.
- Masih rendahnya nilai ekspor.
- Jejaring pasar keluar wilayah Kabupaten belum terbentuk.
- Kerjasama dengan berbagai stakeholder masih kurang.

## **D. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT**

### **1. Kondisi Geografi**

Gambar 1.1  
Peta Kabupaten Kutai Barat



Sumber : Bappeda Litbang Kab. Kutai Barat

Kabupaten Kutai Barat dengan ibukota Sendawar terletak di bagian barat daya Provinsi Kalimantan Timur dan merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi dan Kabupaten lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu dari Kabupaten Kutai Barat, secara langsung luas wilayah Kabupaten Kutai Barat berkurang menjadi sekitar 20.381,59 Km<sup>2</sup> atau kurang lebih mencapai 16,06% dari keseluruhan luas Propinsi Kalimantan Timur.



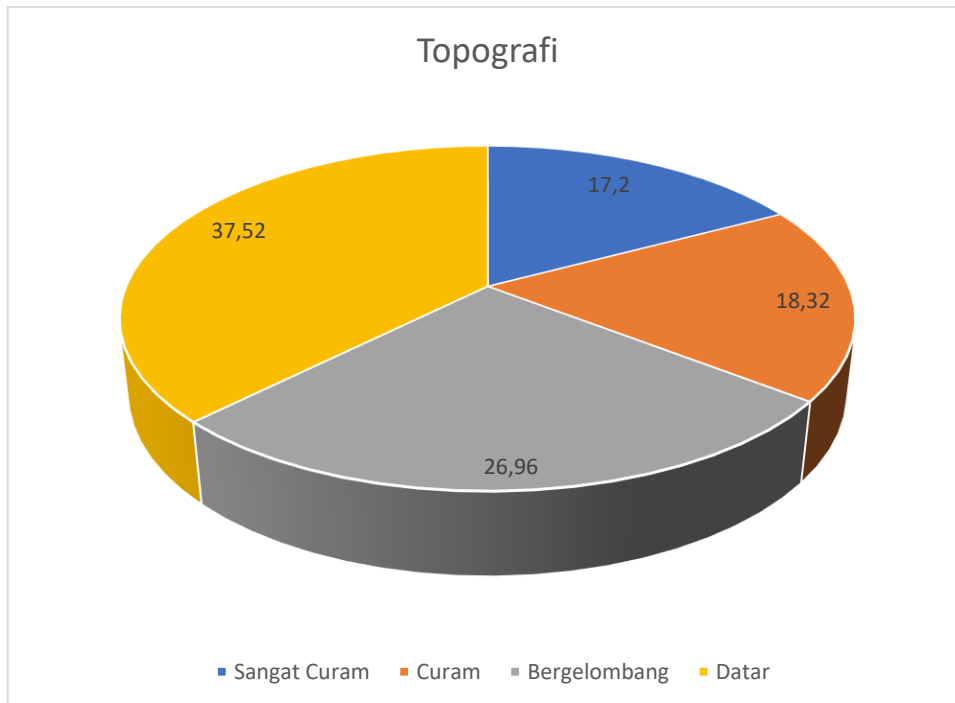
Secara geografis Kabupaten Kutai Barat terletak antara 114°45'49"- 116°32'43" Bujur Timur dan 00°37'30" Lintang Utara dan 1°09'33" Lintang Selatan.

Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kutai Barat memiliki batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mahakam Hulu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2013, Kabupaten Kutai Barat memiliki wilayah seluas 20.381.59 Km<sup>2</sup>. Didominasi oleh topografi datar sampai dengan bergelombang sedang yakni sebesar 46,48 %, topografi sangat curam (17,20%) dan curam (18,32%). Wilayah dengan topografi pegunungan mencapai 350.653,07 hektar atau kurang dari 18% dari luas seluruhnya dan berada di bagian Utara dan Selatan Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana pada grafik berikut:

Grafik 1.1  
Luas Wilayah Kabupaten Kutai Barat Setelah Pemekaran  
Berdasarkan Topografi



Sumber : BAPPEDA LITBANG Kab. Kutai Barat

Wilayah berbukit dan bergunung dijumpai di Kecamatan Bongan kawasan gunung Meratus, Kecamatan Linggang Bigung bagian Barat dan Utara, dan Kecamatan Long Iram bagian Utara.

Secara Klimatologi wilayah Kabupaten Kutai Barat terbagi menjadi 4 tipe daerah hujan yaitu:

- 1) Kawasan dengan curah hujan antara 2.000 - 2.500 mm/tahun. Kawasan ini terletak pada ujung bagian timur Kabupaten Kutai Barat di sepanjang wilayah Kecamatan Penyinggahan, Tanjung Isui dan Muara Kedang;
- 2) Kawasan dengan curah hujan antara 2.500 - 3.000 mm/tahun. Kawasan ini terletak di bagian tengah meliputi daerah sekitar Kecamatan Melak, Muara Pahu, Damai, Muara Lawa, Jempang dan Bongan;
- 3) Kawasan dengan curah hujan antara 3.000 - 3.500 mm/tahun. Kawasan ini terletak di sebelah barat Melak



meliputi Kecamatan Barong Tongkok sampai bagian selatan Kecamatan Barong Tongkok;

- 4) Kawasan dengan curah hujan antara 3.500 - 4.000 mm/tahun. Kawasan ini terletak di wilayah Kecamatan Long Iram meliputi daerah sekitar Kecamatan Long Iram;

Setelah pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu, saat ini Kabupaten Kutai Barat terdiri dari 16 Kecamatan, 190 Kampung dan 4 Kelurahan. Kecamatan dengan jumlah kampung terbanyak ialah Kecamatan Barong Tongkok yang terdiri dari 19 Kampung. Adapun nama kecamatan, jumlah kampung dan kelurahan dapat dilihat lebih jelasnya pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2  
Jumlah Kecamatan, Kelurahan Dan Kampung  
Di Kabupaten Kutai Barat

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Kampung
1	Long Iram	-	11
2	Melak	2	6
3	Barong Tongkok	2	19
4	Damai	-	17
5	Muara Lawa	-	8
6	Muara Pahu	-	12
7	Jempang	-	12
8	Bongan	-	16
9	Penyinggahan	-	6
10	Bentian Besar	-	9
11	Linggang Bigung	-	11
12	Nyuatan	-	10
13	Siluq Ngurai	-	16



14	Mook Manaar Bulatn	-	14
15	Tering	-	15
16	Sekolaq Darat	-	8
Jumlah		<b>4</b>	<b>190</b>

*Sumber : Bagian Pemerintahan Setkab. Kutai Barat*

## **2. Kondisi Demografis**

Penduduk merupakan pelaku sekaligus sasaran pembangunan sehingga data penduduk merupakan data pokok yang perlu diketahui karakteristiknya (kuantitas, distribusi, komposisi dan kualitas) untuk mengetahui potensi maupun kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menuju subyek yang berkualitas. Penduduk mempunyai kedudukan yang strategis dalam pembangunan daerah yaitu sebagai subyek pembangunan dan juga sebagai obyek pembangunan.

Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan.

Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercatat sebanyak **180.119 jiwa**, Jumlah penduduk ditahun 2023 ini ada peningkatan dibanding tahun 2022 yang jumlah penduduknya sebanyak 175.610 jiwa.

Berikut disajikan jumlah penduduk Kutai Barat Tahun 2023 masing-masing Kecamatan berdasarkan jenis kelamin:



Tabel 1.3  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Long Iram	4.032	3.565	7.597
2	Melak	8.322	7.786	16.108
3	Barong Tongkok	18.382	16.984	35.366
4	Damai	6.015	5.329	11.344
5	Muara Lawa	4.058	3.797	7.855
6	Muara Pahu	4.741	4.210	8.951
7	Jempang	6.518	5.676	12.194
8	Bongan	6.286	5.564	11.850
9	Penyinggahan	2.134	1.915	4.049
10	Bentian Besar	1.872	1.679	3.551
11	Linggang Bigung	8.708	7.937	16.645
12	Nyuatan	3.649	3.221	6.870
13	Siluq Ngurai	3.522	3.021	6.543
14	Mook Manaar Bulatn	4.760	4.241	9.001
15	Tering	5.820	5.301	11.121
16	Sekolaq Darat	5.777	5.297	11.074
Jumlah		<b>94.596</b>	<b>85.523</b>	<b>180.119</b>

*Sumber : Disdukcapil Kab. Kutai Barat*

Berdasarkan jenis kelamin, pada Tahun 2023 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 94.596 jiwa (52,52%) sedangkan penduduk perempuan sebanyak 85.523 jiwa (47,48%). Untuk jumlah Keseluruhan ditahun 2023 ini laki-laki dan perempuan berjumlah 180.119 Jiwa.

Berikut data menunjukkan luas wilayah, jumlah KK, jumlah penduduk serta kepadatan penduduk pada tiap kecamatan di Kabupaten Kutai Barat hingga Tahun 2023 :



Tabel 1.4  
Luas Wilayah, Jumlah Kk, Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Menurut  
Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk / Km <sup>2</sup>
Long Iram	1.657,95	2.459	7.597	4,58
Melak	179,11	5.061	16.108	89,93
Barong Tongkok	430,58	11.665	35.366	82,14
Damai	2.025,53	3.842	11.344	5,60
Muara Lawa	436,54	2.564	7.855	17,99
Muara Pahu	1.110,64	2.882	8.951	8,06
Jempang	744,47	3.992	12.194	16,38
Bongan	2.305,31	3.736	11.850	5,14
Penyinggahan	192,08	1.293	4.049	21,08
Bentian Besar	1.287,86	1.174	3.551	2,76
Linggang Bigung	5.718,07	5.339	16.645	2,91
Nyuatan	1.312,62	2.225	6.870	5,23
Siluq Ngurai	1.629,10	2.134	6.543	4,02
Mook Manaar Bulatn	960,57	3.016	9.001	9,37
Tering	342,22	3.617	11.121	32,50
Sekolaq Darat	48,94	3.629	11.074	226,28
<b>Kutai Barat</b>	<b>20.381,59</b>	<b>58.628</b>	<b>180.119</b>	<b>8,84</b>

Sumber : Disdukcapil Kab. Kutai Barat Tahun 2023

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Kutai Barat pada umumnya tergolong rendah, namun demikian beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Barong Tongkok, Sekolaq Darat, Melak, Tering dan Penyinggahan merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih padat di banding Kecamatan lain. Bila dilihat perbandingan antara jumlah penduduk 180.119 Jiwa dengan wilayah Kutai Barat yang memiliki luas 20.381,59 Km<sup>2</sup>, maka dapat diperoleh kepadatan penduduk untuk Kabupaten Kutai Barat adalah sebesar 8,84 jiwa/km<sup>2</sup>. Dari kepadatan tersebut di atas, Kecamatan Sekolaq Darat memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 226,28 jiwa/km<sup>2</sup> kemudian diikuti Kecamatan Melak dengan kepadatan 89,93 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Barong Tongkok sebesar 82,14 jiwa/km<sup>2</sup>. Sebaliknya Kecamatan dengan kepadatan



penduduk terendah adalah Bentian Besar dengan kepadatan penduduk 2,76 jiwa/km<sup>2</sup>, diikuti Kecamatan Linggang Bigung dengan 2,91 jiwa/km<sup>2</sup> dan Siluq Ngurai yang kepadatan penduduk 4,02 jiwa/ km<sup>2</sup>.

### **3. Kondisi Perekonomian**

Kondisi perekonomian Kabupaten Kutai Barat di tahun 2023 relatif tidak banyak mengalami pergeseran. Pergerakan roda ekonomi ini tidak terlepas dari situasi dan kondisi Kabupaten Kutai Barat dengan penerapan kebijakan pemerintah daerah melalui paket kebijakan yang berpedoman pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata serta terarah dan tepat sasaran, dengan selalu berlandaskan pada skala prioritas kebutuhan. Prioritas pembangunan selama Tahun 2023 pada sektor ekonomi menitikberatkan program pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada peningkatan kesejahteraan melalui usaha kecil/menengah, koperasi, dan pertanian sebagai tumpuan kehidupan sebagian besar masyarakat Kutai Barat.

Kondisi makro ekonomi Kutai Barat juga tidak terlepas dari dampak perkembangan kondisi ekonomi maupun non ekonomi. Keadaan tersebut sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional yang tercerminkan pula pada perekonomian regional di setiap Kabupaten. Beberapa indikator makro ekonomi nasional memperlihatkan perkembangan yang positif selama tahun 2023 seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita.

Dampak dari faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi bagi Kutai Barat, sebagai daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) memberi pengaruh terhadap perkembangan kondisi makro ekonomi. Dengan meningkatnya kemampuan keuangan Daerah untuk melayani masyarakat (*Public Services*), secara langsung telah menimbulkan “*Multiplier Effect*” terhadap perekonomian daerah, sehingga diharapkan pembangunan di Kutai Barat dapat lebih cepat



berkembang dan hasilnya dapat dinikmati masyarakat secara nyata.

### **3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2023 sebagai alat untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dapat dilihat pada tabel berikut. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu



daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2023 sebagai alat untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.5**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan**  
**Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)**  
**Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 – 2023**

Kategori		2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.621.643,24	2.629.510,93	2.691.659,71
B	Pertambangan dan Penggalian	11.881.676,80	12.415.008,97	13.017.824,27
C	Industri Pengolahan	1.117.912,78	1.139.649,45	1.180.424,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.472,90	6.696,57	7.279,84
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.818,87	8.449,08	8.971,11
F	Konstruksi	2.023.802,77	2.217.841,66	2.533.335,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.546.175,04	1.640.384,59	1.739.257,02
H	Transportasi dan Pergudangan	331.743,14	374.145,53	412.899,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	61.672,80	66.684,14	72.674,31
J	Informasi dan Komunikasi	319.676,39	349.759,08	383.224,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	27.580,78	29.108,56	31.737,88
L	Real Estate	119.676,27	122.822,70	124.618,39
M,N	Jasa Perusahaan	11.222,04	11.820,00	12.759,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	828.050,20	888.106,94	956.971,68
P	Jasa Pendidikan	338.709,56	356.787,20	736.034,57
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	204.344,63	214.415,78	228.155,71
R,S,TU	Jasa lainnya	60.873,23	65.231,74	70.826,70
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		<b>21.509.051,42</b>	<b>22.536.422,90</b>	<b>23.848.653,63</b>

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kutai Barat*



**Tabel 1.6**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)**  
**Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 – 2023**

Kategori		2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.803.474,30	5.326.997,27	5.499.511,26
B	Pertambangan dan Penggalian	15.773.477,49	25.126.174,38	19.383.555,28
C	Industri Pengolahan	2.046.268,01	2.277.554,43	2.305.196,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.166,16	8.696,30	9.713,58
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.197,23	11.549,07	12.959,69
F	Konstruksi	3.477.715,24	4.000.792,65	4.771.094,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.320.102,31	2.651.405,92	2.968.466,61
H	Transportasi dan Pergudangan	504.314,88	607.711,28	709.565,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	98.325,35	110.588,49	126.941,05
J	Informasi dan Komunikasi	369.496,73	411.337,81	451.612,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	41.546,40	47.164,42	52.873,01
L	Real Estate	156.825,56	171.928,22	178.774,19
M,N	Jasa Perusahaan	18.072,63	19.068,91	21.441,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.427.860,17	1.531.834,74	1.652.959,62
P	Jasa Pendidikan	570.123,11	612.669,16	652.662,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	358.051,21	375.895,19	407.231,66
R,S,TU	Jasa lainnya	109.119,23	118.593,03	131.469,08
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		<b>32.092.829,01</b>	<b>43.410.261,26</b>	<b>39.336.027,23</b>

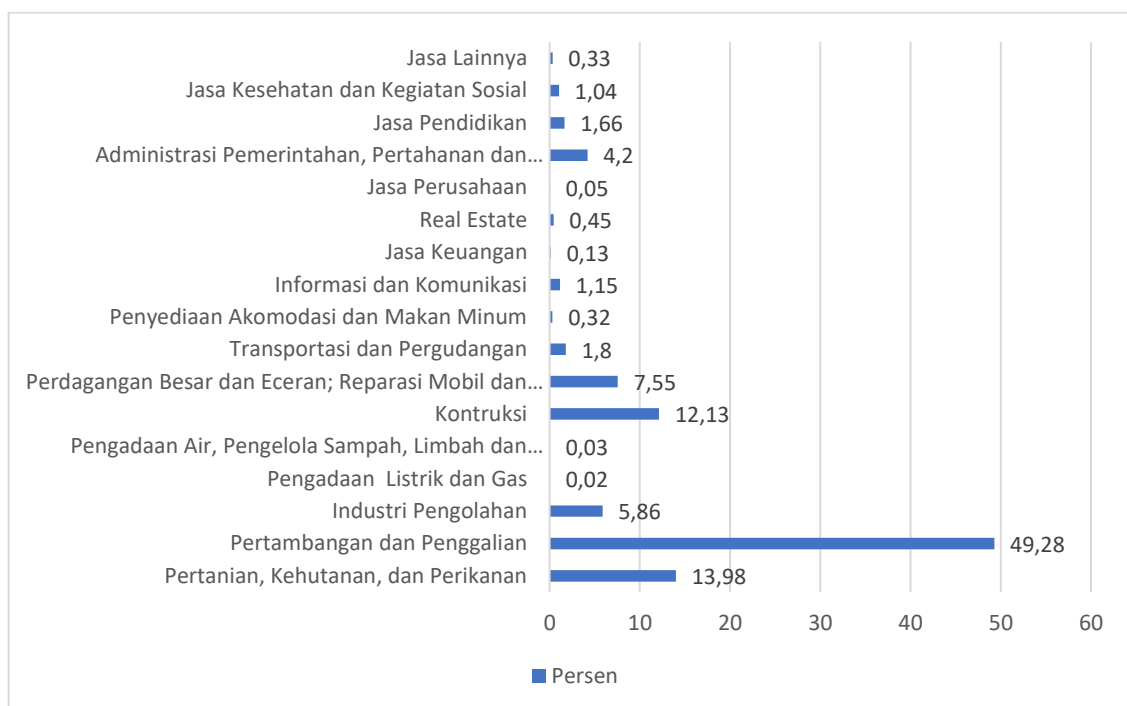
Sumber : *Badan Pusat Statistik Kutai Barat*

Pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Barat selama periode 2021-2023 didominasi oleh dua lapangan usaha, yaitu Pertambangan dan Penggalian, serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan selama 2021-2023 kedua lapangan usaha tersebut cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahunnya namun pada tahun 2023 pada Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. PDRB Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2023 yang dihasilkan melalui lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yaitu mencapai 49,28 persen. Selanjutnya disusul



oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,98 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 12,13 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,55 persen, lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 5,86 persen. Sementara peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 5 (lima) persen. Kontribusi masing-masing lapangan usaha dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Grafik 1.2**  
**Persentase PDRB Kabupaten Kutai Barat Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2023 (Atas Dasar Harga Berlaku)**



Sumber : *Badan Pusat Statistik Kutai Barat*

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB terdiri atas

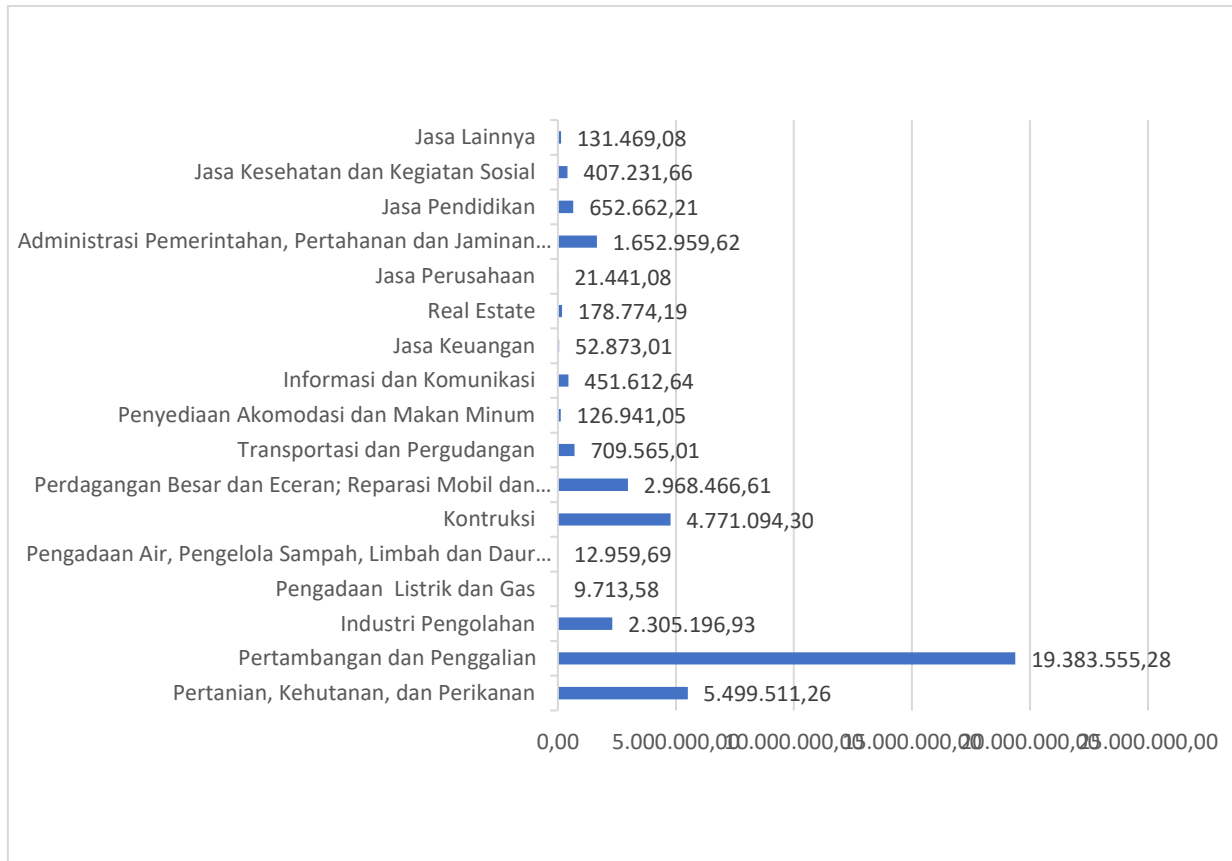


dua jenis yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

### **3.2 Struktur Ekonomi**

Struktur perekonomian Kutai Barat pada tahun 2023 didominasi Lapangan Usaha berbasis sumberdaya alam, yaitu Pertambangan khususnya komoditas Batu Bara yang pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Terlihat dari besarnya peranan Lapangan Usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kutai Barat. Dan pada tahun 2023, struktur ekonomi Kutai Barat juga menunjukkan peningkatan, dimana lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian masih mendominasi (19.383.555,28 juta rupiah) namun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, diikuti lapangan usaha Pertanian yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (5.499.511,26 juta rupiah) dan Konstruksi (4.771.094,30 juta rupiah). Sedangkan peranan lapangan usaha yang lain jika dilihat kontribusinya terhadap pembentukan total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai barat mulai berangsur-angsur menunjukkan peningkatan.

**Grafik 1.3**  
**PDRB Kabupaten Kutai Barat Berdasarkan**  
**Lapangan Usaha Tahun 2023 (Atas Dasar Harga Berlaku)**



### **3.3 Pertumbuhan Ekonomi**

Seiring dengan hilangnya musibah global dan nasional yaitu COVID-19, situasi ekonomi regional Kutai Barat menunjukkan peningkatan di tahun 2023. Kondisi ini tergambar dari estimasi capaian akan laju pertumbuhan ekonomi Kutai Barat tahun 2023 yang mencapai 5,82 persen, mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu 4,78 persen.

Berikut Tabel Laju Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kutai Barat tahun 2021-2023 :



**Tabel 1.7**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2023 (Persen)**

KATEGORI	URAIAN	Tahun		
		2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,73	0,30	2,36
B	Pertambangan dan Penggalian	5,72	4,49	4,86
C	Industri Pengolahan	-0,64	1,94	3,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,92	3,46	8,71
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,34	8,06	6,18
F	Konstruksi	4,11	9,59	14,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,68	6,09	6,03
H	Transportasi dan Pergudangan	4,89	12,78	10,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,36	8,13	8,98
J	Informasi dan Komunikasi	9,23	9,41	9,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,24	5,54	9,03
L	Real Estate	-1,73	2,63	1,46
M,N	Jasa Perusahaan	1,29	5,33	7,95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,63	7,25	7,75
P	Jasa Pendidikan	5,29	5,34	5,39
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,92	4,93	6,41
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,29	7,16	8,58
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		<b>4,19</b>	<b>4,78</b>	<b>5,82</b>

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kutai Barat*

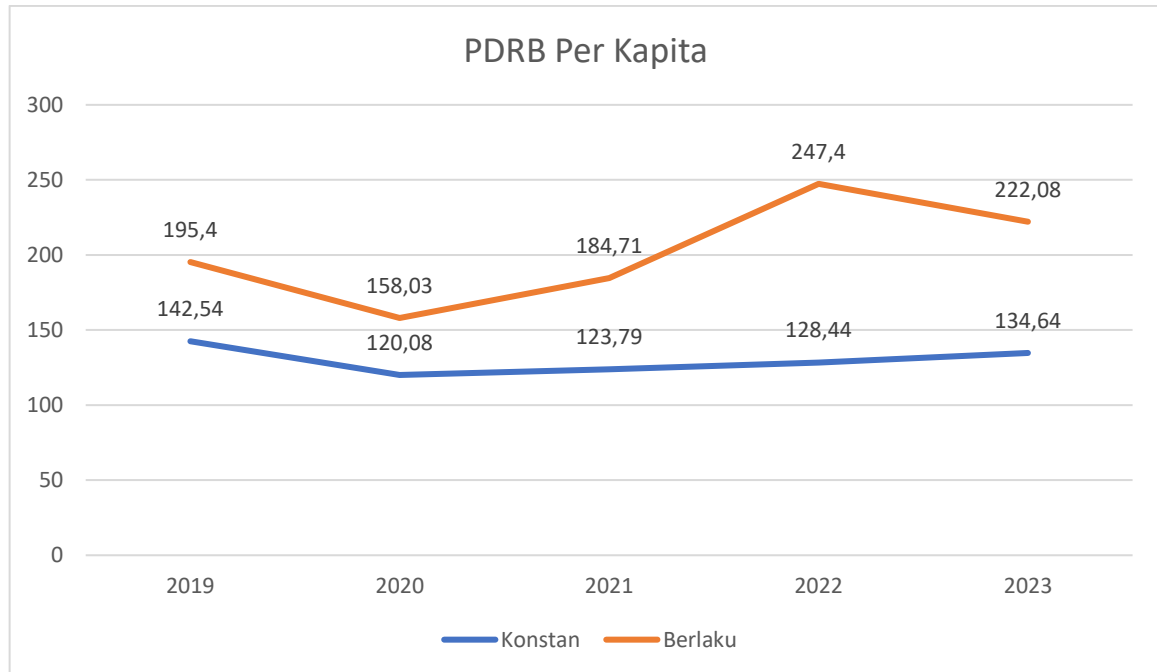
Potret perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat dari dimensi yang lebih luas lagi. Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling bertautan (berkorelasi) dan berinteraksi dengan aspek dan indikator makro lainnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dan mempengaruhi indikator-indikator pembangunan lainnya. Hal ini berguna untuk dapat melihat kerangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dan holistic.



### **3.3 PDRB Per Kapita**

Indikator lain untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/ wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kutai Barat atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2022 senantiasa mengalami kenaikan, namun pada Tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, PDRB per kapita tercatat sebesar 195,40 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai 247,40 juta rupiah dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 222,08 juta rupiah. Penurunan angka PDRB per kapita ini dipengaruhi oleh faktor inflasi. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar harga konstan di Kabupaten Kutai Barat mengalami kenaikan sejak tahun 2019 hingga 2023, masing-masing sebesar 142,54 juta rupiah pada tahun 2019 dan 136,64 juta rupiah pada tahun 2023. Namun tidak setinggi yang terjadi pada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, karena sudah tidak ada pengaruh inflasi. Selengkapnya, nilai PDRB perkapita dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 1.4  
PDRB Per Kapita Kabupaten Kutai Barat  
Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)



Pada tahun 2023, beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan PDRB per kapita dibandingkan tahun 2022. Jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 215,76 juta rupiah pada tahun 2023, hal ini menunjukkan PDRB per kapita Kabupaten Kutai Barat lebih tinggi. Berdasarkan analisis Klassen Typology Kabupaten Kutai Barat termasuk ke dalam katagori Daerah Maju dan Tumbuh Cepat (Rapid Growth Region) yaitu daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita provinsi. Tabel berikut dapat menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki nilai PDRB per kapita lebih tinggi dari pada Provinsi Kalimantan Timur, sementara Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan dan



Kota Samarinda masih di bawah PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 1.8

Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku  
Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Paser	173,34	157,18	193,82	271,26	208,43
<b>Kutai Barat</b>	<b>195,40</b>	<b>158,03</b>	<b>184,71</b>	<b>247,40</b>	<b>222,08</b>
Kutai Kartanegara	212,76	204,50	241,07	322,08	270,72
Kutai Timur	367,11	268,80	310,29	471,27	369,42
Berau	173,83	143,67	171,49	236,23	198,53
Penajam Paser Utara	57,76	50,78	55,87	69,50	87,26
Mahakam Ulu	102,45	85,38	90,43	95,12	100,94
Balikpapan	165,69	151,31	160,30	181,29	201,64
Samarinda	79,95	80,36	85,22	98,99	104,97
Bontang	327,06	311,88	320,30	344,15	366,46
<b>Kalimantan Timur</b>	<b>180,26</b>	<b>161,80</b>	<b>183,16</b>	<b>238,92</b>	<b>215,76</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kutai Barat

### 3.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia atau status tiga kemampuan dasar penduduk, yakni berumur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup, berpengalaman dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. 3 (tiga) dimensi pokok penyusun IPM tersebut, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Aspek kesehatan dalam pembangunan manusia diukur oleh indeks harapan hidup sebagai representasi kemampuan untuk hidup sehat dan berumur panjang. Aspek



pendidikan diukur oleh indeks pendidikan yang diperoleh dengan mengukur rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah. Standar hidup yang layak merupakan gambaran dari aspek ekonomi masyarakat. Aspek ekonomi tersebut dihitung dengan menggunakan indikator GNI per kapita.

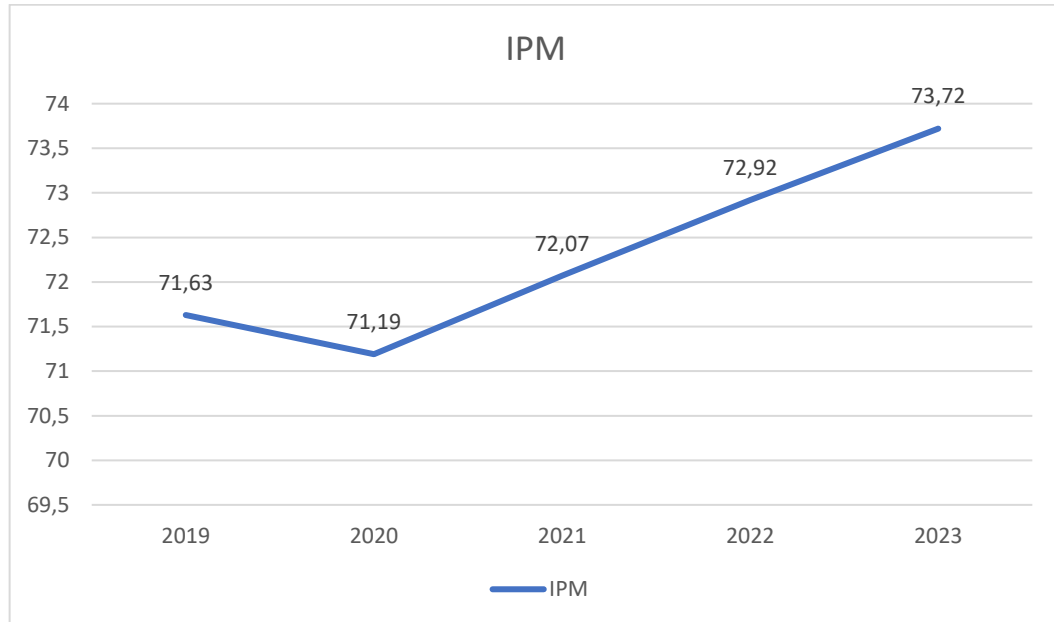
Berikut Tabel Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dan Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 – 2023 :

Tabel 1.9  
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2019 – 2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Paser	72,29	72,04	72,93	73,44	74,14
<b>Kutai Barat</b>	<b>71,63</b>	<b>71,19</b>	<b>72,07</b>	<b>72,92</b>	<b>73,72</b>
Kutai Kartanegara	73,78	73,59	74,06	74,67	75,30
Kutai Timur	73,49	73,00	73,81	74,35	74,98
Berau	74,88	74,71	75,20	75,74	76,21
Penajam Paser Utara	71,64	71,41	72,01	72,55	73,30
Mahakam Ulu	67,58	67,09	67,95	68,75	69,59
Balikpapan	80,11	80,01	80,71	81,13	81,66
Samarinda	80,20	80,11	80,76	81,43	82,32
Bontang	80,09	80,02	80,59	80,94	81,56
<b>Kalimantan Timur</b>	<b>76,61</b>	<b>76,24</b>	<b>76,88</b>	<b>77,44</b>	<b>78,20</b>

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kutai Barat*

Grafik 1.5  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di  
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 – 2023



Pada tahun 2023, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibandingkan tahun 2022. Jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 78,20 pada tahun 2023, hal ini menunjukkan IPM Kabupaten Kutai Barat lebih rendah.

#### **4. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Atas



Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat 7 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- 2) Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Barat merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- 3) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat merupakan Inspektorat Tipe A;

Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat, terdiri dari :

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
- 2) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- 6) Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- 7) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



- 8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
- 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 11) Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- 12) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
- 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 14) Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- 15) Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
- 16) Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
- 17) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- 18) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;



- 19) Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
- 20) Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; dan
- 21) Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan.

Badan Daerah Kabupaten Kutai Barat, terdiri atas:

- 1) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 2) Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan; dan
- 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Kecamatan terdiri atas:

- 1) Kecamatan Barong Tongkok dengan Tipe A;
- 2) Kecamatan Melak dengan Tipe A;
- 3) Kecamatan Linggang Bigung dengan Tipe A;
- 4) Kecamatan Sekolaq Darat dengan Tipe A;
- 5) Kecamatan Damai dengan Tipe A;
- 6) Kecamatan Muara Lawa dengan Tipe A;
- 7) Kecamatan Jempang dengan Tipe A;
- 8) Kecamatan Bongan dengan Tipe A;
- 9) Kecamatan Siluq Ngurai dengan Tipe A;
- 10) Kecamatan Bentian Besar dengan Tipe A;
- 11) Kecamatan Muara Pahu dengan Tipe A;
- 12) Kecamatan Penyinggahan dengan Tipe A;
- 13) Kecamatan Mook Manaar Bulatn dengan Tipe A;



- 14) Kecamatan Nyuatan dengan Tipe A;
- 15) Kecamatan Tering dengan Tipe A; dan
- 16) Kecamatan Long Iram dengan Tipe A.

Perangkat Daerah Lainnya :

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RSUD) Tipe C, bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah;
- 2) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebanyak 19 unit, tersebar di 16 Kecamatan, sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- 3) UPT Dinas Daerah;
- 4) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
- 5) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 6) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kutai Barat yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya peraturan perundangundangan yang



mengatur teknis pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

## **5. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Kutai Barat**

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2023 didukung oleh sumber daya aparatur yang cukup memadai sebanyak 13.414 orang yang terdiri dari :

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 3.434 Orang.
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Sebanyak 1.680 Orang
- Non ASN/Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 8.300 orang

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah :

**Tabel 1.11**

**Rincian Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Non ASN/TKK  
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023**

No	Jenis Kepegawaian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3.783	3.634	3.628	3.582	3.434
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	N/a	N/a	N/a	463	1.680
3	Non ASN/Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	5.483	6.063	9.658	9.397	8.300
Jumlah		11.582	11.966	13.286	13.442	13.414

*Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Barat*

**Tabel 1.12**

**Rincian Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Non ASN/TKK  
Berdasarkan Gender**

No	Jenis Kepegawaian	Gender		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1.657	1.777	3.434
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	429	1.251	1.680



3	Non ASN/Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	3.295	5.005	8.300
Jumlah		5.381	8.033	13.414

*Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Barat*

**Tabel 1.13**  
**Rincian Jumlah ASN Di Lingkungan Pemerintah**  
**Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 Berdasarkan**  
**Golongan Ruang Dan Gender**

No	Golongan dan Ruang	Gender		Jumlah Total
		Laki - Laki	Perempuan	
1	I	28	3	31
2	II	490	397	887
3	III	882	1.155	2.037
4	IV	257	222	479
Jumlah		1.657	1.777	3.434

*Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Barat*

**Tabel 1.14**  
**Rincian Jumlah Eselon Di Lingkungan Pemerintah**  
**Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 - 2023**

No	Eselon	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Eselon II	30	24	30	27	36
2	Eselon III	157	147	177	161	138
3	Eselon IV	494	488	505	227	229
Jumlah		694	693	712	415	403

*Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Barat*

Berdasarkan tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 rincian sebagai berikut:



Tabel 1.15  
Rincian Jumlah ASN Di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Gender		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	SD	16	1	17
2	SLTP	21	2	23
3	SLTA	539	352	891
4	D1	2	6	8
5	D2	34	16	50
6	D3	105	298	403
7	D4/S1	701	887	1.588
8	S2	237	213	450
9	S3	2	2	4
Jumlah		1.657	1.777	3.434

Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Barat

Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 menurut tingkat pendidikan dengan rincian sbb :

Tabel 1.16  
Rincian Jumlah Non ASN Di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Gender		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	SD	74	32	106
2	SLTP	131	88	219
3	SLTA	1.922	2.537	4.459
4	D1	8	21	29
5	D2	7	26	33
6	D3	212	484	696
7	D4/S1	918	1.780	2.698
8	S2	23	37	60
9	S3	-	-	-



Jumlah	3.295	5.005	8.300
--------	-------	-------	-------

Tabel 1.17  
Data Non ASN/Tenaga Kerja Kontrak (TKK)  
Tenaga Kependidikan (Guru) Tahun 2023

SEKOLAH	TINGKAT PENDIDIKAN					
	SMA	D I	D 2	D 3	D4/S1	TOTAL
PG/PAUD	91	2	2	6	130	231
TK/RA	113	4	6	5	156	284
SD/MI	290	3	15	20	272	600
SLB	0	0	0	0	0	0
SMP/MTS	10	2	2	12	233	259
JUMLAH	504	11	25	43	791	1.374

Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Barat

Tabel 1.18  
Data Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Tenaga Adm. Penyelenggara  
Kependidikan Tahun 2023

JENJANG PENDIDIKAN	JABATAN				JUMLAH
	TU	PERPUSTAKAAN	PENJAGA SEKOLAH	PELAYAN	
PG/PAUD	12	0	0	7	19
TK/RA	17	3	5	11	36
SD/MI	127	55	70	65	317
SMP/MTs	94	23	19	23	159
JUMLAH	250	81	94	106	531

Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Barat

#### **E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 ini dilakukan dengan membentuk fokus grup yang melakukan pengumpulan data, kajian, dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sasaran/program yang telah ditetapkan. Berbagai dokumen perencanaan daerah yang telah ada baik itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun



2021 - 2026, Arah dan Kebijakan Umum dan Strategi Prioritas APBD tahun 2023, serta dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2023 menjadi bahan perencanaan kinerja untuk diukur dan dievaluasi pencapaiannya.

Dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, LKjIP tahun 2023 lebih banyak menguraikan hal-hal strategis yang masih memerlukan perbaikan, sedangkan hal-hal yang relatif telah berhasil dengan baik tidak terlalu banyak diungkapkan.

Adapun sistematika penyusunan LKjIP Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang; maksud dan tujuan; gambaran umum Kabupaten Kutai Barat serta sistematika penulisan.

**Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, menjelaskan Perencanaan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk periode 2021 - 2026 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kutai Barat Tahun 2023.

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dikaitkan dengan sasaran strategis untuk tahun 2023 dan penyajian dari hasil pengukuran Kinerja Tahun 2023.

**Bab IV – Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

##### **2.1.1 Visi dan Misi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dituangkan merupakan pemaparan dari kerangka pembangunan strategis Kabupaten Kutai Barat untuk periode lima tahun. Segala hal terkait seperti penjabaran visi, isi, serta program pemerintah Kabupaten Kutai Barat tertuang di dalamnya.

Pedoman RPJMD mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Tak hanya itu, RPJPN dan RPJMN Nasional juga turut menjadi bahan pertimbangan. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023.

#### **A. VISI**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu :

**“Kutai Barat Semakin Adil, Mandiri Dan Sejahtera  
Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan Dan Peningkatan Sumber  
Daya Manusia”**

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

##### **a. Semakin Adil**

Semakin Adil diartikan bahwa secara bertahap dan pasti berbagai kesenjangan (GAP) atau disparitas hasil-hasil



pembangunan akan semakin berkurang dan hasil-hasil pembangunan akan semakin dirasakan manfaatnya secara lebih meluas dan merata ke seluruh wilayah dan lapisan masyarakat Kutai Barat, tidak lagi berfokus di pusat-pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu saja. Sehingga, pembangunan merata pada semua wilayah menuju kesejahteraan.

**b. Semakin Mandiri**

Semakin Mandiri diartikan bahwa masyarakat Kutai Barat di masa mendatang diharapkan akan semakin mampu untuk terus maju dengan bertumpu pada kekuatan serta daya inovasi masyarakat dan daerah, kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar serta sederajat dengan daerah lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Dalam membangun kemandirian ini mutlak harus dibangun kemampuan daya saing daerah.

**c. Semakin Sejahtera**

Semakin Sejahtera diartikan bahwa di masa mendatang dapat terciptanya kualitas hidup masyarakat Kutai Barat pada semua aspek kehidupan, pembangunan yang akan dilaksanakan pada lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan memiliki pendapatan yang lebih baik.

**d. Berbasis Ekonomi Kerakyatan**

Berbasis Ekonomi Kerakyatan diartikan bahwa masyarakat Kutai Barat di masa mendatang diharapkan mampu memanfaatkan Sumber Daya alam secara berkelanjutan dalam menyelenggarakan system ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi local, melalui peningkatan



kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.

**e. Peningkatan Kualitas SDM**

Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya peningkatan daya saing dan kemandirian masyarakat namun juga mendukung pembangunan nasional.

**B. MISI**

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan sebelumnya. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Tabel 2.1  
Keterkaitan Visi Dan Misi Kepala Daerah

VISI	MISI
Kutai Barat Semakin Adil, Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan	<i>Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan local secara berkelanjutan</i>



Ekonomi Kerakyatan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	<i>Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan yang didukung optimalisasi pelayanan kesehatan</i>
	<i>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel</i>
	<i>Meningkatkan pemerataan insfrastruktur dasar dan insfrastruktur penopang ekonomi kerakyatan</i>

- 1. Misi Pertama : Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan local secara berkelanjutan.** Dalam periode lima (5) tahun mendatang, pendekatan pengembangan ekonomi kerakyatan menggunakan konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang dipadukan dengan konsep pengembangan kawasan (*kluster*). Kedua pendekatan tersebut diharapkan menciptakan pekerjaan yang beragam, sesuai dengan keterampilan masyarakat local dan berkelanjutan.;
- 2. Misi kedua : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan yang didukung optimalisasi pelayanan kesehatan.** Manusia merupakan objek sekaligus subjek/pelaku pembangunan. Pelestarian lingkungan, perlawanan terhadap kemiskinan, peningkatan ekonomi, dan sebagainya merupakan upaya mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan bagi umat manusia. Pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang menjadi ukuran kualitas sumber daya manusia merupakan penentu keberhasilan pembangunan.;
- 3. Misi ketiga : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.** Visi Kutai Barat dapat



dicapai dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Kerjasama dapat terjadi ketika ada rasa saling percaya dan peduli antara pemerintah dan masyarakat pemerintah daerah perlu menunjukkan bahwa kepedulian dtunjukkan dengan pelayanan yang cepat dan murah; dan

**4. Misi keempat : *Meningkatkan pemerataan insfrastruktur dasar dan insfrastruktur penopang ekonomi kerakyatan.***

Insfrastruktur atau sering disebut sarana dan prasarana memegang peranan yang sangat strategis dalam pembangunan. Insfrastruktur merupakan modal pembangunan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa insfrastruktur seperti jalan, listrik, pelabuhan merupakan modal penting untuk mencapai pertumbuhan perekonomian wilayah yang tinggi dan berkelanjutan. Insfrastruktur yang baik akan meningkatkan perekonomian wilayah sekaligus perekonomian masyarakat. Kebijakan pembangunan insfrastruktur penunjang ekonomi kerakyatan.

Penjabaran pelaksanaan keempat misi diatas, telah diuraikan melalui janji politik Bupati Kutai Barat. Semuanya tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat 2021-2026. Penetapan janji politik, merupakan cerminan tentang urgensi permasalahan yang jadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bupati Kutai Barat.

RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 merupakan dokumen strategis Kabupaten Kutai Barat untuk mengimplementasikan janji-janji dimaksud menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan RPJMD, dan oleh karenanya menjadi contoh baik dalam tata kelola pemerintahan dan perencanaan pembangunan, bahwa janji-janji yang telah



disampaikan mutlak harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan.

Berkenaan dengan janji-janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimaksud dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2.2**  
**Janji Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih**

No	Janji Politik/Kampanye	Program Terkait	SKPD Terkait Pencapaian Misi
1	Meningkatkan Jumlah Wirausahawan Lokal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	Meningkatkan peran BUMK dalam mendukung kegiatan usaha masyarakat lokal	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
3	Meningkatkan Jumlah UMKM berbasis komoditas unggulan dan berdaya saing	Program pengembangan UMKM Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pendukung Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	Meningkatkan Rantai Pasok Produksi Komoditas Unggulan Lokal	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Pertanian Dinas Perikanan



		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
6	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Praktik-Praktik Jasa Lingkungan Dalam Skema Pembangunan Ekonomi Hijau	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
7	Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
8	Menurunkan Angka Putus Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Meningkatkan Rata-Rata Nilai UN		
10	Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan dan RSUD
11	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Menjangkau Keseluruh Lapisan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
12	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan,	



		Pendampingan dan Asistensi	
13	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
14	c. Menyediakan infrastruktur yang merata serta Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar d. Menyediakan Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber : RPJMD Kab. Kutai Barat 2021-2026

Janji-janji tersebut bukanlah sekedar janji belaka. Banyak sisi positif yang bermanfaat bagi kesejahteraan warga Kabupaten Kutai Barat. Dengan janji-janji tersebutlah, Bupati Kutai Barat terus memelihara keinginan dan tekad kuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Kutai Barat.

### **2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021-2026**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam dokumen perencanaan perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy Planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi, dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah



mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama dengan lebih menekankan pada target kinerja. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran renstra perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Hubungan antara kepala daerah dan perangkat daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pada Penyusunan RPJMD ini disertakan indikator untuk setiap tujuan sebagai penjabaran dari misi yang telah ditetapkan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut dilakukan reviu atas tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 menetapkan sebanyak 9 (Sembilan) sasaran dan 23 (dua puluh tiga) indikator sasaran sebagai berikut:



Tabel 2.3  
Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Kabupaten Kutai Barat 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Misi 1 : Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan local secara berkelanjutan.		
Meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang semakin merata	Laju Pertumbuhan Ekonomi	
	Meningkatnya peran sector unggulan daerah berbasis kluster terhadap Perekonomian Daerah (PDRB)	Kontribusi sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB
		Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB
		Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB
Menurunkan Angka Kemiskinan	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan	
	Terciptanya lapangan kerja baru dan Wirausahawan local baru	Tingkat Pengangguran terbuka
		Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil
	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat Kutai Barat	PDRB Perkapita
Menjaga Keberlanjutan Kawasan Dalam Skema Pembangunan Ekonomi Hijau	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
	Terjaganya kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air
		Indeks Kualitas Udara
		Indeks Kualitas Lahan
Misi 2 : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan yang didukung optimalisasi pelayanan kesehatan.		
Meningkatkan Kualitas Sumber	Indeks Pembangunan Manusia	
		Rata-Rata Lama Sekolah



Daya Manusia Kab. Kutai Barat	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)
Misi 3 : <i>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.</i>		
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat
		Indeks BPK
		Nilai LPPD
		Persentase Desa Mandiri
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		Nilai SAKIP
Misi 4 : <i>Meningkatkan pemerataan insfrastruktur dasar dan insfrastruktur penopang ekonomi kerakyatan.</i>		
Menyediakan Insfrastruktur dasar dan Insfrastruktur Penunjang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan	Indeks Gini	
	Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Insfrastruktur Dasar	Persentase Penduduk Berakses air Minum Layak
		Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
		Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Layak Tidak Huni)
	Tersedianya Insfrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap
Cakupan Layanan Telekomunikasi		

Sumber : RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026



## **2.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023**

Dalam mencapai keberhasilan pembangunan jangka menengah daerah, tentu saja harus ada beberapa kebijakan yang dijadikan dasar dalam perumusan perencanaan. Perencanaan strategis yang dituangkan dalam RPJPD dan RPJMD harus dapat diterjemahkan kedalam perencanaan operasional, dalam RPJMD yang disusun saat ini keselaraasan antara visi, misi daerah, serta sasaran pokok, dan arah kebijakan di elaborasi dalam visi, misi kepala daerah, serta sasaran pokok, dan arah kebijakannya.

Program pembangunan daerah merupakan program atau agenda strategis kepala daerah pada peripde RPJMD yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Kebijakan belanja daerah pada RPJMD 2021-2026 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan seperti :

1. Pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Pemenuhan Belanja Fungsi Kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Pemenuhan kewajiban belanja moda transportasi sebesar 10 persen dari target Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
4. Pemenuhan belanja pegawai atas belanja gaji dan tunjangan dan rencana pemberian tambahan penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja kepada seluruh Aparatur Sipil



Negara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari visi politik kepala daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Kabupaten Kutai Barat. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu diidentifikasi program prioritas pembangunan Daerah sesuai dengan janji politik pada saat kampanye.

## **2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Sasaran akan tercapai Ketika strategi yang digunakan tepat. Pemkab Kutai Barat selalu optimistis mampu mencapai sasaran berbekal strategi matang untuk seluruh lini yang ingin dibenahi.

Adapun strategi Pemkab Kutai Barat mencakup penentuan kebijakan, program, serta kegiatan. Untuk itu sebaiknya terlebih dahulu membahas secara singkat tentang arti dari kebijakan, program, serta kegiatan.

**Kebijakan** : pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang disepakati pihak-pihak terkait lalu ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan Pedoman. Maka pedoman itulah yang nanti dijadikan petunjuk bagi setiap kegiatan demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

**Program** : adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran Sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.

**Kegiatan** : adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi



dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut. Sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas Fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan Merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemkab Kutai Barat melaksanakan reviu terhadap sasaran dan indikator kinerja. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan. Terutama, indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana table berikut:

**Tabel 2.4**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah**  
**Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026**

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan
1	Meningkatnya peran sektor unggulan daerah berbasis kluster terhadap perekonomian daerah	1.1	Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas terhadap PDRB	%
		1.2	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	%
		1.3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%



2	Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan Wirausahawan Lokal baru	2.1	Tingkat Pengangguran terbuka	%
		2.2	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%
3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat Kutai Barat	3.1	PDRB Perkapita	Juta
4	Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup	4.1	Indeks Kualitas Air	Indeks
		4.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks
		4.3	Indeks Kualitas Lahan	Indeks
5	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	5.1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun
		5.2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun
6	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	6.1	Usia Harapan Hidup	Tahun
7	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah	7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai
		7.2	Opini BPK	Opini
		7.3	Nilai LPPD	Poin
		7.4	Persentase Desa Mandiri	%
		7.5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%
		7.6	Nilai SAKIP	Poin
8	Meningkatnya dan meratanya kualitas Infrastruktur dasar	8.1	Persentase penduduk berakses air minum	%
		8.2	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%
		8.3	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%
9	Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Masyarakat	9.1	Proporsi Panjanag Jaringan Jalan dalam kondisi mantap	%
		9.2	Cakupan Layanan Komunikasi	%

Sumber : RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026



## 2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Penyusunan Perjanjian Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan salah satu tahapan dalam **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi Amanah kepada pimpinan SKPD sebagai penerima Amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian Target Kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administrative, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi, dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan system manajerial dalam perjanjian kinerja, segala sesuatu menjadi terbuka dan bukannya sekedar tanda tangan.

Tabel 2.5  
Perjanjian Kinerja  
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	<b>Meningkatnya peran sektor unggulan daerah berbasis kluster terhadap</b>	1.1	Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas terhadap PDRB	%	15,36



	<b>perekonomian daerah</b>	1.2	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	0,55
		1.3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	0,4
2	<b>Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan Wirausahawan Lokal baru</b>	2.1	Tingkat Pengangguran terbuka	%	4,46
		2.2	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%	0,44
3	<b>Meningkatnya standar hidup layak masyarakat Kutai Barat</b>	3.1	PDRB Perkapita	Juta	198,29
4	<b>Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup</b>	4.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	62,3
		4.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	93,44
		4.3	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	67,04
5	<b>Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan</b>	5.1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,52
		5.2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,98
6	<b>Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan</b>	6.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,15
7	<b>Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah</b>	7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,50
		7.2	Opini BPK	Opini	WTP
		7.3	Nilai LPPD	Poin	3,7
		7.4	Persentase Desa Mandiri	%	0,13
		7.5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	84,17
		7.6	Nilai SAKIP	Poin	68



8	<b>Meningkatnya dan meratanya kualitas Infrastruktur dasar</b>	8.1	Persentase penduduk berakses air minum	%	90,60
		8.2	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	99,6
		8.3	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	27
9	<b>Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan</b>	9.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi mantap	%	64,70
		9.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	53

Sumber : RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026

## 2.5 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin di capai Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2022 Berjumlah Rp 2.199.570.475.364,00. Adapun setelah perubahan berjumlah Rp 4.510.943.671.026,00,00.

Anggaran Belanja langsung merupakan bagian dari APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2023, Komposisi belanja APBD Kabupaten Kutai Barat, Sebagai berikut:

Tabel 2.6  
Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat  
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Belanja Operasi	2.526.504.326.629,00



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023**



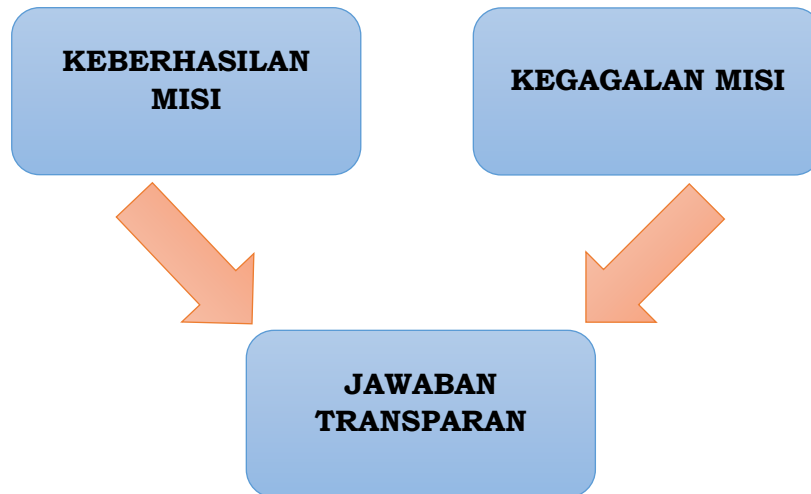
2	Belanja Modal	1.399.783.821.461,00
3	Belanja Tidak Terduga	120.000.000.000,00
4	Belanja Transfer	464.655.522.936,00
Jumlah		<b>4.510.943.671.026,00</b>

*Sumber : BKAD Kab. Kutai Barat*

**Tabel 2.7**  
**Alokasi Anggaran Per Indikator Sasaran Tahun 2023**

No	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp)
1	Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas terhadap PDRB	80.492.699.451
2	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	22.250.674.104
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	21.231.076.438
4	Tingkat Pengangguran terbuka	2.746.816.056
5	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	10.492.699.451
6	PDRB Perkapita	2.233.469.021
7	Indeks Kualitas Air	33.908.170.657
8	Indeks Kualitas Udara	
9	Indeks Kualitas Lahan	
10	Harapan Lama Sekolah	175.815.396.191
11	Rata-Rata Lama Sekolah	
12	Usia Harapan Hidup	146.697.735.132
13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	7.003.431.980
14	Opini BPK	890.122.365.556
15	Nilai LPPD	3.473.148.890
16	Persentase Desa Mandiri	6.787.238.300
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	2.208.376.860
18	Nilai SAKIP	
19	Persentase penduduk berakses air minum	55.233.363.900
20	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	37.881.010.626
21	Persentase rumah tangga pengguna listrik	1.976.398.000
22	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	667.321.592.715
23	Cakupan Layanan Telekomunikasi	5.760.130.279
<b>Jumlah</b>		<b>2.173.635.793.607</b>

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**



#### **3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur, dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Sebelum pembahasan lebih jauh, ada baiknya memahami terlebih dahulu pengertian Akuntabilitas Kinerja. Secara umum, artinya yakni jawaban transparan terkait keberhasilan misi dan kegagalan misi. Jawaban tentang dua hal, itu disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Lantas, siapa saja yang punya kewajiban untuk melakukan akuntabilitas kinerja itu sendiri? Jawabannya, ada tiga : Perorangan,



Badan Hukum dan Pimpinan Kolektif. Berakuntabilitas jadi hal wajib dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat selaku pengemban amanah masyarakat. Kewajiban ini sudah dilakukan dengan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Ketentuan pembuatan laporan, sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Isi laporan menggambarkan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, RKT Tahun 2023, RKPD Tahun 2023, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Predikat Nilai Capaian Kinerja Indikator**

No	Persentase	Predikat
1	<100%	Tidak Tercapai
2	=100%	Tercapai/Sesuai Target
3	>100%	Melebihi Target

Tabel 3.2  
Predikat Nilai Capaian Kinerja Sasaran

No	Kategori	Rata-Rata Capaian %	Keterangan
1	Melampaui Target	>100	MT
2	Sangat Baik	85.00 - 100	SB
3	Baik	70.00 - 84.99	B
4	Cukup Baik	55.00 - 69.99	CB
5	Kurang Baik	0 - 54.99	KB

Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuannya, demi mengukur peningkatan kinerja, serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah, adalah menentukan kinerja utama dari instansi pemerintah bersangkutan. Kinerja harus utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU jadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Tingkat Kabupaten Kutai Barat dan Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut:



**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas terhadap PDRB	%	15,36	13,98	91,02
2	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	0,55	1,38	250,91
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	0,4	0,32	80
4	Tingkat Pengangguran terbuka	%	4,46	6,16	72,40
5	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%	0,44	2,3	522,72
6	PDRB Perkapita	Juta	198,29	222,08	112
7	Indeks Kualitas Air	indeks	62,3	53,08	85,20
8	Indeks Kualitas Udara	indeks	93,44	91,80	98,24
9	Indeks Kualitas Lahan	indeks	67,04	70,30	104,86
10	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,52	8,85	103,87
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,98	13,25	102,08
12	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,15	73,19	100,05
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,50	82,21	99,64
14	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100
15	Nilai LPPD	Poin	3,7	2,7564	74,49
16	Persentase Desa Mandiri (Jumlah)	%	0,13	0,2474	190,30
17	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	84,17	85,29	101,33
18	Nilai SAKIP	Poin	68	63,64	93,59
19	Persentase penduduk berakses air minum	%	90,60	91,70	101,21
20	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	99,6	87,25	87,39
21	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	27	7,41	364,37
22	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi mantap	%	64,70	68,67	106,1
23	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	53	61,86	116,71

*Catatan/ Note : \*Data Tahun 2022*

Dari table tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada :

A. Misi 1 : Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kawasan



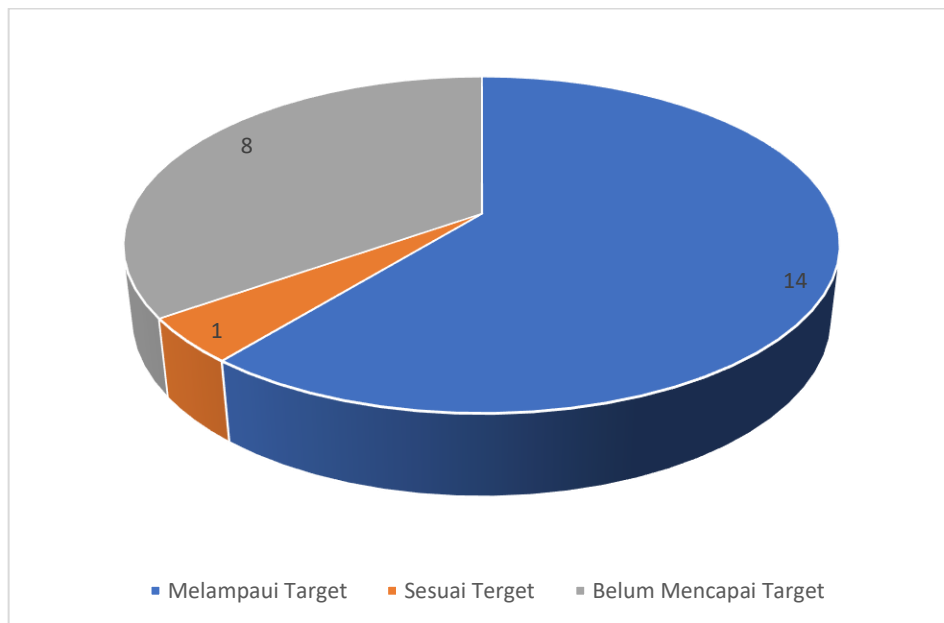
Berdasarkan Potensi Unggulan Lokal Secara Berkelanjutan

1. Kontribusi Sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB, mencapai 91,02%.
  2. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB, mencapai 250,91%.
  3. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB, mencapai 80%.
  4. Tingkat Pengangguran Terbuka, mencapai 72,40%.
  5. Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil, mencapai 522,72%.
  6. PDRB Perkapita, mencapai 112%
  7. Indeks Kualitas Air, mencapai 85,20%
  8. Indeks Kualitas Udara, mencapai 98,24%
  9. Indeks Kualitas Lahan, mencapai 104,86%
- B. Misi 2 : Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Pendidikan dan Pelatihan yang didukung Optimalisasi Pelayanan Kesehatan
1. Rata-rata Lama Sekolah, mencapai 103,87%
  2. Angka Harapan Lama Sekolah, mencapai 102,08%
  3. Usia Harapan Hidup, mencapai 100,05%
- C. Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel
1. Indeks Kepuasan Masyarakat, mencapai 99,64%
  2. Opini BPK, mencapai 100%
  3. Nilai LPPD, mencapai 74,49%
  4. Persentase Desa Mandiri, mencapai 190,30%
  5. Indeks Pembangunan Gender (IPG), mencapai 101,33%
  6. Nilai SAKIP, mencapai 93,59%
- D. Misi 4 : Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penopang Ekonomi Kerakyatan
1. Persentase Penduduk Berakse Air Minum Layak, mencapai 101,21%
  2. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik, mencapai 87.39%

3. Berkurangnya jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), mencapai 364,37%
4. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap, mencapai 106,1%
5. Cakupan Layanan Telekomunikasi, mencapai 116,71%

Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas dapat dilihat bahwa ada 14 (Empat Belas) Indikator yang Melampaui Target, 1 (Satu) Indikator yang Mencapai Target dan 8 (Delapan) Indikator yang Tidak Mencapai Target, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023



### **3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISA KINERJA SASARAN STRATEGIS**

Pembahasan capaian kinerja kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk mewujudkan pencapaian Misi secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026,



lebih lanjut diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 2023.

Dalam laporan ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 maupun RKPD Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, telah ditetapkan 11 (Sebelas) Sasaran dengan 23 (Dua Puluh Tiga) indikator kinerja (Outcome) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Indikator Per Sasaran**

No	Sasaran	Jumlah	
1	Meningkatnya peran sektor unggulan daerah berbasis kluster terhadap perekonomian daerah	3	Indikator
2	Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan Wirausahawan Lokal baru	2	Indikator
3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat Kutai Barat	1	Indikator
4	Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup	3	Indikator
5	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	2	Indikator
6	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1	Indikator
7	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah	6	Indikator
8	Meningkatnya dan meratanya kualitas Infrastruktur dasar	3	Indikator



9	Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan	2	Indikator
---	--	---	-----------

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Rekapitulasi Capaian Sasaran  
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	<b>Meningkatnya peran sektor unggulan daerah berbasis kluster terhadap perekonomian daerah</b>	Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas terhadap PDRB	%	15,36	13,98	91,02
		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	0,55	1,38	250,91
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	0,4	0,32	80
		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>				<b>140,64</b>
2.	<b>Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan Wirausahawan Lokal baru</b>	Tingkat Pengangguran terbuka	%	4,46	6,16	72,40
		Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%	0,44	2,3	522,72
		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>				<b>297,65</b>
3.	<b>Meningkatnya standar hidup layak masyarakat Kutai Barat</b>	PDRB Perkapita	Juta	198,29	222,08	112
		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>				<b>112</b>
4.	<b>Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup</b>	Indeks Kualitas Air	Indeks	62,3	53,08	85,20
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	93,44	91,80	98,24
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	67,04	70,30	104,86
		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>				<b>96,1</b>
5.	<b>Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan</b>	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,52	8,85	103,87
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,98	13,25	102,08
		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>				<b>102,97</b>



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023**



6.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,15	73,19	100,05
			Rata-Rata Capaian Kinerja			100,05
7.	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,50	82,21	99,64
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100
		Nilai LPPD	Poin	3,7	2,7564	74,49
		Persentase Desa Mandiri (Jumlah)	%	0,13	0,2474	190,30
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	84,17	85,29	101,33
		Nilai SAKIP	Poin	68	63,64	93,5
			Rata-Rata Capaian Kinerja			109,88
8.	Meningkatnya dan meratanya kualitas Infrastruktur dasar	Persentase penduduk berakses air minum	%	90,60	91,70	101,21
		Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	99,6	87,25	87,39
		Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	27	7,41	364,37
			Rata-Rata Capaian Kinerja			184,32
9.	Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi mantap	%	64,70	68,7	106,1
		Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	53	64,43	116,71
			Rata-Rata Capaian Kinerja			111,40
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN						139,44

Tabel 3.6  
Pengkategorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran  
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian (%)	0 s/d <55	55 s/d <70	70 s/d <85	85 s/d <100	≥100
1	Meningkatnya peran sektor unggulan daerah berbasis kluster terhadap perekonomian daerah	3	<b>140,64</b>					MT
2	Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan Wirausahawan Lokal baru	2	<b>297,65</b>					MT

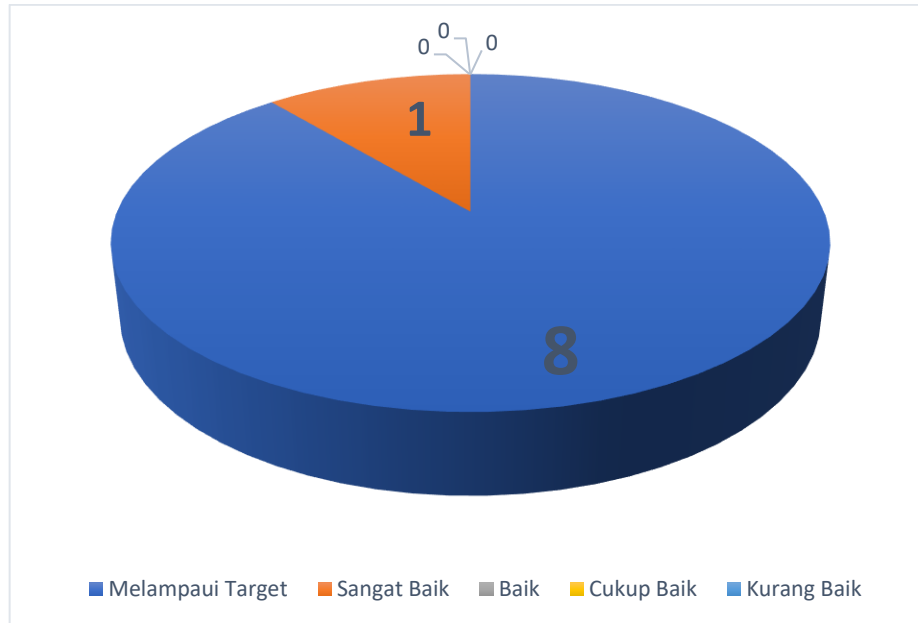


3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat Kutai Barat	1	<b>112</b>					MT
4	Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup	3	<b>96,1</b>				SB	
5	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	2	<b>102,97</b>					MT
6	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1	<b>100,05</b>					MT
7	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah	6	<b>109,88</b>					MT
8	Meningkatnya dan meratanya kualitas Infrastruktur dasar	3	<b>184,32</b>					MT
9	Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan	2	<b>111,40</b>					MT
	<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>139,44</b>				<b>1</b>	<b>8</b>

Berdasarkan kedua table diatas, maka kinerja capaian Sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Capaian Kinerja  $\geq 100$  % Kategori “Melapau Target” sebanyak 8 Sasaran, atau 88,89 %
- Capaian Kinerja 85 s/d  $< 100$  Kategori “Sangat Baik” sebanyak 1 Sasaran, atau 11,11 %
- Capaian Kinerja 70 s/d  $< 85$  Kategori “Baik” sebanyak 1 Sasaran, atau 0 %
- Capaian Kinerja 55 s/d  $< 70$  Kategori “Cukup Baik” sebanyak 0 Sasaran, atau 0 %
- Capaian Kinerja 0 s/d  $< 55$  Kategori “Kurang Baik” sebanyak 0 Sasaran, atau 0 %

Grafik 3.2  
Pengkategorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran  
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023



### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat setelah Perubahan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 dengan total belanja sebesar **Rp 4.510.943.671.026,00** sedangkan **realisasi anggaran mencapai Rp 3.306.625.833.450,43** atau dengan serapan dana APBD mencapai **73,30%**.

Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2023, komposisi belanja APBD Kabupaten Kutai Barat, sebagai berikut:



Tabel 3.7  
Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat  
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Operasi	2.526.504.326.629,00	1.816.676.292.964,67	71,90
2	Belanja Modal	1.399.783.821.461,00	1.012.317.513.126,76	72,32
3	Belanja Tidak Terduga	120.000.000.000,00	12.976.534.423,00	10,81
4	Belanja Transfer	464.655.522.936,00	464.655.522.936,00	100
Jumlah		4.510.943.671.026,00	3.306.625.833.450,43	73,30

Sumber : BKAD Kab. Kutai Barat

Jika dilihat dari komposisinya, Belanja Transfer memberikan kontribusi sebesar 100%, Belanja Modal Sebesar 72,32%, Belanja Operasi Sebesar 71,90%, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 10,81%.

Adapun Anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Barat yang diperjanjikan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp **2.173.635.793.607,-** dan Realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis pemerintah Kabupaten Kutai Barat 2023 adalah sebesar **1.586.265.623.411,62** atau **75,56%**, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.8  
Anggaran Dan Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja  
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 2023

	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas terhadap PDRB	80.492.699.451,00	74.719.010.365,00	92,83
2	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	22.250.674.104,00	19.055.682.309,00	85,64
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	21.231.076.438,00	10.391.074.740,00	48,94



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023**



4	Tingkat Pengangguran terbuka	2.746.816.056,00	2.575.165.261,00	93,75
5	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	10.492.699.451,00	10.029.127.313,00	95,58
6	PDRB Perkapita	2.233.469.021,00	2.083.040.870,00	93,26
7	Indeks Kualitas Air	33.908.170.657	21.620.182.276,00	63,76
8	Indeks Kualitas Udara			
9	Indeks Kualitas Lahan			
10	Harapan Lama Sekolah	175.815.396.191	146.672.575.096,04	83,42
11	Rata-Rata Lama Sekolah			
12	Usia Harapan Hidup	146.697.735.132	114.078.854.885,34	77,76
13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	7.003.431.980	6.772.924.515,00	96,71
14	Opini BPK	890.122.365.556	516.139.842.206,00	57,99
15	Nilai LPPD	3.473.148.890	2.862.762.600,00	82,43
16	Persentase Desa Mandiri	6.787.238.300	6.704.819.879,00	98,79
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	2.208.376.860	2.070.912.138,00	93,78
18	Nilai SAKIP			
19	Persentase penduduk berakses air minum	55.233.363.900	47.439.767.502,00	85,89
20	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	37.881.010.626	35.513.097.183,00	93,75
21	Persentase rumah tangga pengguna listrik	1.976.398.000	1.842.445.671,00	93,22
22	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	667.321.592.715	617.096.490.289,00	92,47
23	Cakupan Layanan Telekomunikasi	5.760.130.279	4.686.123.793,00	81,35
<b>Jumlah</b>		<b>2.173.635.793.607</b>	<b>1.642.353.898.891,38</b>	<b>75,56</b>

Dari table diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja sasaran, yang diperjanjikan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2023.



Kondisi efektivitas anggaran belanja pada suatu Organisasi tidak selamanya mengalami peningkatan, sewaktu-waktu mengalami penurunan. Tingkat Efektivitas dapat dilihat dari apakah suatu program telah tercapai dari rencana yang ditetapkan. Semakin besar *output* yang dihasilkan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Supaya anggaran belanja menjadi efektif, maka diperlukan koordinasi dan kerjasama antar bidang-bidang yang bersangkutan dalam rangka pencapaian suatu program. Selain itu, diperlukan adanya pengawasan yang lebih baik dalam penyusunan anggaran belanja, supaya target atau rencana anggaran program yang akan digunakan dapat direalisasikan dengan maksimal. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.9**  
**Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran**  
**Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023**

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran	Anggaran		Tingkat Efektifitas
				Realisasi (Rp)	%	
A. Misi 1						
1	Meningkatnya peran sektor unggulan daerah berbasis kluster terhadap perekonomian daerah	3	140,64	104.165.767.414,00	84,02	167,39
2	Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan Wirausahawan Lokal baru	2	297,65	12.604.292.574,00	95,20	312,66
3	Meningkatnya standar hidup layak	1	112	2.083.040.870,00	93,26	120,09



	masyarakat Kutai Barat					
4	Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup	3	96,1	21.620.182.276,00	63,76	150,72
B. Misi 2						
5	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	2	102,97	146.672.575.096,04	83,42	123,44
6	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1	100,05	114.078.854.885,34	77,76	128,66
C. Misi 3						
7	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah	6	109,88	534.551.261.338,00	57,77	190,20
D. Misi 4						
8	Meningkatnya dan meratanya kualitas Infrastruktur dasar	3	184,32	84.795.310.356,00	89,17	206,71
9	Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan	2	111,40	621.782.614.082,00	92,38	120,59

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan semakin besar persentase capaian kinerja sasaran dibandingkan dengan persentase serapan anggaran maka dapat dipastikan semakin tinggi tingkat efektifitasnya.



## SASARAN 1

### MENINGKATNYA PERAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH TERHADAP PEREKONOMIAN (PDRB)

#### Capaian Kinerja Sasaran

Capaian Strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi Pertama yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Barat Periode 2021-2026 yaitu “Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis Kawasan berdasarkan potensi unggulan local secara berkelanjutan”.

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 1 menggunakan 3 indikator kinerja yaitu Kontribusi sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB, Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB, Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB dengan tingkat keberhasilan **140,64 %** dengan kategori **”MELAMPAUI TARGET (MT)”**. Pencapaian target kinerja sasaran **Meningkatnya Peran dari Sektor Unggulan daerah terhadap perekonomian daerah (PDRB)** dapat dilihat pada tabel diawah:

Tabel 3.10  
Capaian Kinerja Meningkatnya Peran Sektor Unggulan Daerah Terhadap Perekonomian (PDRB) Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Kontribusi Sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB	15,36	13,98	91,02	Tidak Tercapai
2	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	0,55	1,38	250,91	Melebihi Target
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	0,4	0,32	80	Tidak Tercapai
Rata-rata Capaian Kinerja				140,64	Melampaui Target

Tabel 3.11  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
1	Kontribusi Sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB	14,97	12,27	13,98
2	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	1,43	1,14	1,38
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	0,31	0,25	0,32

Tabel 3.12  
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Capaian Kinerja	%	
		2023	2026	2023	2023	2026
1	Kontribusi Sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB	15,36	15,85	13,98	91,02	88,20
2	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	0,55	0,675	1,38	250,91	204,44
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	0,4	0,55	0,32	80	58,18

Adapun pencapaian Sasaran pada indikator kinerja dapat dijelaskan melalui analisis sebagai berikut:



## **1. Kontribusi Sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB**

### **a. Perbandingan Capaian Indikator Setiap Tahunnya**

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Berdasarkan indikator ini kita akan memperoleh gambaran tingkat pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kemakmuran masyarakat suatu wilayah.

Keadaan ekonomi suatu daerah dapat terlihat dari PDRB daerah tersebut. PDRB dapat mencerminkan kondisi dan pencapaian aktivitas atau kinerja perekonomian daerah. Informasi ini sangat dibutuhkan guna mendukung setiap kebijakan yang akan diambil oleh para decision maker (pengambil keputusan), mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan disuatu daerah. Penyusunan PDRB suatu daerah merupakan salah satu upaya daerah tersebut dalam memberikan informasi yang jelas tentang gambaran pembangunan ekonomi, situasi, kondisi dan potensi suatu daerah sehingga memudahkan pemerintah maupun pihak swasta dalam menentukan pembangunan di daerah tersebut. Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi disuatu daerah. Paling tidak terdapat lima hal yang didapat dari sektor pertanian, diantaranya :

Berperan secara langsung dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat;

- a. Berperan dalam pembentukan pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- b. Menyerap tenaga kerja dipedesaan;
- c. Berperan dalam penghasilan devisa dan penghematan devisa;
- d. Berperan dalam pengendalian inflasi.

Dengan demikian sektor pertanian secara tidak langsung berperan dalam menciptakan iklim yang konsumtif bagi pembangunan sektor ekonomi lainnya.



Sektor pertanian salah satu penyediaan pangan masyarakat, oleh karena itu percepatan pembangunan pertanian berperan penting dalam penyediaan pangan yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat. Walaupun dalam kontribusinya dalam PDRB Kabupaten Kutai Barat terkadang mengalami penurunan, namun sektor pertanian masih akan tetap memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian secara keseluruhan, karena mempunyai keterkaitan yang luas dengan sektor ekonomi lainnya. Peranan sektor pertanian bukan saja terhadap ketahanan pangan, tetapi juga memberikan andil yang cukup besar terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat dan pemberantasan kemiskinan, sumber pendapatan, serta perekonomian Regional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hasil pendapatan di sektor pertanian dapat di ukur dari nilai PDRB yang dihasilkan sektor tersebut. Berikut data perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Kutai Barat selama tahun 2019 - 2023 menurut Lapangan Usaha.

Tabel 3.13

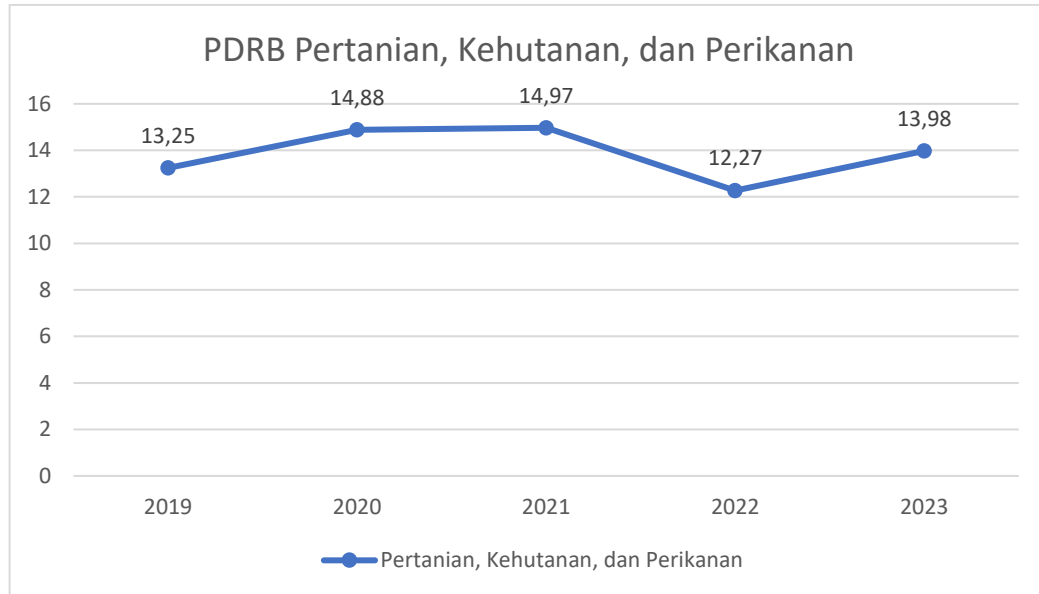
Persentase Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,25	14,88	14,97	12,27	13,98

Sumber : BPS Kutai Barat

Grafik 3.3

Persentase Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat Persentase Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Barat Sektor Pertanian tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahu sebelumnya. Dan bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur Persentase Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Barat Sektor Pertanian lebih tinggi, hal tersebut dapat dilihat pada table dibawah:

Tabel 3.14

Perbandingan Persentase Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Barat dengan Provinsi Kalimantan Timur

No	PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	
1	Kutai Barat	13,98
2	Prov. Kalimantan Timur	8,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Kutai Barat



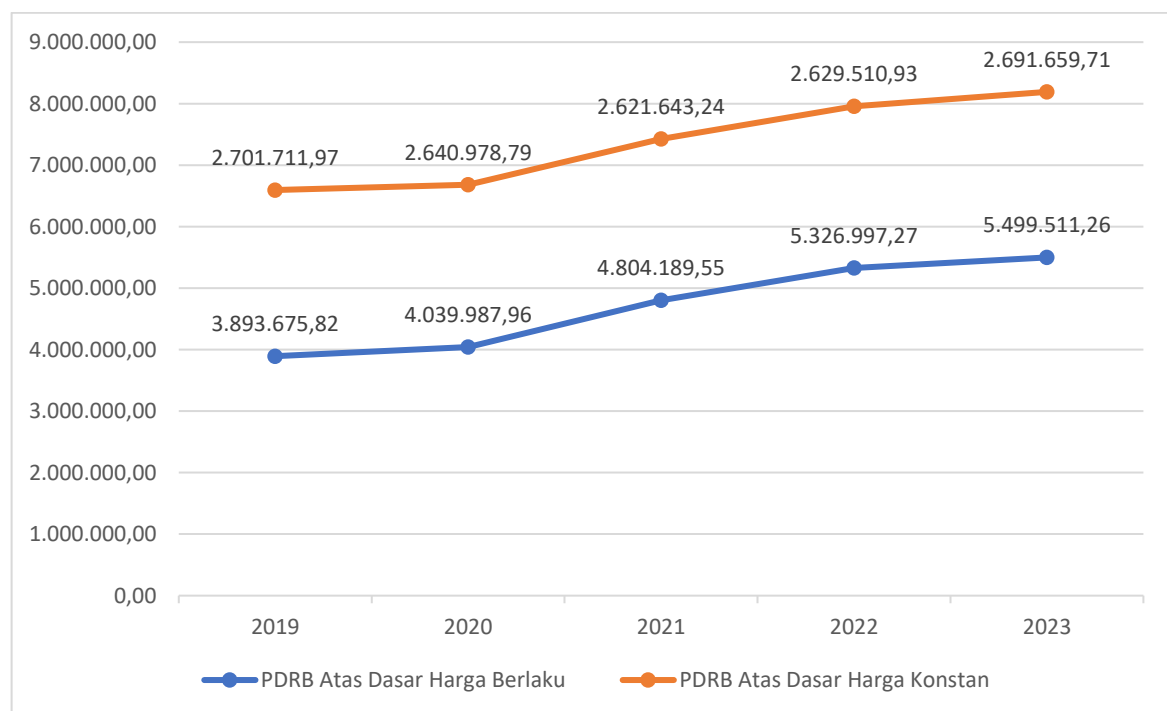
Berikut Nilai PDRB Atas Dasar Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dapat dilihat pada table dan grafik dibawah:

**Tabel 3.15**  
**Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023 (Juta Rupiah)**

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2019	2020	2021	2022	2023
Dasar Harga Berlaku	3.893.675,82	4.039.987,96	4.804.189,55	5.326.997,27	5.499.511,26
Dasar Harga Konstan	2.701.711,97	2.640.978,79	2.621.643,24	2.629.510,93	2.691.659,71

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kutai Barat*

**Grafik 3.4**  
**Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023 (Juta Rupiah)**



Tabel 3.16  
Perbandingan Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan  
Usaha Kabupaten Kutai Barat dengan Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2023

No	PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	
1	Kutai Barat	5.499.511,26
2	Prov. Kalimantan Timur	67.688.255,74

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kutai Barat*

**b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian  
Indikator**

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator  
yaitu :

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Penyuluhan Pertanian

Pada Tahun 2023 fokus Kegiatan yang dilakukan dalam  
ketercapaian Indikator yaitu : pembukaan, peningkatan dan  
pemeliharaan jalan usaha tani. Bantuan alat mesin pertanian  
Prapanen dan Pasca Panen berupa handtracktor, Powertracer,  
handsprayer, coper, mixer, dan kendaraan roda tiga.

Indikator Sektor Peternakan bantuan bibit ternak berhasil  
didistribusikan kepada 4 (empat) kelompok tani Di 2 kecamatan  
yaitu kecamatan Barong Tongkok dan Kecamatan Nyuatan.

Pembangunan Miniranche merupakan Inovasi disektor Peternakan  
yang dianggap mendukung ketercapaian Indikator dan mendapat  
penghargaan pola Pemeliharaan secara intensif ditingkat Provinsi  
tahun 2022.



Tabel 3.17  
Jumlah Cakupan Penyediaan Sarana Pertanian Tahun 2023

No	Cakupan Penyediaan Sarana Pertanian	Target	Realisasi	Capaian %
1	Alat Mesin Pertanian (Unit)	13	64	492,30
2	Benih Padi (Kg)	20.000	17.500	87,5
3	Benih Jagung (Kg)	10.000	3.235	32,35
4	Bibit Tanaman Buah-Buahan (Bibit)	3.500	4.208	120,22
5	Pupuk Tanaman Pangan (Kg)	100.000	26.217	26,22
6	Bibit Karet (Bibit)	80.000	7.315	9,14
7	Bibit Kakao (Bibit)	60.000	2.225	3,71
8	Bibit Lada (Bibit)	150.000	1.100	0,73
9	Pupuk Tanaman Perkebunan (Kg)	12.000	187.188	1559,9
10	Pembeku Lateks (Liter)	5.000	2.500	50
11	Bibit Babi (ekor)	350	568	162,28
12	Bibit Unggas (ekor)	1500	9.200	613,33
13	Bibit Hijauan Makan Ternak	250.000	68.000	27,2
14	Bibit Sapi	250	310	124
15	Bibit Kerbau	50	10	20
16	Bibit Kambing	200	109	54,5

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat



**Tabel 3.18**  
**Jumlah Cakupan Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**  
**Tahun 2023**

No	Cakupan Penyediaan Prasarana Pertanian	Target	Realisasi
1	Dokumen Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B	1	1
2	Jalan Usaha Tani Tanaman Pangan (Meter)	2.300	10.289
3	Jalan Usaha Tani Perkebunan (Meter)	5.100	44.290
4	Cetak Sawah (Ha)	66	30
5	Optimalisasi Lahan Sawah (Ha)	113	10
6	Pembangunan Rehabilitasi BPP (Unit)	1	4
7	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum (Ha)	10	-

*Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat*

**Tabel 3.19**  
**Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner**

No	Indikator	Target	Realisasi
1	Jumlah pelayanan Kesehatan hewan (ekor)	4485	13323
2	Jumlah penilaian resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan (kali)	38	28
3	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan (Kecamatan)	10	5

*Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat*

**Tabel 3.20**  
**Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian**

No	Indikator	Target	realisasi
1	Jumlah pengendalian dan penanggulangan OPT Pertanian (Lokasi)	27	11

*Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat*

Tabel 3.21  
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

No	Indikator	Target	realisasi
1	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Lapangan (Kali)	8.520	8.831

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solisi yang telah dilakukan**

Adapun yang menjadi Faktor Penghambat terkait Kontribusi sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB yaitu :

- Pola distribusi Bibit ternak pada awalnya dilakukan belum secara berkelompok;
- Kelompok penerima bantuan belum memahami secara optimal mengenai tekhnik budidaya ternak secara modern.

Adapun Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu:

- Melakukan pendataan lebih intensif dalam pendistribusian Bibit ternak agar lebih tepat guna;
- Meningkatkan penyuluhan kepada Kelompok penerima bantuan mengenai tekhnik budidaya ternak.

**2. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB**

**a. Perbandingan Capaian Indikator Setiap Tahunnya**

Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian daerah dalam periode tertentu. Salah satu sektor PDRB adalah Pertanian dalam arti luas yang didalamnya terdapat sektor Kelautan dan Perikanan. Dengan semakin banyak jumlah produksi perikanan baik yang diperoleh dari hasil budi daya maupun dari hasil perikanan diperairan umum yang ada di kawasan Kabupaten Kutai Barat serta adanya investasi di bidang Perikanan akan memberikan dampak

yang positif terhadap PDRB di Kabupaten Kutai Barat terutama dari sektor-sektor perikanan itu sendiri.

Kedua sektor itu merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor perikanan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Tiap tahunnya sektor perikanan memberikan kontribusi positif terhadap PDRB Kabupaten Kutai Barat dimana tiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang cukup baik tentu ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian di Kabupaten Kutai barat.

Tabel 3.22

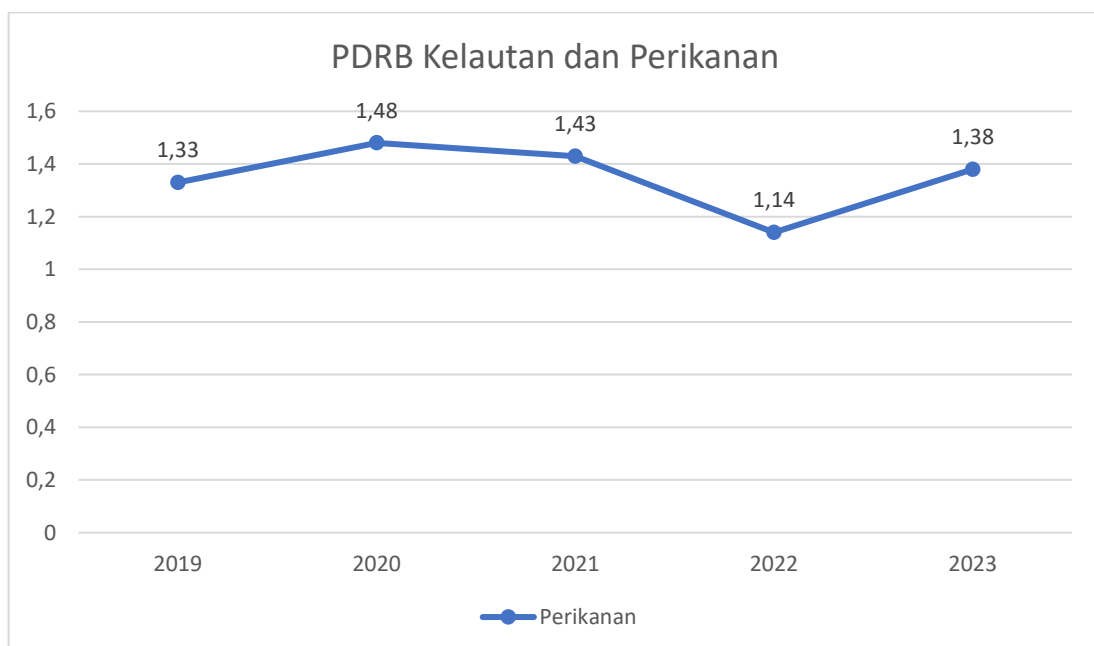
Persentase Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
Kelautan dan Perikanan	1,33	1,48	1,43	1,14	1,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Kutai Barat

Grafik 3.5

Persentase Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023





**b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator**

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang ketercapaian Indikator yaitu :

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pada Tahun 2023 fokus kegiatan yang dilakukan untuk mendukung ketercapaian pada Produksi Perikanan Tangkap yaitu dengan adanya kegiatan prasarana usaha perikanan tangkap dari target 762 unit terealisasi 1363 unit berupa mesin ketinting, perahu, dan alat tangkap yang ditujukan pada kelompok nelayan berjumlah 34 Kelompok Nelayan pada 15 Kecamatan. Serta pemberian bantuan sarana dan prasarana pengolah hasil perikanan kepada 10 Kelompok Pengolah Hasil Perikanan pada 6 Kecamatan yang berada di Kabupaten Kutai Barat.

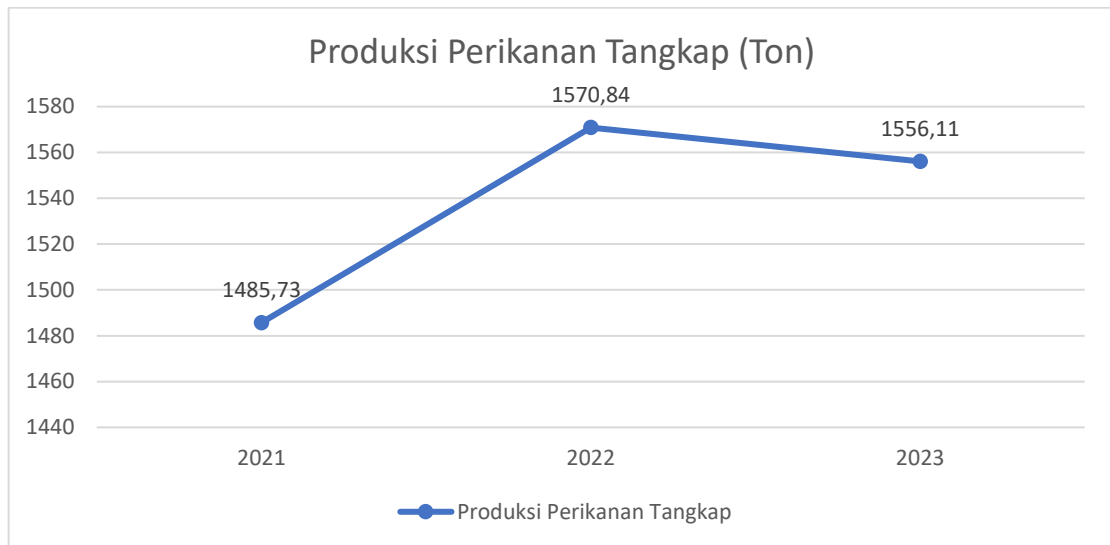
Tabel 3.23

Produksi Perikanan Tangkap menurut Kecamatan Tahun 2021-2023

No	Kecamatan	Jumlah		
		2021	2022	2023
1	Bongan	6,67	9,67	11
2	Jempang	362,92	366,02	290
3	Penyinggahan	283,28	311,28	238,27
4	Muara Pahu	243,94	245,94	270,17
5	Siluq Ngurai	13,44	13,44	10
6	Muara Lawa	22,84	22,84	95
7	Bentian Besar	7,7	8,7	10,99
8	Damai	65,01	66,01	93,19
9	Nyuatan	9,53	12,53	93,71
10	Barong Tongkok	18,2	18,2	10,7
11	Linggang Bigung	3,78	4,78	7,33
12	Melak	68,23	90,23	101,57
13	Sekolaq Darat	6,89	7,9	9,95
14	Mook Manaar Bulatn	179,38	177,38	124,23
15	Long Iram	85,57	87,57	90
16	Tering	108,35	128,35	100
Jumlah Total		<b>1485,73</b>	<b>1570,84</b>	<b>1556,11</b>

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat

Grafik 3.6  
Produksi Perikanan Tangkap menurut Kecamatan Tahun 2021-2023



Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas dapat dilihat Produksi Perikanan Tangkap tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 14,73 Ton dari tahun 2022.

Adapun Faktor yang mempengaruhi Penurunan Produksi Perikanan Tangkap Yaitu:

1. Illegal Fishing dengan metode racun, setrum, dan jaring dibawah standar yang ditentukan oleh Perundang-undangan yang mengakibatkan penurunan produksi perikanan tangkap;
2. Kurangnya Tingkat kesadaran Masyarakat terkait penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan;
3. pengawasan perairan perikanan tangkap masih dibawah kewenangan Provinsi;
4. Berkurangnya jumlah Rumah tangga perikanan tangkap yang dikarenakan alih usaha.
5. Terjadinya Over Fishing yang disebabkan berkurangnya daerah tangkapan.



Adapun Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu:

1. Restocking jenis ikan endemik/lokal (Jelawat, Baung, Patin, Biawan, Papuyu, Gabus);
2. Sosialisasi Undang-Undang Perikanan tentang Illegal Fishing;
3. Menambah Kawasan reservat di Kecamatan Penyinggahan, Muara Pahu, Mook Manaar Bulatn, dan Jempang;
4. Meningkatkan kinerja Kelompok pengawas perikanan.

**b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Pada Tahun 2023 Aktivitas yang mendukung ketercapaian Produksi Perikanan Budidaya Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil dan pengelolaan pembudidaya ikan, bantuan distribusi sarana dan prasarana usaha perikanan budidaya berupa Keramba Jaring Apung, Kolam Terpal, Bibit Ikan, Pakan Ikan dan Obat-Obatan, serta pelatihan atau pembinaan pelaku usaha perikanan budidaya.

**Tabel 3.24**  
**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya menurut Kecamatan**  
**Tahun 2021-2023 (Ton)**

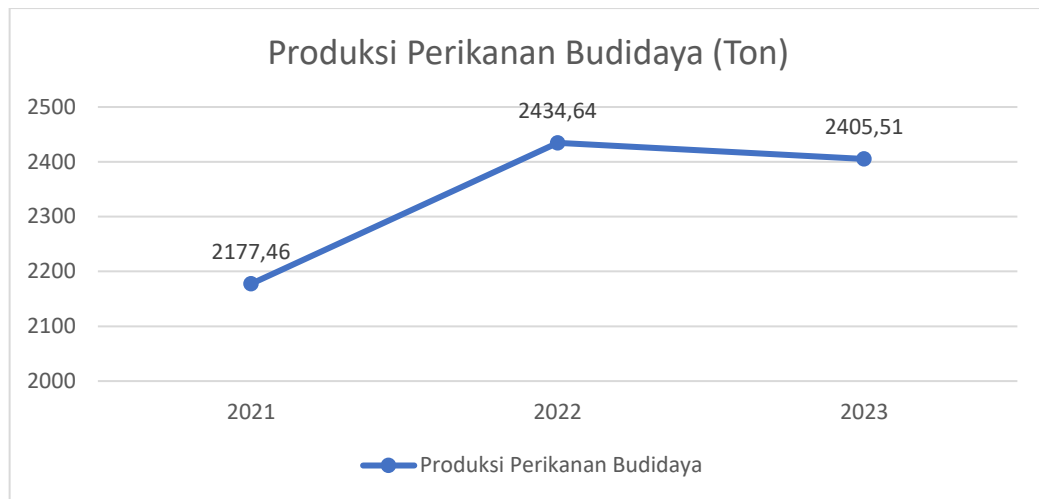
No	Kecamatan	Jumlah		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Melak	133	239,82	247,24
2	Barong Tongkok	56,93	43,54	96,31
3	Linggang Bigung	63,13	49,19	67,13
4	Damai	46,74	44,03	67,87
5	Muara Lawa	37,69	36,59	41,12
6	Long Iram	80,27	176,19	63,32
7	Mook Manaar Bulatn	218,51	251,67	181,30
8	Sekolaq Darat	33,75	52,04	52,32
9	Nyuatan	26,87	30,86	40,77
10	Tering	299,73	360,06	312,31
11	Muara Pahu	398,33	432,66	448,67
12	Penyinggahan	402,8	424,21	424,85
13	Jempang	345,58	286,82	335,86
14	Bongan	19,85	3,60	14,33
15	Bentian Besar	4,53	0,97	3,51



16	Siluq Ngurai	9,75	2,4	8,61
Jumlah Total		<b>2.177,46</b>	<b>2.434,64</b>	<b>2.405,51</b>

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat

Grafik 3.7  
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya menurut Kecamatan  
Tahun 2021-2023 (Ton)



Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas dapat dilihat Produksi Perikanan Budidaya tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 29,13 Ton dari tahun 2022.

Adapun Faktor yang mempengaruhi Penurunan Produksi Perikanan Budidaya Yaitu:

1. Kurangnya ketersediaan benih ikan sehingga harus mendatangkan benih dari luar Kutai Barat;
2. Masih rendahnya produksi benih oleh Balai Benih Ikan dan Unit Pembenihan Rakyat
3. Tingginya harga pakan ikan dipasaran
4. Tingginya kematian Ikan disebabkan oleh perubahan musim sehingga kualitas air (Ph, Tingkat kekeruhan, suhu, kandungan oksigen) tidak normal;
5. Kurangnya Aktivitas di budidaya ikan selama musim kemarau



6. Masih rendahnya penerapan Cara Budidaya Ikan Baik, Cara Pembenihan Ikan Baik dan Cara Pengelolaan Pakan Ikan.

Adapun Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu:

1. Meningkatkan Produksi benih ikan oleh UPR dan BBI terutama jenis ikan local;
2. Melakukan Subsidi Pakan Ikan;
3. Melakukan pelatihan pembuatan pakan mandiri;
4. Memberikan pelatihan dan edukasi penanganan hama penyakit ikan.
5. Memberikan pelatihan Cara Budidaya Ikan Baik, Cara Pembenihan Ikan Baik dan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang baik;
6. Pemberian bantuan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan budidaya.

### **3. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB**

#### **a. Perbandingan Capaian Indikator Setiap Tahunnya**

Potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Kutai Barat sangatlah banyak antara lain: wisata alam, budaya, religi dan minat khusus seperti wisata agro. Pesona pariwisata yang dimiliki Kutai Barat membuat banyak wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara berkunjung menikmati keindahan pariwisata di Kutai Barat. Sektor pariwisata merupakan sektor yang dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah, termasuk di Kutai Barat. Pariwisata Kutai Barat sudah dikenal oleh wisatawan di beberapa daerah Kabupaten/Kota khususnya untuk di wilayah Kalimantan Timur. Pariwisata dapat menjadi industri andalan untuk daerah yang tidak memiliki sumber daya alam migas, hasil hutan dan industri manufaktur.

Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) mencerminkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah yang disebabkan berbagai

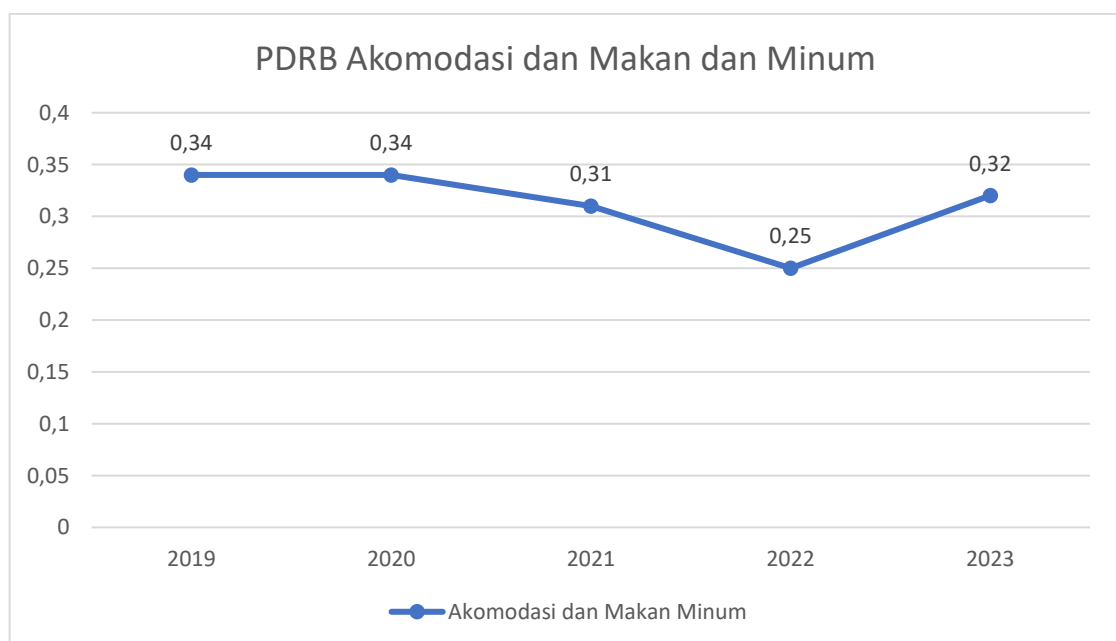
sektor Salah satunya sektor Pariwisata, khususnya di Kutai Barat. Kontribusi sektor pariwisata yang dilihat dari variabel investasi di bidang hotel, jumlah wisatawan asing dan lama mereka tinggal. Dari hasil analisis data time series selama 4 tahun dengan methode Ordinary Least Square (OLS) menunjukkan bahwa, sektor Pariwisata berdasarkan ketiga variabel tersebut mempunyai kontribusi positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kutai Barat secara bersama-sama (simultan).

Tabel 3.25  
Persentase Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,34	0,34	0,31	0,25	0,32

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kutai Barat*

Grafik 3.8  
Persentase Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023





Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat Persentase Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Barat Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2022 mengalami Penurunan sebesar 0,06% dari tahun 2021, untuk tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan berdasarkan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum menyumbang PDRB sebesar 110.588,49 Juta pada tahun 2022 yang mengalami kenaikan sebesar 12.292,04 Juta dari tahun 2021 sebesar 98.296,45 Juta dan untuk tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 126.941,05 Juta. Dan Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Barat lebih rendah bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, Hal tersebut dapat dilihat pada table dan grafik dibawah:

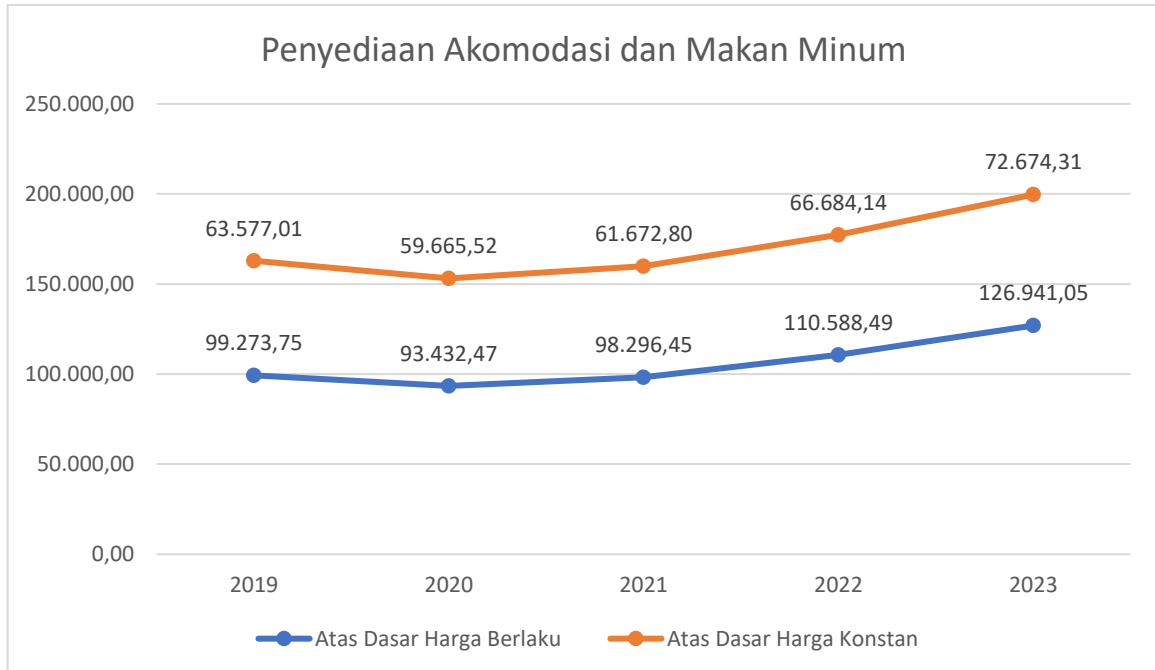
**Tabel 3.26**  
**Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023 (Juta Rupiah)**

Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	2019	2020	2021	2022	2023
Atas Dasar Harga Berlaku	99.273,75	93.432,47	98.296,45	110.588,49	126.941,05
Atas Dasar Harga Konstan	63.577,01	59.665,52	61.672,80	66.684,14	72.674,31

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kutai Barat*

Grafik 3.9

Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023 (Juta Rupiah)



Tabel 3.27

Perbandingan Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Barat dengan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	
1	Kutai Barat	126.941,05
2	Prov. Kalimantan Timur	8.372.540,91

Sumber : Badan Pusat Statistik

**b. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator**

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator yaitu :

- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Parwisata.
- Program Pemasaran Pariwisata.



- c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pada tahun 2023 fokus kegiatan yang dilakukan untuk mendukung secara langsung ketercapaian indikator dilakukan melalui aktivitas renovasi, pemeliharaan, dan penambahan sarana dan prasarana pada beberapa obyek wisata yang beretribusi. Pengayaan event dan festival di kecamatan dan kampung yang masuk dalam “*calendar of event*” Dinas Pariwisata (Seperti Festival Durian, Kelumpang, Sarut, Festival Tiga Danau, Festival Tanjung Isuy, Gemeoh, Festival Melapeh, Sendawar Festival, Dahau). Melakukan Promosi Wisata pada Event – event pameran Tingkat Provinsi dan Nasional. Inovasi dibidang Promosi akan dilakukan Optimal secara digital melalui Website [wisatakubarkab.go.id](http://wisatakubarkab.go.id).

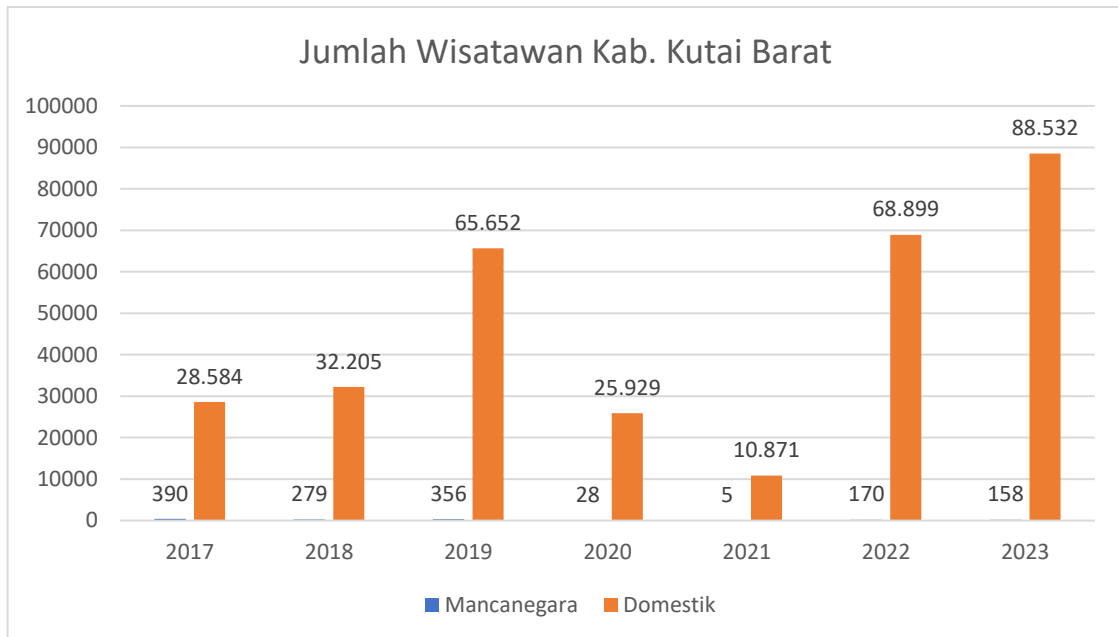
Inovasi pada bidang destinasi adalah melakukan optimalisasi kerjasama dengan pihak kampung mengenai pengelolaan obyek wisata yang berada di kampung untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Keberadaan Kelompok Sadar Wisata sangat mendukung secara signifikan peningkatan pengelolaan obyek wisata yang ada di Kabupaten Kutai Barat.

Tabel 3.28  
Jumlah Wisatawan Kabupaten Kutai Barat 2017-2023

Tahun	Wisatawan		
	Mancanegara	Domestik	Jumlah
2017	390	28.584	28.974
2018	279	32.205	32.484
2019	356	65.652	66.008
2020	28	25.929	25.957
2021	5	10.871	10.876
2022	170	68.899	69.069
2023	158	88.532	88.690

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat

Grafik 3.10  
Jumlah Wisatawan Kabupaten Kutai Barat 2017-2023



**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solisi yang telah dilakukan**

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut:

1. Situasi Pandemi COVID-19 yang masih belum pulih sepenuhnya, sehingga membatasi dan menghambat kegiatan untuk mencapai target kinerja seperti yang telah tertuang dalam perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Tahun 2023
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan pariwisata.
3. Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata belum memadai.
4. Masih terbatasnya upaya pembangunan sarana dan prasarana pendukung wisata di Kutai Barat.
5. Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.



6. Masih rendahnya investasi dan kerjasama dalam upaya pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kutai Barat.
7. Masih rendahnya kerjasama dalam upaya promosi dan pemasaran objek dan daya tarik wisata, baik di dalam maupun di luar negeri.
8. Objek wisata yang ada tersebar di beberapa wilayah kecamatan dan dalam klaim masyarakat secara individu, yang mana sebagian besar mereka yang mengaku sebagai pemilik tidak memiliki dokumen yang sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Strategi untuk memecahkan masalah dan kendala tersebut adalah:

1. Meningkatkan efektivitas peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan dan pemasaran kepariwisataan.
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat diarahkan pada upaya untuk mendorong kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan obyek wisata.
3. Untuk mengurai permasalahan kepemilikan lahan seperti itu, di perlukan koordinasi lintas sektoral guna merumuskan solusi legalitas objek wisata.
4. Pengembangan kemitraan pariwisata, baik antarpemerintah, maupun antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha wisata yang ada di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
5. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pembangunan kepariwisataan yang berorientasi kepada peningkatan ekonomi masyarakat.
6. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan memantapkan manajemen pembangunan bidang kepariwisataan.
7. Mewujudkan pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.



8. Mewujudkan pengembangan destinasi pariwisata yang berdaya saing dengan mengembangkan destinasi atau objek dan daya tarik wisata yang potensial di Kutai Barat.



## SASARAN 2

### TERCIPTANYA LAPANGAN KERJA BARU DAN WIRAUSAHAWAN LOKAL BARU

#### Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke Pertama yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu "Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan lokal secara berkelanjutan" dengan tujuan "Menurunkan Angka Kemiskinan".

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 2 menggunakan 2 indikator kinerja yaitu "Tingkat Pengangguran Terbuka" dan "Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil" dengan tingkat keberhasilan **297,56%** dengan kategori **"Melampaui Target (MT)"**. Pencapaian target kinerja sasaran **Terciptanya Lapangan Kerja baru dan wirausahawan lokal baru** seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 3.29  
Capaian Kinerja Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan  
Wirausahawan Lokal Baru Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,46	6,16	72,40	Tidak Tercapai
2	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	0,44	2,3	522,72	Melebihi Target
Rata-rata Capaian Kinerja				297,56	Melampaui Target

Tabel 3.30  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,14	4,62	6,16
2	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	0,87	0,44	2,3

Tabel 3.31  
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Capaian Kinerja	%	
		2023	2026	2023	2023	2026
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,46	4,02	6,16	72,40	65,26
2	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	0,44	0,44	2,3	522,72	522,72

Adapun pencapaian Sasaran pada indikator kinerja dapat dijelaskan melalui analisis sebagai berikut:

### **1. Tingkat Pengangguran Terbuka**

#### **a. Perbandingan Capaian Indikator Setiap Tahunnya**

Pengangguran merupakan keadaan seseorang belum mendapatkan pekerjaan dimana seseorang tersebut termasuk dalam angkatan kerja (Sukirno, 1994). Pengangguran terbuka merupakan salah satu jenis pengangguran dimana angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Konsep milik Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha,

mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka dapat diukur dengan presentase pengangguran terhadap angkatan kerja, hasil perhitungan tersebut dinamakan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Tabel 3.32  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Barat  
Tahun 2019 – 2023

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,08	4,97	5,14	4,62	6,16

Sumber : BPS Kutai Barat

Grafik 3.11  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Barat  
Tahun 2019 – 2023



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dan bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur Tingkat



Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Barat lebih tinggi, hal tersebut dapat dilihat pada table dibawah:

Tabel 3.33  
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se-Provinsi  
Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Tingkat Pengangguran Terbuka	
1	Kutai Barat	6,16
2	Paser	4,72
3	Kutai Kartanegara	4,05
4	Kutai Timur	5,93
5	Berau	4,95
6	Penajam Paser Utara	2,07
7	Mahakam Ulu	2,09
8	Balikpapan	6,09
9	Samarinda	5,92
10	Bontang	7,74
11	<b>Prov. Kalimantan Timur</b>	<b>5,31</b>

**b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator**

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator yaitu :

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja
- c. Program Hubungan Industrial

Pada tahun 2023 fokus kegiatan yang dilakukan untuk mendukung secara langsung adalah melakukan Monitoring, evaluasi dan Sosialisasi kepada Perusahaan dan tenaga kerja terkait peraturan ketenaga kerjaan. melakukan pelatihan mekanik alat berat bekerja sama dengan Perkumpulan Lembaga Pelatihan



Kerja (PLPK) yang dimana kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi (12 orang) masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi pasar kerja. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat. Yaitu pelatihan yang menyesuaikan dengan kondisi Masyarakat berdasarkan keinginan Masyarakat untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan.

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis wirausaha, pada tahun 2023 pelaksanaan pelatihan kewirausahaan pembuatan kue dilakukan kepada 50 wirausaha kue di 2 kecamatan, Kecamatan Melak dan Kecamatan Barong Tongkok.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solisi yang telah dilakukan:**

Adapun Faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu;

1. Masih Banyak Perusahaan yang belum menyampaikan info lowongan kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kutai Barat;
2. Masih banyak perusahaan yang belum melaporkan jumlah rekrutmen yang telah ditempatkan;
3. Belum ada pemetaan Rencana Tenaga Kerja Daerah;
4. Pengesahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan Peraturan Perusahaan (PP) yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkendala Perusahaan tidak menyampaikan Laporan, dari 251 perusahaan hanya 36 perusahaan (PKWT 28, PKB 1, PP 7) yang menyampaikan Laporan

Adapun Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan monitoring data rekrutmen yang telah ditempatkan;
2. Pelaksanaan bursa kerja;
3. Melakukan pemetaan Rencana Tenaga Kerja Daerah;



4. Perlu menerbitkan Instruksi Kepala Daerah mengenai kewajiban pihak perusahaan melakukan Wajib Laport Ketenagakerjaan.

## 2. Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil

### a. Perbandingan Capaian Indikator Setiap Tahunnya

Pengembangan pembangunan ekonomi yang berbasis partisipasi masyarakat luas sebagai pelaku usaha merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam pembangunan ekonomi saat ini. Pertumbuhan ekonomi di Kutai Barat didorong oleh beberapa sektor, salah satu sektor yang mempunyai peran sangat strategis adalah sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah atau UMKM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 35 menyebutkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria usaha dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) **disebut usaha mikro**. Kriteria usaha dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) **sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) disebut **usaha kecil****. Sedangkan Kriteria usaha dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling

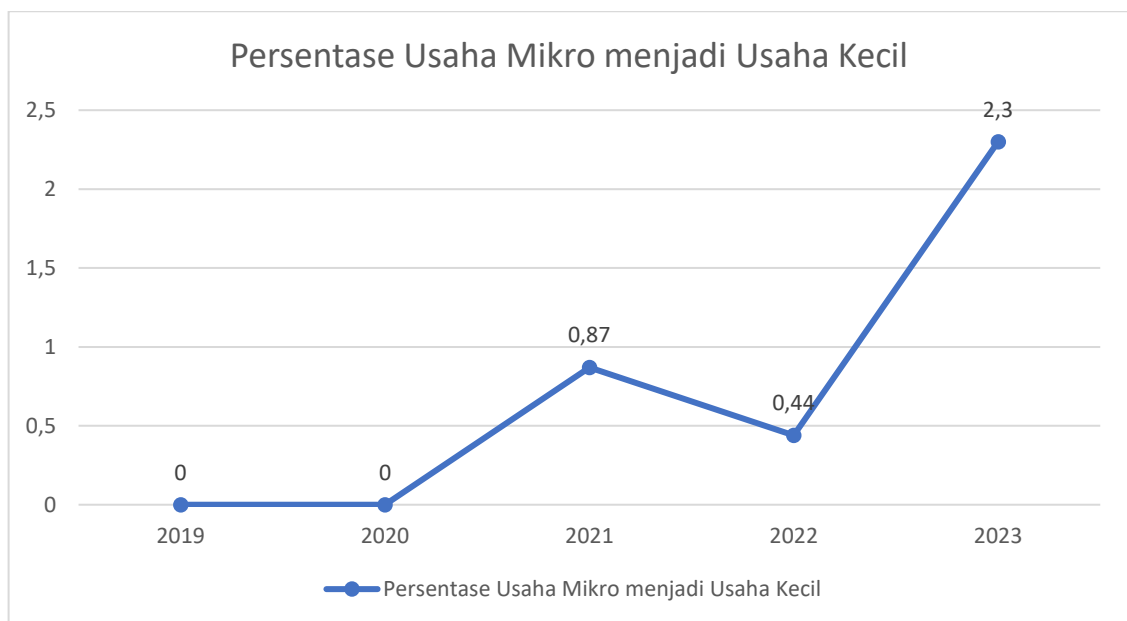
banyak Rp 15.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*) disebut ***usaha menengah***.

Tabel 3.34  
Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil  
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	n.a	n.a	0,87	0,44	2,3

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat

Grafik 3.12  
Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil  
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 mengalami Kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya.



**b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator**

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang ketercapaian Indikator yaitu :

- a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- b. Program Pengembangan UMKM

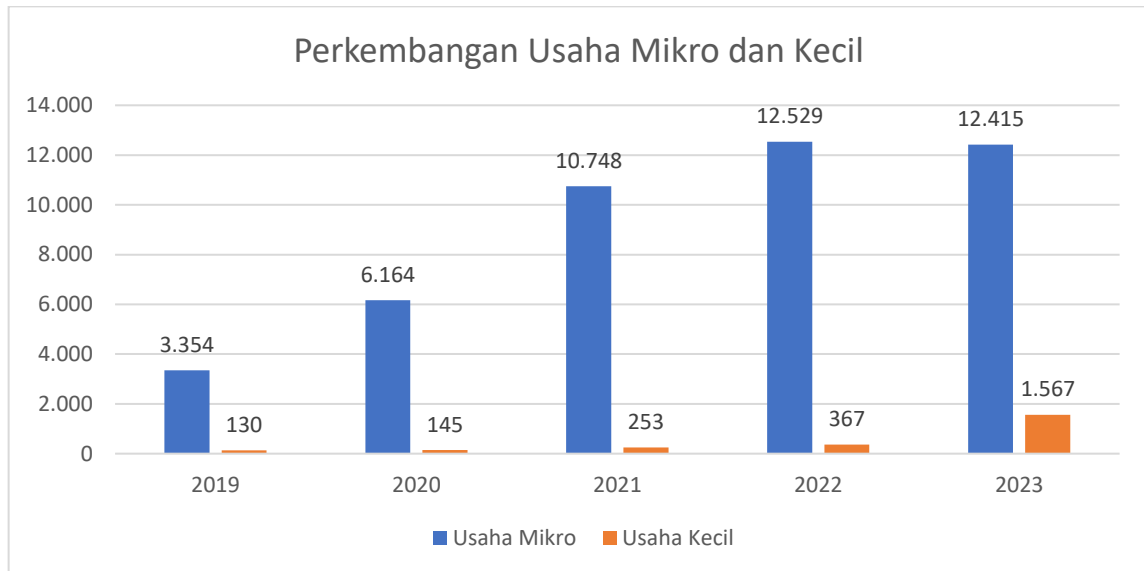
Pada Tahun 2023 fokus kegiatan yang dilakukan untuk ketercapaian indikator yaitu melakukan Pelatihan Menjahit ke 90 Pelaku usaha di 9 Kampung/desa pada 2 Kecamatan, Pelatihan Pangkas Rambut ke 60 pelaku usaha di 6 Kecamatan yang berada di Kab. Kutai Barat. Memberikan bantuan alat usaha ke 135 pelaku usaha berupa mesin jahit, mesin obrass, kompor mata seribu, kual, pisau, alat pemotong keripik, alat press kemasan, blender, mixer, alat pendingin makanan berupa frezer dan showcase, serta mesin oven.

Tabel 3.35  
Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil  
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023

Kriteria	2019	2020	2021	2022	2023
Usaha Mikro	3.354	6.164	10.748	12.529	12.415
Usaha Kecil	130	145	253	367	1.563

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat

Grafik 3.13  
Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil  
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023



**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solisi yang telah dilakukan**

Adapun faktor yang mempengaruhi ketercapaian indikator yaitu:

1. Meningkatnya kompetensi pelaku usaha dengan adanya pelatihan-pelatihan.
2. Adanya dukungan sarana dan prasarana bagi pelaku usaha
3. Meningkatnya minat dan kesadaran dari pelaku usaha untuk mengikuti pelatihan
4. Meningkatnya SDM yang berkualitas melalui kerjasama dengan para stakeholder.

Adapun Faktor Penghambat dalam ketercapaian Indikator yaitu:

1. Kurangnya sarana dan Prasarana alat transportasi perangkat daerah dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang berada di daerah yang sulit di jangkau;
2. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk berwirausaha dalam meningkatkan usahanya;
3. Masih kurangnya Kompetensi pelaku usaha dalam



- menggunakan peralatan yang modern;
4. Sulitnya akses pasar untuk memasarkan produk;
  5. Terbatasnya modal dan akses dari sumber dan lembaga keuangan. Keuangan inklusif perlu dimasukkan dalam program pengembangan lembaga keuangan. Penyertaan modal perlu disertai dengan pembimbingan sistem manajemen.
  6. Akses informasi usaha yang masih rendah.

Adapun Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu:

1. Pengadaan sarana dan prasarana alat transportasi untuk mendukung Upaya pendampingan pelaku usaha;
2. Melakukan sosialisasi peluang usaha;
3. Mengoptimalkan Penyediaan dana untuk menunjang tercapainya target kegiatan.
4. Perlu menjamin kemitraan yang baik yang saling menguntungkan antar pelaku UMKM, usaha besar, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau para stakeholder.
5. Melakukan pembinaan UMKM yang sifatnya berkesinambungan dan kompherensif.
6. Meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar;
7. Meningkatkan akses terhadap sumber-sumber modal dan memperkuat struktur modal;
8. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen;
9. Meningkatkan akses dan penguasaan teknologi.



### SASARAN 3

#### MENINGKATNYA STANDAR HIDUP LAYAK MASYARAKAT KUTAI BARAT

##### Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke Pertama yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu "Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat Kutai Barat" dengan tujuan "Menurunkan Angka Kemiskinan".

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 3 menggunakan 1 indikator kinerja yaitu "**PDRB Perkapita**" dengan tingkat keberhasilan **124,39%** dengan kategori "**Melampaui Target (MT)**". Pencapaian target kinerja sasaran Meningkatkan Standar Hidup Layak Masyarakat Kutai Barat seperti tampak pada tabel dibawah:

Tabel 3.36

Capaian Kinerja PDRB Perkapita Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Predikat
1	PDRB Perkapita	198,29	222,08	112	Melebihi Target
Rata-rata Capaian Kinerja				112	Melampaui Target

Tabel 3.37

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
1	PDRB Perkapita	184,46	246,65	222,08

Tabel 3.38  
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Capaian Kinerja	%	
		2023	2026	2023	2023	2026
1	PDRB Perkapita	198,29	213,87	222,08	112	103,84

Adapun pencapaian Sasaran pada indikator kinerja dapat dijelaskan melalui analisis sebagai berikut:

## **1. PDRB Perkapita**

### **a. Perbandingan Capaian Indikator Setiap Tahunnya**

Sebuah negara ataupun daerah pasti memiliki pendapatannya sendiri, biasanya berasal dari proses transaksi yang mereka lakukan di dalamnya. Hal tersebut bisa juga disebut indikator perekonomian. Indikator ekonomi ini bisa digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi yang memiliki tingkatan dari nasional hingga daerah.

Pada tingkat nasional indikator ini disebut Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara, untuk tingkat daerah seperti provinsi, kabupaten/kota bahkan kecamatan, hal itu dikenal dengan sebutan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Oleh karena perannya sebagai salah satu indikator utama dalam perekonomian, hal tersebut membuat PDRB ini secara otomatis memegang peranan penting. Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB bisa juga didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

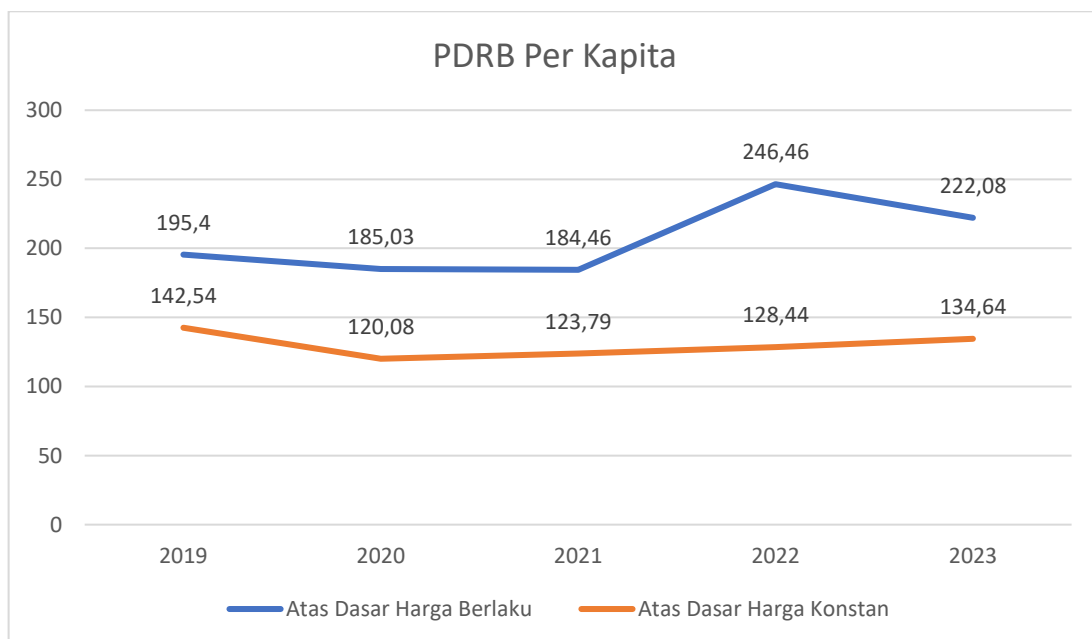
Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa dikatakan bahwa PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu, yang pada umumnya dalam waktu satu tahun.

**Tabel 3.39**  
**PDRB Perkapita Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023**

PDRB Perkapita	2019	2020	2021	2022	2023
Atas Dasar Harga Berlaku	195,4	158,03	184,46	246,65	222,08
Atas Dasar Harga Konstan	142,54	120,08	123,79	128,44	134,64

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

**Grafik 3.14**  
**PDRB Perkapita Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023**



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat PDRB Perkapita Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dan bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur PDRB Perkapita

Kabupaten Kutai Barat lebih tinggi, hal tersebut dapat dilihat pada table dibawah:

Tabel 3.40  
Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota  
se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	PDRB Per Kapita	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
1	<b>Kutai Barat</b>	<b>222,08</b>	<b>134,64</b>
2	Paser	208,43	131,97
3	Kutai Kartanegara	270,72	178,92
4	Kutai Timur	369,42	229,77
5	Berau	198,53	122,23
6	Penajam Paser Utara	87,26	48,84
7	Mahakam Ulu	100,94	54,87
8	Balikpapan	201,64	136,70
9	Samarinda	104,97	63,02
10	Bontang	366,46	229,40
11	<b>Prov. Kalimantan Timur</b>	<b>215,76</b>	<b>137,51</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Data pengeluaran dan konsumsi penduduk didapatkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Data berasal dari kuesioner Konsumsi dan Pengeluaran (Daftar VSEN2017. KP).

Mulai tahun 2015, pengumpulan data SUSENAS dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret untuk pengumpulan data KOR dan konsumsi/ pengeluaran rumah tangga. Serta pada bulan September untuk pengumpulan data



modul dan konsumsi/pengeluaran rumah tangga. Pelaksanaan SUSENAS Maret 2017 mencakup 300.000 rumah tangga yang tersebar di seluruh provinsi. Target sampel SUSENAS September adalah 75.000 rumah tangga.

Data konsumsi/pengeluaran di bagi menjadi dua kelompok yaitu makanan dan bukan makanan. Pada tahun 2017, jumlah komoditi yang disurvei sebanyak 112 komoditi yang terbagi dalam 14 kelompok. Pengumpulan data kelompok makanan meliputi banyaknya (kuantitas) komoditi yang dikonsumsi beserta nilai pengeluarannya. Sementara pengumpulan data pada sebagian besar kelompok bukan makanan hanya mencakup nilai pengeluaran barang yang dikonsumsi, kecuali beberapa jenis barang juga dikumpulkan kuantitasnya seperti listrik, air, gas dan BBM. Komoditi non makanan terbagi dalam 6 kelompok.

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Kutai Barat tahun 2022 adalah Rp 1.529.442,-. Jumlah ini terdiri dari makanan dan bukan makanan. Untuk makanan, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah sebesar Rp 783.613,- dan untuk bukan makanan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah sebesar Rp 810.810,-. Hal ini artinya lebih besar pengeluaran untuk non-makanan dari pada makanan. Ciri-ciri masyarakat yang sejahtera apabila pengeluaran untuk bukan makanan lebih besar daripada makanan, hal ini menandakan bahwa pemerintah di kabupaten Kutai Barat harus lebih bekerja keras untuk menuju masyarakat Kutai Barat yang sejahtera.

Diketahui bahwa untuk makanan, komoditas makanan dan minuman jadi yang paling besar dibandingkan dengan komoditas makanan jadi, yaitu sebesar Rp 216.974,-. Kemudian diikuti oleh komoditas Rokok sebesar Rp 112.526,- dan selanjutnya yang menempati posisi ketiga adalah komoditas Ikan/Udang/Cumi/Kerang sebesar Rp 97.644,-. Jika kita tinjau dari bukan makanan, diketahui bahwa komoditas perumahan dan



fasilitas rumah tangga adalah komoditas terbesar untuk kelompok bukan makanan, yaitu sebesar Rp 432.070,-. Kemudian diikuti oleh Komoditas Tahan Lama sebesar Rp 138.713,-

Tabel 3.41

Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah) Di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 - 2023

Kelompok Komoditas/Commodity Group	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan/Food				
Padi-padian	75 955	76 589	77 500	79.073
Umbi-umbian	4 320	4 892	4 040	7.856
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	85 207	93 073	97 644	94.130
Daging	48 227	43 750	54 432	39.350
Telur dan Susu	54 752	52 962	51 214	44.093
Sayur-sayuran	40 369	52 989	49 492	63.576
Kacang-kacangan	10 142	11 659	11 489	15.619
Buah-buahan	45 543	48 760	27 433	36.354
Minyak dan Kelapa	16 216	17 556	26 805	20.476
Bahan minuman	23 825	25 230	22 159	24.584
Bumbu-bumbuan	14 766	17 275	15 605	20.546
Konsumsi Lainnya	15 920	17 633	16 300	17.002
Makanan dan Minuman	189 366	227 403	216 974	232.061
Rokok	92 008	93 013	112 526	92.486
Jumlah Makanan/Total Food	<b>720 616</b>	<b>782 784</b>	<b>783 613</b>	<b>787.206</b>
Bukan Makanan/Non Food				
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	413 470	412 065	432 070	476.050
Aneka komoditas dan jasa	130 809	138 135	137 918	163.396
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	25 614	32 689	24 573	35.889
Komoditas tahan lama	136 433	104 652	138 713	99.321



Pajak, pungutan, dan asuransi	40 978	47 604	65 925	60.049
Keperluan pesta dan upacara	26 695	11 866	11 610	39.454
Jumlah bukan makanan/Total non-food	<b>774 000</b>	<b>747 011</b>	<b>810 810</b>	<b>874.158</b>
Jumlah/Total	<b>1 494 615</b>	<b>1 529 795</b>	<b>159 422</b>	<b>1.661.364</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 3.42  
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Persen) Di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 - 2023

Kelompok Komoditas/Commodity Group	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan/Food				
Padi-padian	5,35	5,01	4,86	4,76
Umbi-umbian	0,29	0,32	0,25	0,47
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	5,70	6,08	6,12	5,67
Daging	3,23	2,86	3,41	2,37
Telur dan Susu	3,66	3,46	3,21	2,65
Sayur-sayuran	2,70	3,46	3,10	3,83
Kacang-kacangan	0,68	0,76	0,72	0,94
Buah-buahan	3,05	3,19	1,72	2,19
Minyak dan Kelapa	1,08	1,15	1,68	1,23
Bahan minuman	1,59	1,65	1,39	1,48
Bumbu-bumbuan	0,99	1,33	0,98	1,24
Konsumsi Lainnya	1,07	1,15	1,02	1,02
Makanan dan Minuman	12,67	14,86	13,61	13,97
Rokok	6,16	6,08	7,06	5,57
Jumlah Makanan/Total Food	48,21	51,17	49,15	47,38
Bukan Makanan/Non Food				
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	27,66	26,94	27,10	28,65



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023**



Aneka komoditas dan jasa	8,75	9,03	8,65	9,84
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	1,71	2,14	1,54	2,16
Komoditas tahan lama	9,13	6,84	8,70	5,98
Pajak, pungutan, dan asuransi	2,74	3,11	4,13	3,61
Keperluan pesta dan upacara	1,79	0,78	0,73	2,37
Jumlah bukan makanan/Total non-food	51,79	48,83	50,85	52,62
Jumlah/Total	100,00	100,00	100,00	100,00

*Sumber: Badan Pusat Statistik*



#### SASARAN 4

#### TERJAGANYA KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN HIDUP

##### Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke Pertama yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan lokal secara berkelanjutan"** dengan tujuan **"Menjaga Keberlanjutan Kawasan dalam skema Pembangunan Hijau"**.

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 4 menggunakan 3 indikator kinerja yaitu : Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan dengan tingkat keberhasilan **96,1%** dengan kategori **"SANGAT BAIK (SB)"**. Pencapaian target kinerja sasaran **Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup** seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 3.43  
Capaian Kinerja Terjaganya Kelestarian dan  
Keberlanjutan Lingkungan Hidup Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Indeks Kualitas Air	62,3	53,08	85,20	Tidak Tercapai
2	Indeks Kualitas Udara	93,44	91,80	98,24	Tidak Tercapai
3	Indeks Kualitas Lahan	67,04	70,30	104,86	Melebihi Target
Rata-rata Capaian Kinerja				96,1	Sangat Baik

Tabel 3.44  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Air	60,00	62,31	53,08
2	Indeks Kualitas Udara	91,65	91,50	91,80
3	Indeks Kualitas Lahan	66,10	66,41	70,30

Tabel 3.45  
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Capaian Kinerja	%	
		2023	2026		2023	2026
1	Indeks Kualitas Air	62,3	62,6	53,08	85.20	84.79
2	Indeks Kualitas Udara	93,44	93,74	91,80	98.24	97,93
3	Indeks Kualitas Lahan	67,04	68,51	70,30	104,86	102,61

Adapun pencapaian Sasaran pada indikator kinerja dapat dijelaskan melalui analisis sebagai berikut:

## **1. Indeks Kualitas Air**

### **a. Perbandingan Capaian Indikator Setiap Tahunnya**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj).

Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

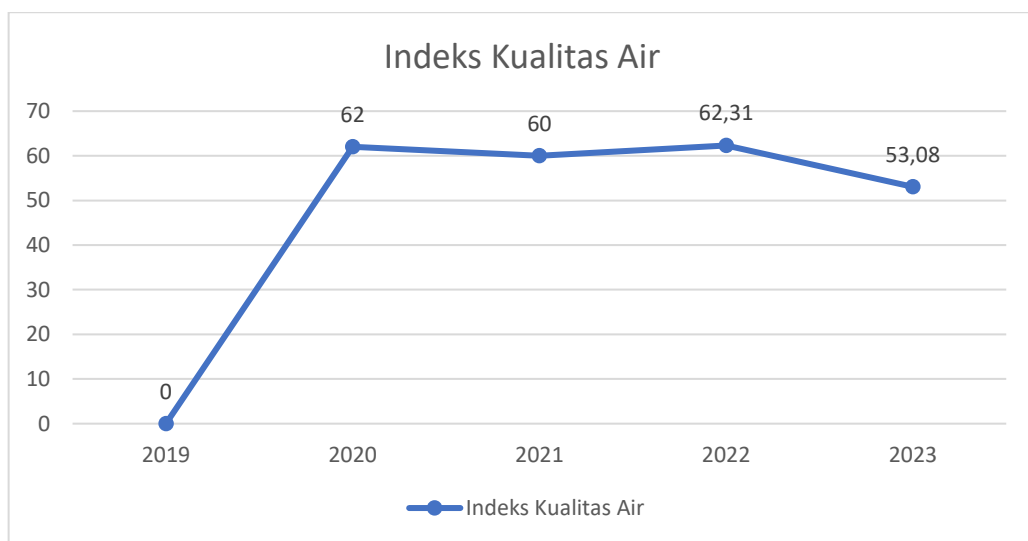
Tolak ukur sasaran meningkatnya Kualitas Air diukur dari indikator persentase peningkatan kualitas air yang dihitung berdasarkan rata-rata dikalikan seratus persen (menggunakan metode perhitungan indeks pencemaran air (%)).

Tabel 3.46  
Indeks Kualitas Air Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Air	n.a	62	60,00	62,31	53,08

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat

Grafik 3.15  
Indeks Kualitas Air Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat Indeks Kualitas Kutai Barat tahun 2023 mengalami Penurunan dari tahun 2022.

Adapun Perhitungan Indeks Pencemaran Air pada tahun 2023 pada 26 titik pantau:

26 Titik Pantau = Kriteria Memenuhi = 4 Titik

Kriteria Ringan = 22 Titik

4 Titik  $15,38\% \times 70 = 10,77$



$$22 \text{ Titik } 84,62\% \times 50 = 42,31$$

$$\text{Dengan Nilai Bobot } 10,77 + 42,31 = \mathbf{53,08 \text{ (IKA)}}$$

Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain:

- 1) Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air;
- 2) Ketersedian dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global;
- 3) Penggunaan air; dan
- 4) Serta tingkat erosi dan sedimentasi.

**b. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator**

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian

Indikator yaitu :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pada tahun 2023 fokus kegiatan yang dilakukan untuk ketercapaian Indikator yaitu melakukan pemantauan dan pengambilan sample secara periodik di 18 Titik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat, 2 Titik oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim, dan 6 Titik oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk Indikator IKA Kabupaten Kutai Barat masuk 5 besar dari 10 Kabupaten/Kota termasuk Kategori Sedang.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan:**

Adapun Faktor yang mempengaruhi Kegagalan yaitu;

1. Adanya eksploitasi sumber daya alam tanpa adanya pengelolaan lingkungan;
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran Masyarakat tentang



pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup;

Adapun Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan Sosialisasi dan pembinaan terhadap seluruh element Masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup;
2. Meningkatkan Pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelaku usaha.

## **2. Indeks Kualitas Udara**

### **a. Perbandingan Capaian Indikator Setiap Tahunnya**

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di dunia dan tidak terkecuali di Kabupataen kutai Barat. Kecenderungan penuru nan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia telah terlihat dalam beberapa dekade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya partikel (PM10, PM2.5) dan oksidan/ozon (O3) yang semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan meningkatkan pencemaran udara yang akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Penyusunan dan penghitungan indeks kualitas udara ditujukan :

1. Sebagai pelaporan kualitas udara yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang mudah dipahami kepada masyarakat tentang kondisi kualitas udara; dan
2. Sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kualitas udara yang tujuannya melindungi manusia dan ekosistem.

Tabel 3.47

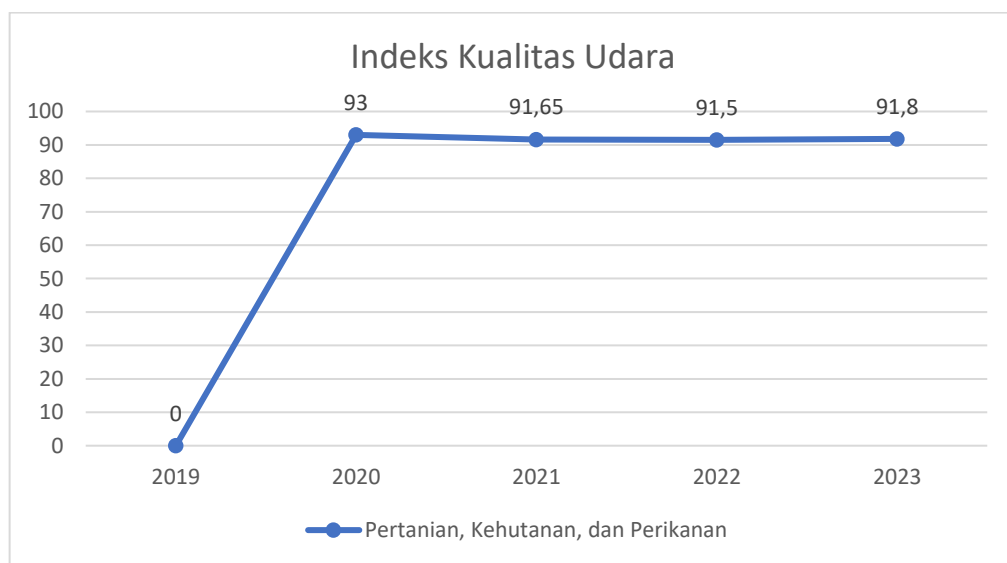
Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Udara	n.a	93	91,65	91,50	91,80

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat

Grafik 3.16

Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat Indeks Kualitas Kutai Barat tahun 2023 mengalami Kenaikan dari tahun 2022.

Adapun Tolok ukur capaian meningkatnya Kualitas Udara diukur dari indikator yaitu Persentase Peningkatan Kualitas Udara yang dihitung berdasarkan rata-rata peningkatan kualitas udara dengan parameter yaitu Nitrogen Dioksida ( $\text{NO}_2$ ) dan Sulpur Dioksida ( $\text{SO}_2$ ) sebagai berikut:

$$\text{IKU} = \text{Indeks Kualitas Udara} = 100 - [50/0.9 \times (\text{Ieu} - 0.1)]$$

Pada Parameter  $\text{NO}_2$  dan  $\text{SO}_2$  :



Nilai Rata-rata SO<sub>2</sub> pada 11 Titik = 6,07

Nilai Rata-rata NO<sub>2</sub> pada 11 Titik = 7,67

Diperoleh Indeks Udara (Indeks Udara Model EU-IEU)

Indeks NO<sub>2</sub> = 0,19

Indeks SO<sub>2</sub> = 0,30

Rataan Indeks = Ieu = ( Indeks NO<sub>2</sub> + Indeks SO<sub>2</sub> )/2  
= 0,245

IKU = 100 – (50/0,9 x (0,245-0,1)) = **91,80**

**b. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator**

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator yaitu :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pada tahun 2023 status IKU Kutai barat masuk kategori sangat baik peringkat 2 dari 10 Kab/kota dan peringkat 179 dari 514 kab/kota. Dengan melakukan pengambilan Sampling secara periodik setahun 2 kali pada 6 Titik dilakukan oleh DLH Kubar, 8 titik oleh provinsi, 7 titik oleh Kementerian. Pada tahun 2023 kejadian kebakaran lahan menurun, sehingga mempengaruhi kualitas udara.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solisi yang telah dilakukan:**

Adapun Faktor yang mempengaruhi yaitu;

1. Masih adanya aktivitas pembukaan lahan dengan cara pembakaran;
2. Faktor perubahan iklim.



Adapun Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu:

1. Meningkatkan Kolaborasi/Kerjasama pengampu kepentingan untuk menjaga kualitas udara di Kab.Kubar;
2. Menambah sarana dan prasarana pendukung;
3. Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat tentang pengelolaan sampah yang ramah lingkungan;

### **3. Indeks Kualitas Lahan**

#### **a. Perbandingan Capaian Indikator Setiap Tahunnya**

Untuk keperluan penyusunan metode penghitungan IKTL yang dapat mewakili karakteristik wilayah perkotaan, hulu dan hilir daerah aliran sungai serta kepulauan, dapat diidentifikasi beberapa pendekatan yang dipergunakan untuk penyusunan metode penghitungan IKTL:

- a. Kecukupan luas (kawasan hutan dan) penutupan hutan pada daerah aliran sungai dan/atau pulau sesuai kondisi eksisting.
- b. Kemampuan dan kesesuaian lahan pada karakteristik lahan tertentu yang membutuhkan Tutupan Lahan berupa pepohonan, seperti pada sempadan sungai, pantai dan sekitar danau/waduk, lahan kemiringan lereng >25% (lebih dari dua puluh lima persen). Karakteristik lahan tersebut juga dapat mewakili wilayah hulu dan hilir, dimana sempadan sungai, sekitar danau/waduk dan lahan kemiringan lereng >25% (lebih dari dua puluh lima persen) pada umumnya terdistribusi di bagian tengah hingga ke hulu, sedangkan sempadan pantai di bagian hilir.
- c. Berkaitan dengan arahan penggunaan lahan di wilayah perkotaan, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) peruntukan lahannya berupa ruang terbuka hijau. Peruntukan sebagai ruang terbuka hijau tersebut dapat berupa hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas perkotaan, kebun raya,

taman keanekaragaman hayati atau taman kota yang didominasi pepohonan.

- d. Penggunaan data citra satelit *Landsat* dalam analisis Tutupan Lahan, terdapat keterbatasan khususnya pada wilayah perkotaan sehingga diperlukan pendetailan data untuk pelaksanaan pemantauan kondisi ruang terbuka hijau dan rehabilitasi hutan dan lahan.

Tabel 3.48

Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Lahan	n.a	66	66,10	66,41	70,30

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat

Grafik 3.17

Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat Indeks Kualitas Kutai Barat tahun 2023 mengalami Kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2022.



**b. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator**

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator yaitu :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan

Pada tahun 2023 status IKL Kab. Kubar masuk kategori Baik, peringkat 6 dari 10 kab/kota, peringkat 106 nasional dari 514 kab/kota. Adapun Luas lahan kritis yang ada di Kab. Kutai Barat pada tahun 2022 yaitu 33.659,674 hectare (ditjend BPDAS LH-KLHK tahu 2022), dan aktivitas yang telah dilakukan dalam menjaga kualitas lahan kritis penanaman Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis untuk menjaga tubuh air agar tidak terjadi erosi dan longsor.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan:**

Adapun Faktor yang mempengaruhi ketercapaian yaitu:

1. Adanya Taman Hutan Rakyat yang telah ditetapkan seluas 120 Hektare
2. Adanya Hutan Adat yang telah ditetapkan
3. Adanya 1 Lembo (Hutan Buah-buahan) 1 kampung/desa yang merupakan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan (ketersediaan air, lahan, dan hutan dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca).

Adapun Faktor yang mempengaruhi Kegagalan yaitu;

1. Terjadinya alih fungsi lahan untuk lahan Perkebunan, pertambangan dan permukiman;
2. Masih adanya budaya ladang yang berpindah-pindah;
3. Masih terjadinya kebakaran lahan dan hutan.



Adapun Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu:

1. Pengendalian alih fungsi lahan dengan meningkatkan pengawasan perijinan;
2. Meningkatkan pemahaman Masyarakat dampak budaya ladang yang berpindah – pindah yang dapat menyebabkan kerusakan penutupan lahan;
3. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung Tim Brigade Peduli Api dan penguatan kapasitas SDM.



## SASARAN 5

### MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN

#### Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke Dua yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pelayanan Pendidikan"** dengan tujuan **"Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Barat"**. Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 5 menggunakan 2 indikator kinerja yaitu : Rata-rata Lama Sekolah dengan tingkat keberhasilan **102,97%** dengan kategori **"MELAMPAUI TARGET (MT)"**. Pencapaian target kinerja sasaran **Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pelayanan Pendidikan** seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 3.49

Capaian Kinerja Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pelayanan Pendidikan  
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Rata-rata Lama Sekolah	8,52	8,85	103,87	Melebihi Target
2	Angka Harapan Lama Sekolah	12,98	13,25	102,08	Melebihi Target
Rata-rata Capaian Kinerja				102,97	Melampaui Target

Tabel 3.50

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
1	Rata-rata Lama Sekolah	8,70	8,78	8,85
2	Angka Harapan Lama Sekolah	13,02	13,09	13,25

**Tabel 3.51**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Akhir RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Capaian Kinerja	%	
		2023	2026	2023	2023	2026
1	Rata-rata Lama Sekolah	8,52	8,7	8,85	103,87	101,72
2	Angka Harapan Lama Sekolah	12,98	13,05	13,25	102,08	101,53

## 1. Rata-rata Lama Sekolah

### a. Perbandingan Capaian Indikator

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di definisikan yaitu Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Rumusan

$$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (LamaSekolahPendudukke - i)$$

Keterangan:

1.  $P_{15+}$  = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas

2. Lama sekolah penduduk ke-i:

> Tidak pernah sekolah = 0

> Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1

> Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir +1

> Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir

> Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1

3. Tahun konversi ijazah

> Tidak punya ijazah = 0

> SD = 6 tahun; SMP = 9 tahun; SMA = 12 tahun

> D1/D2 = 14 tahun; D3 = 15 tahun; D4 = 16 tahun; S1 = 17 tahun

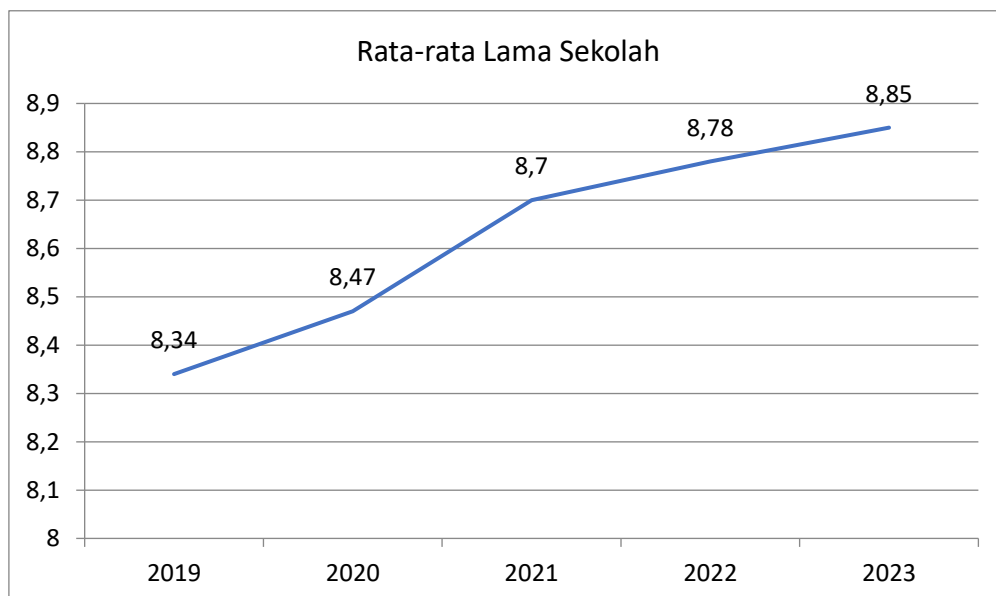
> S2 = 19 tahun; S3 = 22 tahun

Tabel 3.52  
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata Lama Sekolah	8,34	8,47	8,70	8,78	8,85

Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 3.18  
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023



Berdasarkan Tabel dan grafik diatas menunjukan bahwa pada setiap tahunnya pencapaian Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai mengalami peningkatan. Sedangkan jika dibandingkan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2023 Rata-rata Lama Sekolah Kaupaten Kutai Barat Tahun 2023 lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Timur namun lebih tinggi dari Nasional hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.53  
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Di Provinsi  
Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah
1	Kutai Barat	8,85
2	Kutai Kartanegara	9,26
3	Kutai Timur	9,45
4	Berau	9,56
5	Penajam Paser Utara	8,53
6	Paser	8,91
7	Mahakam Ulu	8,49
8	Samarinda	10,93
9	Bontang	10,92
10	Balikpapan	10,93
11	Prov. Kalimantan Timur	9,99
12	Nasional	8,77

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

## **2. Angka Harapan Lama Sekolah**

### **a. Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya**

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di definisikan yaitu Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas.

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

dimana:

$HLS_a^t$  = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

$E_i^t$  = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

i = Usia (a, a + 1, ..., n)

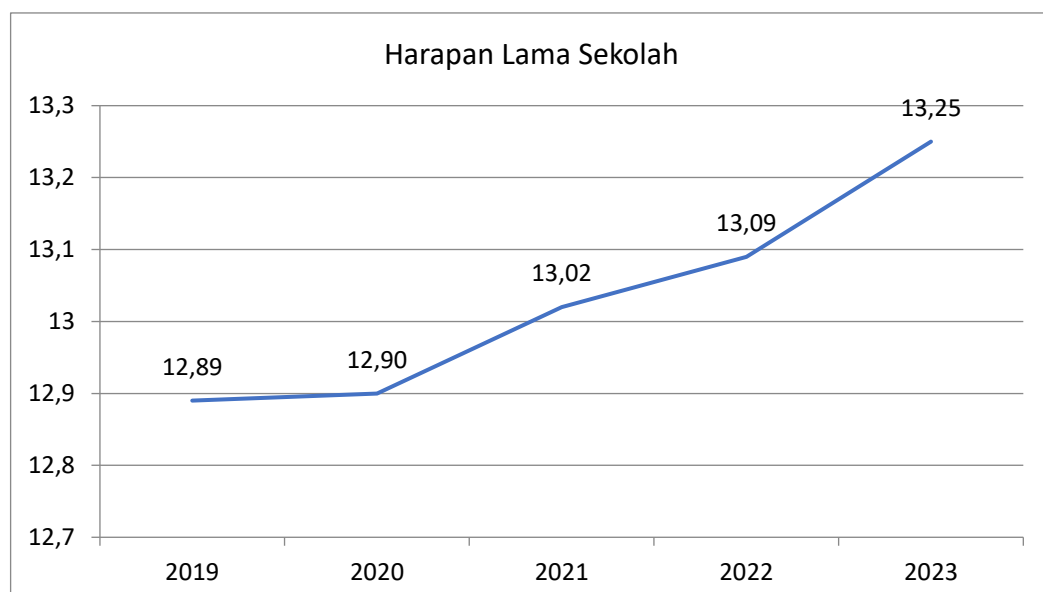
FK = Faktor koreksi pesantren

Tabel 3.54  
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
Harapan Lama Sekolah	12,89	12,90	13,02	13,09	13,25

Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 3.19  
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023





Berdasarkan Tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa pada setiap tahunnya pencapaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Barat mengalami peningkatan. Sedangkan bila dibandingkan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2023 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Timur namun lebih tinggi dari Nasional hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.55**  
**Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2023.**

No	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah
1	Kutai Barat	13,25
2	Kutai Kartanegara	13,64
3	Kutai Timur	13,01
4	Berau	13,36
5	Penajam Paser Utara	12,86
6	Paser	13,37
7	Mahakam Ulu	12,63
8	Samarinda	15,39
9	Bontang	13,43
10	Balikpapan	14,24
11	Prov. Kalimantan Timur	14,02
12	Nasional	13,15

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

**b. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator**

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendidikan



Pada tahun 2023 fokus kegiatan yang dilakukan untuk ketercapaian indikator yaitu melakukan Sosialisasi tentang test Formatif/Sumatif akhir modul kesetaraan, Sosialisasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer, Sosialisasi Uji Kesetaraan, dan Sosialisasi Data Pokok Pendidikan Masyarakat versi tahun berjalan.

Pada tahun 2023 terdapat angka kelulusan paket A,B dan C dengan persentase kelulusan untuk Paket A sebesar 75%, Paket B sebesar 83% dan Paket C sebesar 87% dengan akumulasi rata-rata capaian sebesar 81,66 %.

**Tabel 3.56**  
**Angka kelulusan Paket A, B, dan C Tahun 2023**

Jenis	target	realisasi	capaian
Paket A	100	75%	75
Paket B	100	83 %	83
Paket C	100	87%	87
Rata-rata			81,66

Adapun Faktor yang mempengaruhi ketercapaian Indikator yaitu :

1. Adanya warga belajar yang pindah keluar dari daerah kabupaten Kutai Barat
2. Adanya peserta didik yang tidak hadir tanpa alasan/keterangan
3. Adanya peserta didik yang meninggal dunia

Adapun Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu

1. Melakukan Percepatan informasi peserta didik yang pindah dari dalam atau luar wilayah Kabupaten Kutai Barat
2. Melakukan sosialisasi terkait registrasi pendaftaran pada calon peserta didik untuk melakukan registrasi pada SKB/PKBM dengan membawa rapor dan surat pindah dari satuan asal.
3. Memastikan tersedianya buku teks, materi pembelajaran, dan



fasilitas pendukung belajar yang memadai untuk memastikan peserta didik memiliki semua yang mereka butuhkan untuk berhasil.

## **2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Pada tahun 2023 fokus kegiatan yang dilakukan untuk ketercapaian indikator yaitu melakukan Monitoring dan Evaluasi ke 233 TK di 16 Kecamatan, dan melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi guru TK/PAUD dengan mengikuti diklat berjenjang Tingkat Dasar 40 Guru TK dan Tingkat Lanjut 80 Guru TK dan 20 Guru TK mengikuti diklat Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Stunting yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Timur. Melaksanakan Sosialisasi transisi PAUD ke SD pada 100 PAUD yang berada di 16 Kecamatan.

## **3. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra**

Daya ungkap berhubungan erat dengan kuantitas dan keanekaragaman kosakata yang dimiliki sebuah bahasa. Dalam konteks Indonesia, daya ungkap dipengaruhi oleh keanekaragaman budaya dan bahasa daerah, perkembangan teknologi dan konsep keilmuan di Indonesia, serta sentuhan budaya asing. Meningkatnya perkembangan teknologi, konsep keilmuan, serta pengaruh budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia menyebabkan daya ungkap bahasa Indonesia harus mengalami peningkatan untuk dapat mengimbangi. Berbagai istilah asing yang berkembang perlu dikumpulkan, dipadankan, didokumentasikan, dan dipublikasikan untuk meningkatkan literasi masyarakat. Sesuai UU.RI No. 24/2009, Kebijakan penanganan bahasa dan sastra daerah diarahkan pada tiga tindakan, yakni Pelindungan, Pengembangan, Pembinaan bahasa dan sastra daerah. Maka dinas Pendidikan dan kebudayaan melakukan Upaya agar indikator



dapat tercapai.

Adapun Faktor yang mempengaruhi ketercapaian Indikator yaitu

1. Belum tersediannya akses internet yang merata untuk mendukung setiap sekolah dalam menerapkan digitalisasi ;
2. Sekolah masih terbiasa dengan pola ajar dengan kurikulum 13.

Adapun Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu

1. Kegiatan lomba literasi jenjang SD dan SMP akan diadakan setiap tahunnya;
2. Memberikan Sosialisasi kepada peserta didik mengenai literasi dan digitalisasi Bahasa dan sastra;
3. Memperoleh bentuk fisik dan digital karya sastra sebagai bahan ajar
4. Mendapatkan narasumber yang memahami karya sastra Bahasa daerah Yaitu, Bahasa Tunjung, Benuaq dan Kutai
5. Mendapatkan dewan juri lomba yang menguasai Bahasa daerah khususnya Bahasa Tunjung, Benuaq dan Kutai.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah yaitu melalui Program Beasiswa Kutai Barat Cerdas dimana program tersebut mengakomodir beasiswa dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Landasan Hukum Produk Beasiswa Kutai Barat Cerdas telah selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 12 tahun 2009 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Tidak Mampu dan Mahasiswa Prestasi serta Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2016 tentang Panduan Program Beasiswa Kutai Barat Cerdas.

Adapun Program Beasiswa Kutai Barat Cerdas terbagi menjadi empat komponen yaitu :



1. Beasiswa Biasa

Penerima Program Beasiswa biasa mencakup dari jenjang SD, SMP dan SMA dengan kategori ; tidak mampu, non akademik dan prestasi yang di peruntukkan bagi siswa ;

- a. Siswa miskin dan atau tidak mampu
- b. Disabilitas atau dan berkebutuhan khusus
- c. Yatim piatu atau dan dari panti asuhan
- d. Paskibrata dari keluarga tidak mampu
- e. Siswa non prestasi dengan kondisi berasal dari daerah 3T (terpencil, terluar dan tertinggal)
- f. Usulan umum.

2. Beasiswa Prestasi

Penerima Program Beasiswa prestasi mencakup dari jenjang SD, SMP dan SMA dengan kategori; tidak mampu, non akademik dan prestasi yang di peruntukkan bagi siswa;

- a. Siswa yang memiliki nilai rata-rata terbaik
- b. Siswa yang sekolah Khusus Olahraga Internasional (SKOI) Kalimantan Timur
- c. Siswa yang menjuarai lomba bidang akademik dan non akademik Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.
- d. Siswa yang dinyatakan lulus seleksi oleh satuan Pendidikan

3. Beasiswa Penuh

Penerima Program Beasiswa penuh mencakup dari jenjang perguruan Tinggi dengan kategori; tidak mampu, non akademik dan prestasi yang di peruntukkan bagi mahasiswa;

- a. Mahasiswa asal Kabupaten Kutai Barat yang menempuh Pendidikan perguruan tinggi didalam atau diluar daerah/wilayah dengan prestasi akademik;
- b. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan disatuan pendidikan.



4. Beasiswa Program Kerjasama

Penerima Program Beasiswa diperuntukan bagi mahasiswa program khusus Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan tinggi didalam atau diluar daerah.

Tabel 3.  
Daftar Penerima Beasiswa Kutai Barat Cerdas  
Tahun 2023

NO	KATEGORI BEASISWA	JENJANG				JUMLAH
		SD	SMP	SMA	KULIAH	
1	BIASA/TIDAK MAMPU	200 siswa	200 siswa	200 siswa		600 siswa
2	PRESTASI NON AKADEMIK	171 siswa	200 siswa	-		371 siswa
3	PRESTASI	189 siswa	200 siswa	-		389 siswa
4	PROGRAM KERJASAMA	-	-	-	125 Mahasiswa	125 Mahasiswa
TOTAL						1.485



## SASARAN 6

### MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

#### Capaian Kinerja Sasaran

Capaian Strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi Kedua yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Barat Periode 2021-2026 yaitu “Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui Pendidikan dan Pelatihan yang didukung Optimalisasi Pelayanan Kesehatan”. Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 1 menggunakan 1 indikator kinerja yaitu Usia Harapan Hidup dengan tingkat keberhasilan **100,05 %** dengan kategori **”MELAMPAUI TARGET (MT)”**. Pencapaian target kinerja sasaran **Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat** dapat dilihat pada tabel diawah:

Tabel 3.57  
Capaian Kinerja Meningkatnya Akses dan  
Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Usia harapan Hidup (Tahun)	73,15	73,19	100,05	Melampaui Target

Tabel 3.58  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
1	Usia harapan Hidup (Tahun)	73,10	73,10	73,19

Tabel 3.59  
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Capaian Kinerja	%	
		2023	2026		2023	2026
1	Usia harapan Hidup (Tahun)	73,15	73,44	73,19	100,05	99,65

Adapun pencapaian Sasaran pada indikator kinerja dapat dijelaskan melalui analisis sebagai berikut:

**1. Usia Harapan Hidup (UHH)**

**a. Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya**

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terushidup. AHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan AHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

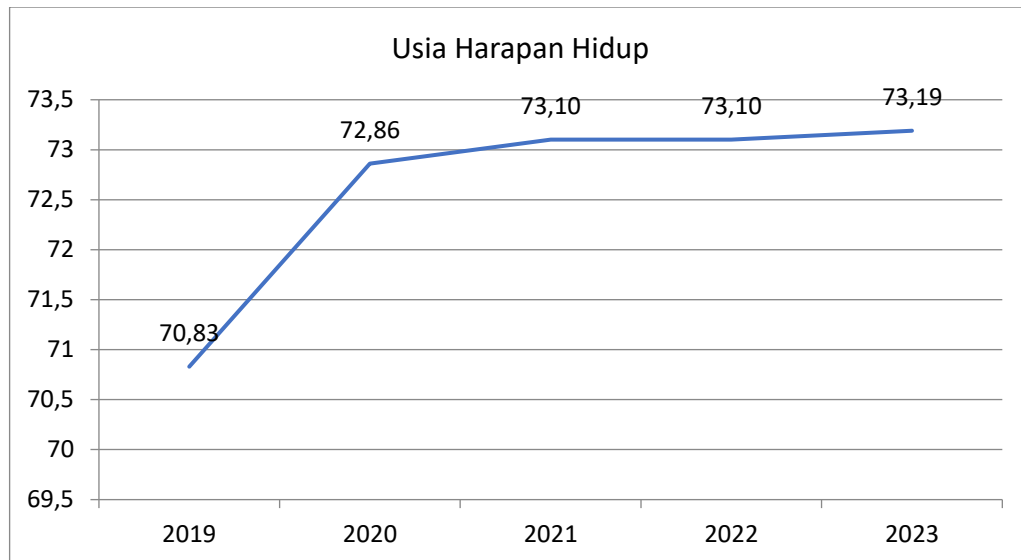
Tabel 3.60  
Usia Harapan Hidup Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 - 2023

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
Usia Harapan Hidup	70,83	72,86	73,10	73,10	73,19

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kutai Barat*

Grafik 3.20

Usia Harapan Hidup Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 - 2023



Berdasarkan tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa Usia Harapan Hidup Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 mempunyai interpretasi bahwa secara rata-rata bayi yang baru lahir pada 2023 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan usia 73,19 tahun. Sedangkan jika dibandingkan Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2023 Usia Harapan Hidup Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Timur namun lebih tinggi dari Nasional hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.61

Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2023.

No	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah
1	Kutai Barat	73,19
2	Kutai Kartanegara	72,75
3	Kutai Timur	73,57



4	Berau	72,41
5	Penajam Paser Utara	71,83
6	Paser	72,99
7	Mahakam Ulu	72,46
8	Samarinda	74,68
9	Bontang	74,67
10	Balikpapan	74,89
11	Prov. Kalimantan Timur	74,72
12	Nasional	72,13

**b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator**

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang ketercapaian Indikator yaitu :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pada Tahun 2023 fokus kegiatan yang dilakukan untuk ketercapaian indikator ini antara lain yaitu Pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Neonatal Essensial di 15 Puskesmas, Kaji Tiru Pemanfaatan Buku KIA Ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta, Pelacakan Kematian Neonatal dan Bayi, Kegiatan Pengkajian kasus kematian yang melibatkan dr. Spesialis Obstetri Gynecologi, dr. Spesialis Anak dan dr. Spesialis Penyakit Dalam dimana hasil pengkajian ini menjadi rekomendasi **sehingga jika terjadi kasus serupa yang dapat menyebabkan kematian dapat di lakukan pencegahan terlebih dahulu agar tidak terjadi kematian dengan penyebab yang serupa.**



Selain itu peningkatan kualitas SDM berupa orientasi dan pelatihan-pelatihan baik secara luring maupun daring yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Propinsi maupun Kementerian Kesehatan terus menerus dilakukan antara lain Pelatihan SHK (Skrining Hipotiroid Kongenital) dan PJB (Penyakit Jantung Bawaan), Pelatihan Fasilitator Antenatal Care, Persalinan dan Nifas termasuk Pelatihan USG Bagi Dokter Umum Puskesmas.

Pemenuhan sarana dan prasarana baik Hibah dari Dinas Kesehatan Propinsi maupun Kementerian Kesehatan termasuk pengadaan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten sendiri yang mendukung dalam penurunan jumlah kematian bayi. Beberapa sarana yang sudah terpenuhi adalah Alat USG di 19 Puskesmas, Alat Mixsafe Transport di 17 Puskesmas dan Pulse Oximeter bagi 19 Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Untuk Prasarana yang sudah dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kutai Barat adalah Pengadaan Buku KIA Bagi Bayi Kecil oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat dimana Buku ini diperuntukkan bagi Bayi BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) serta bayi kurang bulan (prematur) yang ditujukan untuk memberikan panduan kepada orang tua yang memiliki bayi kecil yang berisi informasi pelayanan dan perawatan kesehatan bagi bayi kecil serta edukasi dalam melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan yang tidak ada pada Buku KIA.

Adapun yang menjadi Faktor pendukung dalam ketercapaian Indikator yaitu :

1. Tersedianya tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) di 8 Puskesmas yang berada di Kabupaten Kutai Barat;
2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung pelayanan kegawatdaruratan Neonatal;



3. Pendampingan dokter spesialis anak berupa grup diskusi melalui Telemedicine.
4. Peningkatan kapasitas SDMK berupa orientasi maupun pelatihan-pelatihan.
5. Adanya Inovasi berupa :
  - a. TEKA-TEKI (Tekan Angka Kematian Anak dan Tekan Kematian Ibu)
  - b. CHABIDA COMBO (Chat Selalu Bidan Anda Dimana Saja)
  - c. JEMBATAN (Jemput Dan Antar Ibu Melahirkan)
  - d. BIDUK PERAHU (Bidan dan Dukun Pantau Kesehatan Ibu)
  - e. BUBUR CENIL (Berburu Jejak Ibu Hamil)
6. Dukungan lintas sektor melalui Dana Kampung/Desa

Adapun yang menjadi Faktor Penghambat dalam ketercapaian Indikator yaitu :

1. Faktor Sosial Budaya dimana masih adanya kepercayaan anak dibawah usia 40 hari tidak boleh keluar rumah;
2. Masih adanya persalinan yang dibantu oleh Non Tenaga Kesehatan dirumah;
3. Masih adanya pernikahan usia dini.
4. Masih adanya kasus resiko tinggi pada ibu hamil yang belum mendapatkan tata laksana kesehatan sesuai SOP.
5. Lemahnya kemampuan tenaga kesehatan dalam mendeteksi kasus resiko pada ibi hamil.

Adapun Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu:

1. Skrining ibu hamil resiko tinggi dan penatalaksanaan kesehatan sesuai SOP.
2. Peningkatan pelayanan ibu dan bayi berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta melalui sistem rujukan terpadu dan berkesinambungan semenjak ANC;
3. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan postnatal bagi



- bayi baru lahir, termasuk imunisasi;
4. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan.
  5. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan dalam mendeteksi dini faktor risiko kematian;
  6. Peningkatan pemberian ASI eksklusif;
  7. Penguatan dan pengembangan pelaksanaan MTBM;
  8. Kunjungan rumah bagi bayi yang tidak datang ke fasilitas kesehatan.
  9. Perluasan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) mencapai UCI (Universal Child Immunization) sampai level desa;
  10. Peningkatan cakupan dan mutu intervensi spesifik mulai dari remaja, ibu hamil, dan bayi.
  11. Penyediaan ambulans desa untuk mencegah tiga terlambat;
  12. Meningkatkan metode/cara promosi kesehatan, melalui TV spot, leaflets, booklet, media sosial, dan sebagainya;
  13. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program.  
Memberikan edukasi dan meningkatkan kemitraan antara tenaga Kesehatan dengan Non tenaga Kesehatan, tokoh Masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat.

Pada tahun 2023 upaya yang telah dilakukan untuk ketercapaian indikator yaitu Pelacakan Kasus Kematian Ibu untuk menemukan sebab dan tindakan selanjutnya dalam menurunkan angka kematian ibu dengan datang langsung ke puskesmas dan kampung sebanyak 4 kasus, Membentuk tim pengkaji kasus kematian ibu dan anak tingkat kabupaten yang tertuang dalam surat keputusan bupati, Penyampaian rekomendasi hasil kajian tim pengkaji kasus kematian ibu dan anak ke puskesmas, Melakukan evaluasi dan mekanisme sistem pencatatan dan pelaporan kesehatan ibu dan anak dalam aplikasi e-Kohort dan aplikasi maternal perinatal death notification (MPDN) serta monitoring



program kelas ibu hamil bagi bidan pengelola program di puskesmas di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Adapun yang menjadi Faktor Penghambat dalam ketercapaian Indikator yaitu :

1. Masih tingginya ibu hamil dengan riwayat kehamilan resiko tinggi (resti) sebesar 142,63%
2. Belum semua ibu hamil yang ada di wilayah kerja puskesmas mau melakukan ANC di puskesmas (Pemeriksaan 10T) sehingga tidak terpenuhinya standar pelayanan minimal bagi ibu hamil. (sesuai Permenkes No.21 tahun 2021 tentang SPM)
3. Masih ada ibu hamil yang melahirkan di dukun kampung.
4. Masih adanya persalinan di non fasilitas kesehatan (di rumah) yang di tolong oleh nakes dikarenakan adanya sosial budaya ibu melahirkan yang tidak boleh keluar rumah setelah melahirkan.
5. Masih adanya ibu hamil menderita kurang energi kronik (KEK) dan anemia serta faktor-faktor yang memperberat keadaan ibu hamil seperti empat terlalu, tiga terlambat, ibu hamil yang menderita penyakit menular (HIV/AIDS, Sifilis, Malaria, Tuberkolusis) maupun penyakit menurun (Hipertensi, Diabetes Melitus, Asma) sehingga mempengaruhi pelayanan kesehatan standar ibu hamil.

Adapun Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu:

1. Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi
2. Pemeriksaan kehamilan (ANC/Antenatal Care) terpadu yang melibatkan dokter, petugas gizi, laboratorium, dan dokter gigi di Puskesmas sebelum usia kehamilan 12 minggu. Adanya Surat Edaran tentang kebijakan setiap ibu hamil minimal 1 kali bertemu dokter saat ANC usia kehamilan 0-3 bulan
3. Kemitraan Bidan dan dukun.
4. Membuat surat edaran Kepala Dinas mengenai Permenkes No



97 tahun 2014 tentang ketentuan persalinan harus dilakukan di fasyankes untuk menjaga kesehatan ibu dan mengurangi angka kematian ibu (AKI).

5. Mengaktifkan program kelas ibu hamil.
6. Meningkatkan Kesadaran masyarakat dan keluarga untuk berpartisipasi dalam Skrining Layak Hamil.



## SASARAN 7

### MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

#### Capaian Kinerja Sasaran

Capaian Strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi Ketiga yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Barat Periode 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel”.

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 7 menggunakan 6 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, Opini BPK, Nilai LPPD, Persentase Desa Mandiri, Indeks Pembangunan Gender, dan Nilai SAKIP dengan tingkat keberhasilan **109,88%** dengan kategori **”MELAMPAUI TARGET (MT)”**. Pencapaian target kinerja sasaran **Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah** dapat dilihat pada tabel diawah:

Tabel 3.62

Capaian Kinerja Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.50	82.21	99.64	Tidak Tercapai
2	Nilai SAKIP	68	63.64	93.5	Tidak Tercapai
3	Opini BPK	WTP	WTP	100	Tercapai
4	Nilai LPPD	3.7	2.7564	74.49	Tidak Tercapai
5	Persentase Desa Mandiri	0.13	0,2474	190,30	Melebihi Target
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84.17	85,29	101,33	Melebihi Target
Rata-rata Capaian Kinerja				109,88	Melampaui Target



Tabel 3.63  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,91	82,46	82.21
2	Nilai SAKIP	62,46	62,07	63.64
3	Opini BPK	WTP	WTP	WTP*
4	Nilai LPPD	3,0733	2,15	2.7564
5	Persentase Desa Mandiri	0,1	0,1684	0,2474
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84,28	84,62	85,29

Tabel 3.64  
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Capaian Kinerja	%	
		2023	2026	2023	2023	2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.50	84	82.21	99.64	84,86
2	Nilai SAKIP	68	74	63.64	93.5	86
3	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100	100
4	Nilai LPPD	3.7	4	2.7564	74.49	68,91
5	Persentase Desa Mandiri	0.13	0,16	0,2474	190,30	154,62
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84.17	84,47	85,29	101,33	100,97



## **1. Indeks Kepuasan Masyarakat**

### **a. Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menjelaskan definisi dan beberapa unsur penilaian SKM kategori baik dengan nilai interval 76,61 – 88,30, Adapun kriteria IKM Baik dalam Perencanaan Strategis Kabupaten Kutai Barat adalah minimal 82,00. Pada tahun 2023 terdapat 21 OPD, 2 Bagian pada sekretariat Daerah dan RSUD HIS yang Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, dari Perangkat Daerah yang melakukan pengukuran IKM, 23 perangkat daerah yang disurvei berkategori “Baik”, dengan memperoleh nilai IKM lebih dari 76,99 dan 1 Perangkat Daerah yang disurvei berkategori “Kurang Baik” dengan Nilai IKM 75,43 Sehingga capaian kinerja indikator adalah sebesar 82,21.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan Amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah pula mengamanatkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 ini dapat dilihat dari Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 yang diberikan oleh Ombudsman RI Kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang hasilnya diperoleh melalui pengukuran kepuasan pelayanan masyarakat pada seluruh unit layanan Perangkat Daerah.

Survei pelayanan publik pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat, mencakup pelayanan langsung dan tidak langsung kepada masyarakat, terdiri dari 9 unsur meliputi Persyaratan, Sistem, mekanisme dan prosedur, Waktu penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan

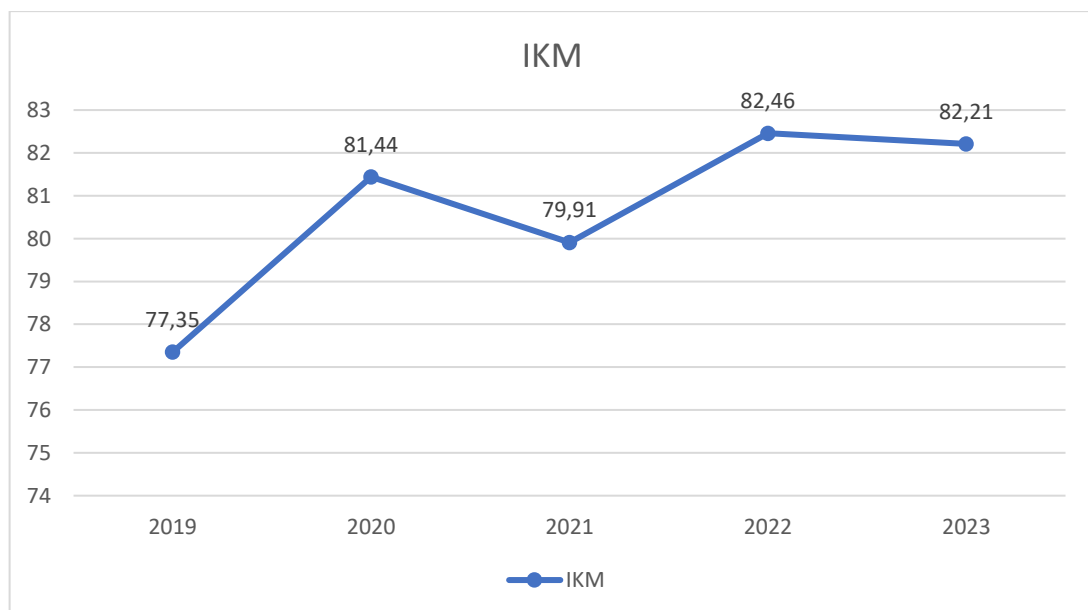
pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan serta tindak lanjut, Sarana dan Prasarana.

Tabel 3.65  
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat  
Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat	77,35	81,44	79,91	82,46	82,21

Sumber : Bagian Organisasi Setkab Kutai Barat

Grafik 3.21  
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat  
Tahun 2019-2023



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya penambahan Perangkat Daerah Sampling Penilaian.



Tabel 3.66  
Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat  
Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023

No.	OPD/Instansi/Unit Kerja	IKM Unit Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	87,18	B	Baik
2	Bagian Organisasi	86,34	B	Baik
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial	86,11	B	Baik
4	DPMPTSP	85,30	B	Baik
5	Dinas Perhubungan	84,90	B	Baik
6	Kecamatan Penyinggahan	84,26	B	Baik
7	Kecamatan Tering	84,22	B	Baik
8	Kecamatan Muara Pahu	83,70	B	Baik
9	Kecamatan Sekolaq Darat	83,06	B	Baik
10	Kecamatan Damai	82,97	B	Baik
11	Dinas Pertanian	82,84	B	Baik
12	Dinas Kesehatan	82,42	B	Baik
13	Kecamatan Muara Lawa	81,69	B	Baik
14	Kecamatan Barong Tongkok	81,64	B	Baik
15	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	81,57	B	Baik
16	RSUD HIS	81,22	B	Baik
17	Kecamatan Melak	81,11	B	Baik
18	Dinas Sosial	80,56	B	Baik
19	Dinas Lingkungan Hidup	80,45	B	Baik



20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80,40	B	Baik
21	Dinas Ketahanan Pangan	80,21	B	Baik
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	77,68	B	Baik
23	Badan Kepegiaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	76,92	B	Baik
24	Badan Pendapatan Daerah	75,43	C	Kurang Baik

Sumber : Bagian Organisasi Setkab Kutai Barat

Perangkat daerah yang mendapatkan predikat kurang baik berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat didapat dari unsur pelayanan antara lain : Kompetensi, Jangka Waktu, Sarana dan Pra sarana yang belum sesuai dengan harapan pengguna layanan.

Tabel 3.67

**Saran Dan Rekomendasi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik**

No	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Unsur Nilai Tertinggi	Unsur Nilai Terendah	Saran dan Rekomendasi
1.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bersama Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Kompetensi pelaksana 3,7 perilaku pelaksana dengan nilai 3,68 dan sarana prasarana mendapatkan nilai tertinggi 3,4.	Biaya Tarif Mendapatkan Nilai Terendah yaitu 3,2, Selanjutnya Pengaduan mendapatkan Nilai 3,26. Produk mendapatkan Nilai 3,4	Biaya Tarif : Membuat spanduk/baner/leaflet berisi slogan pelayanan tidak dipungut biaya atau gratis. Melaksanakan sosialisasi tentang biaya/tarif layanan sesuai peraturan yang berlaku.  Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan : Memanfaatkan teknologi seperti web, sosial media untuk menerima saran dan masukan. Terlebebih kualitas penanganan pengaduan segera di tindak lanjuti.  Produk : Membuat informasi tambahan untuk masyarakat melalui banner, spanduk serta tepampangnya SOP produk layanan yang ada.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023**



2.	Bagian Organisasi	Sedangkan Unsur Layanan dengan Nilai Tertinggi yaitu biaya/tarif mendapatkan nilai tertinggi 3,68 dan prosedur mendapatkan nilai 3,68 dan perilaku pelaksana mendapatkan nilai 3,48	Beberapa unsur pelayanan terendah yaitu Waktu Pelayanan mendapatkan nilai 3,15. Selanjutnya produk spesifikasi jenis layanan yang mendapatkan nilai 3,30. Persyaratan mendapatkan nilai 3,40 dan sarana prasarana 3,40.	<p>Jangka Waktu Penyelesaian : Memanfaatkan teknologi informasi untuk efektifitas waktu pelayanan. Menambah personil/petugas layanan.</p> <p>Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan : Sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait produk spesifikasi jenis pelayanan.</p> <p>Persyaratan : Sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait persyaratan pelayanan.</p> <p>Perilaku : Menerapkan 5S kepada setiap pelaksana pelayanan sesuai dengan budaya pelayanan</p>
3.	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial	Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu biaya tarif dengan nilai 3,8. Persyaratan mendapatkan nilai 3,7 dan produk spesifikasi jenis pelayanan mendapatkan nilai 3,6.	Jangka waktu penyelesaian mendapatkan nilai terendah yaitu 3,2. Selanjutnya sistem mekanisme dan prosedur dan perilaku pelaksana mendapatkan nilai 3,3.	<p>Jangka Waktu Penyelesaian : Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk Efektivitas Waktu pelayanan. Menambah Personil atau Petugas Pelayanan.</p> <p>Sistem Mekanisme dan Prosedur : Melaksanakan Reviu SOP sesuai kebutuhan dan bidang tugas.</p> <p>Perilaku Pelaksana : Memberikan Bimbingan/Arahan kepada Pegawai secara rutin.</p>
4.	DPMPTSP	Nilai Tertinggi yaitu biaya/Tarif mendapatkan nilai tertinggi 3,87 dan persyaratan serta kompetensi mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,39 . perilaku pelaksana dan sarana prasarana mendapatkan Nilai tertinggi 4,41.	Jangka waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,24. Selanjutnya Produk layanan yang mendapatkan nilai 3,26 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga Sistem mekanisme dan prosedur 3,31.	<p>Waktu Penyelesaian : Peningkatan Sosialisasi Registrasi "Online" .</p> <p>Produk spesifikasi Jenis Layanan : Sosialisasi Kepada Masyarakat/Pengguna terkait produk Spesifikasi jenis pelayanan.</p> <p>Prosedur Pelayanan : Lakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap prosedur Pelayanan.</p>



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023



5.	Dinas Perhubungan	Unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu biaya tarif dengan nilai 3,8. sistem mekanisme dan prosedur dengan nilai 3,6. kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana dengan nilai tertinggi 3,5.	Unsur yang mendapatkan nilai terendah yaitu persyaratan, Produk Spesifikasi jenis pelayanan, penangan pengaduan saran dan masukan serta sarana prasarana mendapatkan nilai 3,1	<p>Persyaratan : Sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait persyaratan pelayanan.</p> <p>Produk Spesifikasi jenis Pelayanan : Sosialisasi Kepada Masyarakat/Pengguna layanan terkait spesifikasi jenis pelayanan. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan : Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan.</p> <p>Saran dan Prasaran : Optimalisasi Penanganan pengaduan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Membentuk Tim Pengaduan Pelayanan.</p>
6.	Kecamatan Penyinggahan	Tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu sistem mekanisme dan prosedur mendapatkan nilai 3,41. Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai 3,41 dan perilaku mendapatkan nilai 3,39.	Persyaratan mendapatkan Nilai terendah yaitu 3,33, selanjutnya Jangka Waktu yang mendapatkan Nilai 3,24 adalah nilai terendah kedua.	<p>Persyaratan : Sosialisasi kepada masyarakat/Pengguna layanan terkait Persyaratan pelayanan.</p> <p>Jangka Waktu Penyelesaian : Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk Efektivitas waktu pelayanan. Menambah personil/petugas pelayanan.</p>
7.	Kecamatan Tering	Tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu prosedur mendapatkan nilai 3,49. biaya/tarif mendapatkan nilai 3,44 serta sarana Prasarana dan persyaratan mendapatkan nilai 3,42.	Produk layanan dan kompetensi mendapatkan nilai terendah yaitu 3,28 selanjutnya jangka waktu mendapatkan nilai 3,29.	<p>Kompetensi Pelaksana : Mengikutsertakan pegawai pada kegiatan Bimbingan Teknis dan studi komparasi sesuai bidang tugas masing-masing. Penyusunan analisis beban kerja, Analisis jabatan dan peta jabatan.</p> <p>Produk Layanan : Menempelkan SOP Produk layanan sebagai informasi Tambahan untuk masyarakat.</p> <p>Waktu Penyelesaian : Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk efektivitas waktu pelayanan. Menambah personil/petugas Pelayanan.</p>
8.	Kecamatan Muara Pahu	Tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu biaya tarif mendapatkan nilai 3,47, perilaku pelaksana mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,43	Jangka waktu penyelesaian dan pengaduan mendapatkan nilai 3,29. selanjutnya produk spesifikasi jenis pelayanan mendapatkan nilai 3,25 adalah nilai terendah kedua.	<p>Jangka Waktu Penyelesaian : Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk efektivitas waktu pelayanan. Menambah personil/petugas Pelayanan.</p> <p>Penanganan Pengaduan , saran dan masukan : Sosialisasi kepada masyarakat/Pengguna layanan</p>



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023



		Sistem mekanisme Prosedur mendapatkan nilai 3,36.		terkait produk spesifikasi jenis pelayanan.  Produk spesifikasi jenis pelayanan: Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan.
9.	Kecamatan Sekolaq Darat	Unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu biaya/tarif dengan nilai 3,5. sistem mekanisme dan prosedur mendapatkan nilai 3,4 kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana mendapatkan nilai 3,3.	Unsur yang memiliki nilai terendah diantaranya yaitu persyaratan, jangka waktu penyelesaian, Produk spesifikasi jenis layanan, penanganan pengaduan saran dan masukan serta sarana prasarana memiliki nilai 3,2	Waktu Penyelesaian : Identifikasi faktor-faktor penghambat pelayanan. Melakukan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada pengurangan waktu pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada saat ini.  Persyaratan : Sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait persyaratan pelayanan.  Produk spesifikasi jenis layanan : Sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait spesifikasi jenis pelayanan.
10.	Kecamatan Damai	Ada 3 unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu biaya/tarif dengan nilai 3,43. sistem mekanisme dan prosedur mendapatkan nilai 3,39, serta waktu penyelesaian dan perilaku pelaksana mendapatkan nilai 3,34	Sarana dan prasarana mendapatkan nilai terendah pertama yaitu 3,17, selanjutnya penanganan pengaduan mendapatkan nilai terendah kedua yaitu 3,21. produk spesifikasi jenis layanan mendapatkan nilai terendah ketiga yaitu 3,26.	Saran dan Prasarana : Optimalisasi penanganan pengaduan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Membentuk Tim penanganan Pengaduan.  Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan.  Produk spesifikasi jenis pelayanan: Sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait produk spesifikasi jenis pelayanan.
11	Dinas Pertanian	unsur layanan dengan nilai tertinggi Biaya/Tarif Pelayanan, Perilaku Petugas Pelayanan mendapatkan nilai 3,45	Unsur pelayanan yang mendapat nilai terendah yaitu Waktu Pelayanan yang mendapatkan nilai 3,13	Direkomendasikan untuk dapat membuat pengaturan jam kerja petugas pelayanan agar pelayanan tidak dihentikan pada jam istirahat sehingga masyarakat tidak perlu menunggu hingga jam istirahat berakhir dan pelayanan dapat lebih cepat diselesaikan. Selain itu pimpinan masing – masing unit pelayanan memastikan bahwa petugas pelayanan hadir sesuai waktu pelayanan sesuai yang sudah ditetapkan dan memastikan pemberian sanksi dan penghargaan bagi petugas pelayanan berdasarkan ketepatan waktu dalam memberi pelayanan.
12	Dinas Kesehatan	Tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu biaya/tarif dengan nilai	Unsur layanan dengan nilai terendah yaitu persyaratan mendapatkan nilai	Persyaratan : Persyaratan akan dimuat pada SOP sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan kemudian di publikasikan sehingga masyarakat dapat melihat.



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023



		3,56. Perilaku mendapatkan nilai 3,34 dan sarana prasarana mendapatkan nilai 3,32	3,22, selanjutnya jangka waktu yang mendapatkan nilai 3,13 dan produk layanan mendapatkan nilai 3,19	<p>Jangka Waktu : Pemeliharaan dan Pengadaaan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan.</p> <p>Produk spesifikasi jenis pelayanan : Sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait produk spesifikasi jenis pelayanan.</p>
13	Kecamatan Muara Lawa	Ada 3 unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu tarif/biaya mendapatkan nilai 3,40, Kompetensi mendapatkan nilai 3,35 , prosedur mendapatkan nilai 3,32.	Unsur terendah yaitu jangka waktu mendapatkan nilai 3,17, produk layanan mendapatkan nilai 3,18 dan Pengaduan mendapatkan nilai 3,20.	<p>Jangka Waktu : Akan di sesuaikan dengan apa yang ada di SOP.</p> <p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan.</p> <p>Produk spesifikasi jenis Pelayanan : Sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait produk spesifikasi jenis pelayanan.</p>
14	Kecamatan Barong Tongkok	Ada 3 unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu biaya/tarif mendapatkan nilai tertinggi 3,5 dan perilaku pelaksana serta penanganan pengaduan mendapatakan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,3.	Jangka Waktu penyelesaian mendapatkan Nilai terendah yaitu 3,1 , selanjutnya persyaratan, prosedur , produk spesifikasi jenis layanan , kompetensi pelaksana dan sarana prasarana mendapatkan nilai terendah 3,2.	<p>Jangka Waktu Penyelesaian : Memanfaatkan teknologi informasi untuk efektifitas waktu pelayanan.menambah petugas pelayanan.</p> <p>Sistem mekanisme dan prosedur : Melakukan evaluasi SOP sesuai kebutuhan dan bidang tugas.</p> <p>Persyaratan : Melakukan sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan.</p> <p>Produk spesifikasi jenis pelayanan : Sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan.</p> <p>Kompetensi Pelaksana : Mengikutsertakan Pegawai pada kegiatan Bimbingan Teknis dan studi komparasi sesuai dengan tugas bidang masing-masing. Penyusunan analisis beban kerja ,analisis jabatan dan Peta.</p>
15	Badan Perencanaan, pembangunan penelitian dan pengembangan	Biaya Tarif mendapatkan Nilai 4.00, Penanganan Pengaduan mendapatkan nilai 3,30 serta perilaku pelaksana mendapatkan nilai 3,32	Waktu Penyelesaian mendapatkan nilai 3.03 dan Persyaratan mendapatkan nilai 3,08 serta sarana prasaranan mendapatkan nilai 3,11	<p>Jangka Waktu Penyelesaian : Memanfaatkan teknologi informasi untuk efektifitas waktu pelayanan.menambah petugas pelayanan.</p> <p>Persyaratan : Melakukan sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan.</p> <p>Saran dan Prasarana :</p>



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023



				Optimalisasi penanganan pengaduan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Membentuk Tim penanganan Pengaduan.
16	RSUD HIS	Prosedur dan Kompetensi mendapatkan nilai 3,28 dan Penanganan Pengaduan saran dan masukan mendapatkan nilai 3,42 serta biaya Tarif mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,52	Waktu pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 2,9 serta sarana prasarana mendapatkan nilai 3	Jangka Waktu : Memanfaatkan Teknologi Informasi Efektifitas waktu Pelayanan. Menambah personil/petugas pelayanan.  Saran dan Prasarana : Optimalisasi penanganan pengaduan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Membentuk Tim penanganan Pengaduan.
17	Kecamatan Melak	Ada 3 unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu persyaratan , sistem mekanisme dan prosedur , serta sarana prasarana mendapatkan nilai tertinggi 3,4	Produk spesifikasi jenis layanan, Kompetensi Pelaksana dan penanganan pengaduan , saran masukan mendapatkan nilai terendah yaitu 3.	Produk Spesifikasi jenis layanan : Sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait produk spesifikasi jenis pelayanan.  Kompetensi Pelaksana : Mengikutsertakan pegawai pada kegiatan bimbingan teknis dan studi komparasi sesuai bidang tugas masing-masing. Penyusunan Analisis beban kerja , analisis jabatan dan peta jabatan.  Penanganan Pengaduan , saran dan masukan : Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan.
18	Dinas Sosial	Ada 3 unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu biaya/tarif mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,47, perilaku pelaksanaan mendapatkan nilai 3,41 serta sarana prasarana mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,29.	Jangka Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,00 selanjutnya produk pelayanan yang mendapatkan nilai 3,14 adalah nilai terendah kedua . begitu juga prosedur termasuk ketiga unsur terendah dengan nilai 3.12	Jangka Waktu : Memanfaatkan Teknologi Informasi Efektifitas waktu Pelayanan. Menambah personil/petugas pelayanan.  Produk spesifikasi jenis Pelayanan : Sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait Produk spesifikasi jenis layanan.  Sistem mekanisme dan prosedur : Melaksanakan reviu standar operational prosedur (SOP) Sesuai kebutuhan dan bidang tugas.
19	Dinas Lingkungan Hidup	Ada 3 unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu biaya/tarif dengan nilai 3,34, prosedur 3,28 dan Kompetensi	Unsur terendah yaitu sarana dan prasarana mendapatkan nilai 3,09. Pengaduan mendapatkan nilai 3,15 dan jangka waktu	Sarana dan Prasarana : Menambah Fasilitas sarana prasarana yang dibutuhkan  Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan : Memberikan pelatihan khusus terkait <i>service Excellent</i>



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023



		mendapatkan nilai 3,25	mendapatkan nilai 3,15.	Jangka Waktu : Memanfaatkan Fasilitas untuk mempercepat pelayanan dan menambah personil.
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ada 3 Unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu produk spesifikasi jenis pelayanan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,44 dan perilaku pelaksana serta biaya/tarif mendapatkan nilai 3,38.	Kompetensi pelaksana mendapatkan nilai terendah 2,94, jangka waktu mendapatkan nilai 3,05. dan selanjutnya penanganan Pengaduan saran dan masukan mendapatkan nilai 3,11	Kompetensi Pelaksana : Mengikutsertakan Pegawai pada Kegiatan Bimbingan Teknis dan Studi Komparasi sesuai bidang dan tugasnya masing-masing.  Waktu Penyelesaian : Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk Efektivitas waktu pelayanan.  Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan : Pemeliharaan dan Penanganan Sarana prasarana Kantor sesuai kebutuhan.
21	Dinas Ketahanan Pangan	Ada 3 Unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu biaya tarif dengan nilai 3.87 . Sistem Mekanisme dan prosedur serta penanganan pengaduan saran dan masukan mendapatakan nilai tertinggi yaitu 3,25	Produk Spesifikasi jenis Pelayanan dan Kompetensi Pelaksana Mendapatkan nilai terendah yaitu 3.	Kompetensi Pelaksana : Mengikutsertakan Pegawai pada kegiatan Bimbingan Teknis dan studi Komparansi sesuai bidang tugas masing-masing. Serta penyusunan analisis beban kerja, analisis jabatan dan peta jabatan
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	Unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu jangka waktu dan biaya tarif mendapatkan nilai 3,2	Sistem mekanisme prosedur dan Kompetensi Pelaksana mendapatkan nilai terendah yaitu 3	Sistem Mekanisme Prosedur : Lakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Prosedur Pelayanan, Melakukan Reviu Standar Operational Prosedur (SOP) sesuai Kebutuhan dan bidang tugas.
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ada 3 unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Sarana prasarana mendapatkan nilai 3,2 dan persyaratan mendapatkan nilai 3,15 serta jangka waktu mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,13	Perilaku Pengaduan mendapatkan nilai terendah yaitu 3.01 selanjutnya Prosedur dan produk mendapatkan nilai 3,02 adalah nilai terendah kedua.	Perilaku Petugas : Melakukan Pelatihan Khusus terkait <i>service Excellent</i>  Layanan Konsultasi/Pengaduan ; Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana prasarana Kantor sesuai kebutuhan.  Prosedur Pelayanan : Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan.
24	Badan Pendapatan Daerah	Ada 3 unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Prosedur mendapatkan	Kompetensi mendapatkan nilai terendah yaitu 2,75 selanjutnya jangka waktu	Kompetensi : Pembinaan dan evaluasi berkelanjutan khususnya dalam memberi pelayanan sesuai SOP yang sudah disusun dan ditetapkan.



		nilai 3,15, biaya tarif mendapatkan nilai 3,15 dan persyaratan mendapatkan nilai 3,12	mendapatkan nilai 2,81 adalah nilai terendah kedua. sarana prasarana mendapatkan nilai 2,9 dan produk mendapatkan nilai 3,06.	<p>Jangka Waktu : Evaluasi terhadap waktu yang sudah di tetapkan dalam SOP dalam Pelayanan.</p> <p>Saran dan Prasarana : Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan baik secara kuantitas maupun kualitas untuk meningkatkan estetika, kenyamanan dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.</p> <p>Produk pelayanan : Memberikan Informasi Kepada masyarakat seputar produk pelayanan yang terdapat pada SOP dan menempelkan pada papan informasi yang ada</p>
--	--	---	---	--

*Sumber : Bagian Organisasi Setkab Kutai Barat*

**b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator**

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator yaitu :

**a. Kegiatan Penataan Organisasi**

Pada tahun 2023 fokus kegiatan yang dilakukan untuk ketercapaian Indikator adalah melakukan sosialisasi dan evaluasi SKM yang dilaksanakan setiap awal tahun, yang selanjutnya melakukan pendampingan pelaksanaan dan pelaporan IKM pada masing-masing Perangkat Daerah. Pada tahun 2023 pelaksanaan SKM ditargetkan pada 47 Perangkat Daerah, namun pada pelaksanaannya baru 23 Perangkat Daerah yang telah melaksanakan SKM.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Adapun yang menjadi Faktor Penghambat terkait ketercapaian Indikator yaitu :

1. Target yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ialah 47 (empat puluh tujuh) Perangkat Daerah. Setiap tahun



jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan SKM berubah-ubah, semakin banyak Perangkat Daerah yang melaksanakan SKM semakin rendah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Kutai Barat, dikarenakan Front Office / pemberi layanan tidak menjelaskan secara detail setiap poin pertanyaan dalam SKM kepada Masyarakat yang menerima layanan sehingga Masyarakat mengisi kuisioner sesuka hati.

Adapun upaya dan solusi untuk mendorong pencapaian kinerja pelayanan publik Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut :

1. Upaya peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masing-masing Perangkat Daerah, dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Front Office / Pemberi layanan agar lebih memahami seluruh layanan yang ada pada Perangkat Daerah masing-masing;
2. Mendorong dan memfasilitasi kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja agar menetapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan;
3. Mendorong dan melakukan fasilitasi kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja agar menerapkan Standar Pelayanan pada setiap jenis pelayanan, sesuai dengan penetapan Standar Pelayanan;
4. Melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja;
5. Mendorong Perangkat Daerah/Unit Kerja agar melakukan evaluasi terhadap ketersediaan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas;



6. Mendorong Perangkat Daerah/Unit Kerja agar melakukan evaluasi, memelihara, dan membangun sarana dan prasarana pelayanan publik;
7. Mendorong dan memfasilitasi Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk berkomitmen melalui cara membuat Maklumat Pelayanan dan menerapkannya pada kegiatan pelayanan publik sehari-hari;
8. Mendorong Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk menyusun rencana kerja berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan memperhatikan unsur pelayanan mana yang harus tetap dipertahankan dan unsur pelayanan mana yang harus ditingkatkan.

## **2. Nilai SAKIP**

### **a. Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented goverment*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja; (d) memberikan saran

perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

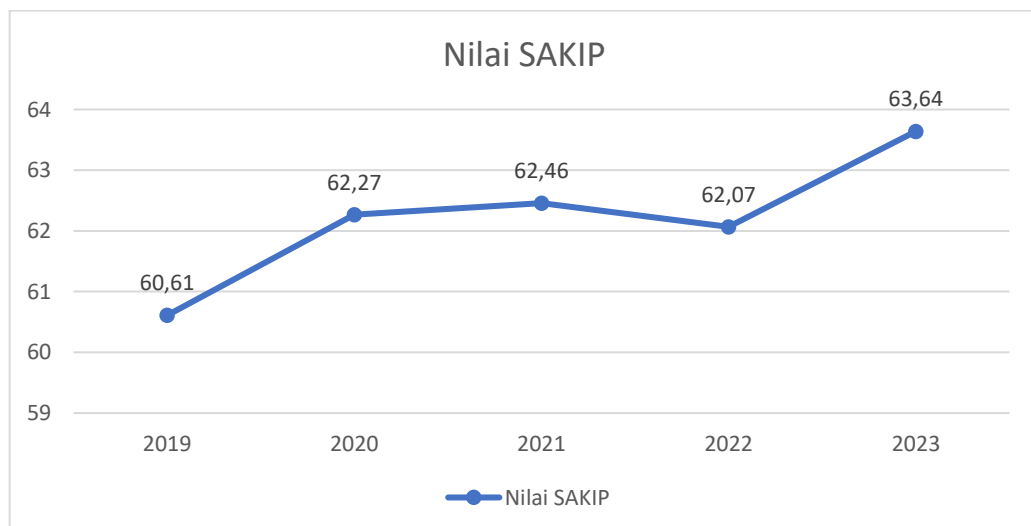
Ruang Lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah ( PD ). Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi dan kemanfaatan yang kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

Tabel 3.68  
Nilai SAKIP Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai SAKIP	60,61	62,27	62,46	62,07	63,64

Sumber : Bagian Organisasi Setkab Kutai Barat

Grafik 3.22  
Nilai SAKIP Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023





Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat Nilai SAKIP Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Berikut Rincian Penilaian Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Kutai Barat oleh Kementerian PANRB yang dimana pada penilaian tahun 2022 ada perubahan komponen penilaian berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**Tabel 3.69**  
**Rekapitulasi Penilaian Hasil Evaluasi AKIP**  
**Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2023**

Komponen yang dinilai	2019		2020		2021		2022		2023	
	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30	21,17	30	21.82	30	21,88	30	21,71	30	21,76
Pengukuran Kinerja	25	14,14	25	14.48	25	14,53	30	17,21	30	17,35
Pelaporan Kinerja	15	9,52	15	9.71	15	9,74	15	9,75	15	9,90
Evaluasi Internal	10	4,88	10	5.19	10	5,19	25	13,40	25	14,63
Capaian Kinerja	20	10,91	20	11.07	20	11,12		62,07		93,32
Nilai Hasil evaluasi	100	<b>60,61</b>	100	<b>62.27</b>	100	<b>62,46</b>	100	<b>62,07</b>	100	<b>63,64</b>
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		<b>B</b>		<b>B</b>		<b>B</b>		<b>B</b>		<b>B</b>

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Kutai Barat

Adapun Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 yang harus ditindak lanjuti yaitu :



**b. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator**

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator yaitu :

**a. Kegiatan Penataan Organisasi**

Pada tahun 2023 fokus kegiatan yang dilakukan untuk ketercapaian indikator yaitu Melakukan Coaching Clinic/Pendampingan Penguatan SAKIP Kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, melakukan fasilitasi tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah, melakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Adapun yang menjadi Faktor Penghambat terkait ketercapaian indikator yaitu :

1. Masih kurangnya pemahaman Perangkat Daerah tentang SAKIP;
2. Perangkat Daerah masih berfokus pada realisasi anggaran dari pada ketercapaian Kinerja;
3. Kurangnya Peran Pimpinan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan SAKIP.

Adapun Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu

1. Meningkatkan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan SAKIP;
2. Memberikan Pemahaman Perangkat Daerah akan pentingnya SAKIP;



3. Meningkatkan Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan SAKIP.

### **3. Opini BPK**

#### **a. Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya**

Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK yang ke-8 kali. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperoleh Panji (Terbaik 1) Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 3.70  
Opini BPK Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-2023

No	Tahun	Hasil Opini
1	2016	Wajar Tanpa Pengecualian
2	2017	Wajar Tanpa Pengecualian
3	2018	Wajar Tanpa Pengecualian
4	2019	Wajar Tanpa Pengecualian
5	2020	Wajar Tanpa Pengecualian
6	2021	Wajar Tanpa Pengecualian
7	2022	Wajar Tanpa Pengecualian
8	2023	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah



Untuk mencapai target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), beberapa langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kutai Barat antara lain melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia penatausahaan laporan keuangan, Pemkab Kutai Barat menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Laporan Keuangan SKPD se-Kutai Barat bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim. “*Output* yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut yaitu para pejabat dan pegawai yang terlibat dalam penatausahaan pelaporan keuangan mampu membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah.
- b. Peningkatan sistem pengendalian intern melalui kegiatan *Workshop Control Self Assessment (CSA)*.
- c. Evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pengendalian intern (SPI) atas aset tetap yang digunakan oleh SKPD guna penyempurnaan SPI atas aset tetap dan peningkatan tingkat kepatuhan terkait pengelolaan aset.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD pada akhir tahun untuk menyesuaikan saldo akhir Laporan Keuangan SKPD dengan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Bagian Keuangan sehingga Laporan Keuangan yang dipakai oleh SKPD berdasarkan pada Laporan Keuangan yang disusun oleh Bagian Keuangan (sentralistik).

Pada dasarnya tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran satu dengan indikator penyampaian rencana kerja OPD tepat waktu dan rasio kemandirian keuangan daerah dengan katagori penilaian sangat berhasil sedangkan Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target dengan indikator penilaian berhasil.



Sasaran kedua indikator persentase data aset yang dapat dimanfaatkan dalam menunjang PAD, presentase data aset yang akurat dengan indicator penilaian sangat berhasil dan sasaran tiga indikator persentase tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dengan baik mencerminkan keberhasilan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam kategori Sangat Berhasil.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat selama Tahun 2023. Capaian kinerja Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat dimana tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan pengidentifikasian sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solisi yang telah dilakukan**

Adapun permasalahan yang dihadapi, diantaranya adalah :

1. Pengalokasian dan BTT dari APBD dan SiLPA DBH-DR yang tidak bisa dibelanjakan diakhir tahun
2. Perencanaan terhadap kegiatan yang disusun mulai awal tahun tetapi baru bisa melaksanakan pada semester kedua
3. Belum tersedianya sistem informasi data yang baik dan kualitas SDM yang masih rendah dalam proses penyusunan dokumen keuangan dan aset daerah
4. Kurangnya respon dan ketaatan terhadap pemanfaatan keuangan dalam implementasi program serta sistem pengadministrasian keuangan belum optimal.



Adapun Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan penyesuaian lagi dalam pelaksanaan kegiatan serta menyusun ulang perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Melakukan koordinasi ke Pemerintah Pusat terkait regulasi BTT maupun Dana SiLPA yang tidak bisa dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan data,
4. Melakukan Bimtek peningkatan SDM

#### **4. Nilai LPPD**

##### **a. Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya**

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi LPPD, LKPJ, dan RLPPD. LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dari hasil LPPD tersebut, Pemerintah Pusat melakukan EPPD dalam rangka penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Selain menyampaikan LPPD dan LKPJ, kepala daerah juga wajib menyampaikan dan mempublikasikan RLPPD kepada masyarakat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan



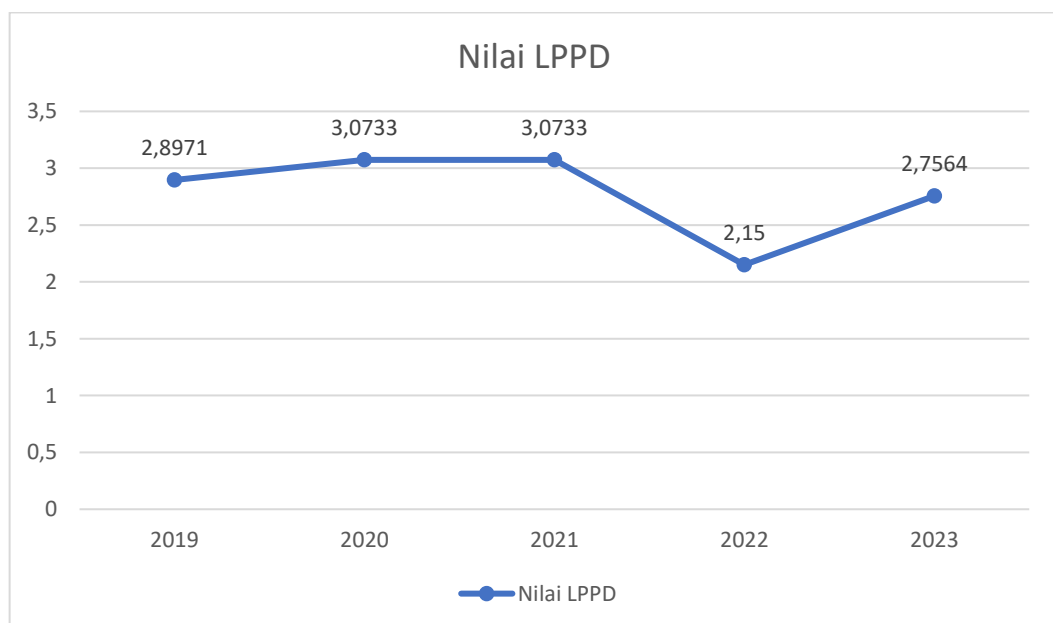
Pemerintahan Daerah selama 1 penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai ruang lingkup, penyusunan, dan penyampaian LPPD, LKPJ, dan RLPPD, pelaksanaan EPPD, dan sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD.

**Tabel 3.71**  
**Nilai LPPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2023**

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai LPPD	2,8971	3,0733	3,0733*	2,15	2,7564

*Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setkab Kutai Barat*

**Grafik 3.23**  
**Nilai LPPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2023**



Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas dapat dilihat Nilai LPPD Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, sedangkan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Barat berada pada Peringkat ke-9 (Sembilan) dan Peringkat 221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) secara Nasional. Hal tersebut berdasarkan Surat



Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022.

Tabel 3.72  
Hasil EPPD T.A 2023 terhadap LPPD T.A 2022

No	Prov/Kab/Kota	Peringkat	Skor	Status
1	Provinsi Kalimantan Timur	6	3,5178	Tinggi
2	Kota Samarinda	8	3,459	Tinggi
3	Kota Bontang	21	3,379	Sedang
4	Kota Balikpapan	43	3,5166	Sedang
5	Kab. Berau	83	3,1964	Sedang
6	Kab. Kutai Kartanegara	114	3,1135	Sedang
7	Kab. Kutai Timur	182	2,9131	Sedang
8	Kab. Penajam Paser Utara	207	2,8325	Sedang
9	Kab. Paser	218	2,7724	Sedang
10	Kab Kutai Barat	221	2,7564	Sedang
11	Mahakam Ulu	349	2,1913	Rendah

Pada tahun 2023 fokus kegiatan yang dilakukan untuk ketercapaian indikator yaitu melakukan Pendampingan dan Evaluasi berkolaborasi Bersama Pembina Provinsi kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang dilakukan secara berkala.

Adapun yang menjadi Faktor Penghambat terkait Kontribusi sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB yaitu

1. Masih terdapat capaian kinerja yang tidak selaras antara SILPPD dengan LKE LPPD;
2. Terdapat 19 (Sembilan Belas) capaian yang masih rendah, antara lain :



- a. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dengan capaian sebesar 30,67%;
- b. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan capaian sebesar 6,72%;
- c. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dengan capaian sebesar 3,74%;
- d. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi dengan Capaian sebesar 0,16%;
- e. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak(PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) dengan capaian sebesar 23,79%;
- f. Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 12,45%;
- g. Persentase Anggaran Responsif Gender(ARG) pada belanja langsung APBD dengan capaian sebesar 0,0025%
- h. Persentase Ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) dengan capaian sebesar 9,51%;
- i. Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan capaian sebesar 4,26%;
- j. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri dengan capaian sebesar 26,44%;
- k. Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas



Komunikasi dan Informatika dengan capaian sebesar 36,17%;

- l. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha dengan capaian sebesar 14,42%;
- m. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dengan capaian sebesar 0,24%;
- n. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dengan capaian sebesar 3,81%;
- o. Terlestarikanya Cagar Budaya dengan capaian sebesar 38%;
- p. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat dengan capaian sebesar 16,67%;
- q. Tingkat Hunian Akomodasi dengan capaian sebesar 7,94%;
- r. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular dengan Capaian sebesar - 66,20%;
- s. Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 20,24%;

Adapun Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat lebih meningkatkan pemahaman terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam pengisian elemen-elemen data capaian kinerja urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
2. Saling berkoordinasi antara pengelola data pada masing-masing perangkat daerah untuk meningkatkan capaian kinerja urusan pemerintahan;



3. Lebih Proaktif dan/atau mengalokasikan anggaran agar mampu meningkatkan :
- a. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
  - b. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi;
  - c. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik;
  - d. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi;
  - e. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak(PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan);
  - f. Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota;
  - g. Persentase Anggaran Responsif Gender(ARG) pada belanja langsung APBD;
  - h. Persentase ketersediaan pangan(Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan);
  - i. Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama;
  - j. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri;
  - k. Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - l. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha;
  - m. Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;
  - n. Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan;
  - o. Terlestarikanya Cagar Budaya;



- p. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat;
  - q. Tingkat Hunian Akomodasi;
  - r. Persentase Penurunan Kegiatan dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular;
  - s. Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).
4. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat perlu berkoordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri mengenai beberapa perbedaan antara Kertas Kerja Evaluasi (KKE), Manual LPPD dan/atau SILPPD, baik itu dalam hal isian elemen data dan/atau capaian kinerja pada Indikator Kinerja Kunci Outcome.

## **5. Persentase Desa Mandiri**

### **a. Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya**

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016, tanggal 18 februari 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (IDM) dijelaskan bahwa Indeks Desa Membangun adalah merupakan indek Komposit yang dibentuk berdasarkan 3 indeks yaitu indeks Ketahanan Sosial, Indek ketahanan Ekonomi dan Indeks ketahanan ekologi/lingkungan yang mempunyai maksud untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan Desa teringgal dan peningkatan Desa Mandiri serta bertujuan untuk menetapkan status.



**Tabel 3.73**  
**Progres Perkembangan Kampung**  
**Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 - 2023**

IDM	2019		2020		2021		2022		2023	
Mandiri	1	1%	9	4,74%	19	10,00%	32	16,84%	47	24,7%
Maju	10	5%	48	25,26%	65	34,21%	75	39,47%	78	41,05%
Berkembang	75	39%	91	47,89%	87	45,79%	77	40,53%	61	32,1%
Tertinggal	98	52%	40	21,05%	18	9,47%	6	3,16%	4	2,1%
Sangat Tertinggal	6	3%	2	1,05%	1	0,53%	0	0,00%	0	0,00%

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung*

**Tabel 3.74**  
**Progres Perkembangan Kampung Per Kecamatan**

No	Kecamatan	Status				
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	Long Iram	2	7	2	0	0
2	Melak	3	1	0	0	0
3	Barong Tongkok	8	11	0	0	0
4	Damai	4	4	9	0	0
5	Muara Lawa	4	4	0	0	0
6	Muara Pahu	0	4	8	0	0
7	Jempang	0	7	5	0	0
8	Bongan	3	2	7	3	0
9	Penyinggahan	0	4	2	0	0
10	Bentian Besar	0	1	6	2	0
11	Linggang Bigung	6	3	2	0	0
12	Nyuatan	0	5	5	0	0
13	Siluq Ngurai	0	7	9	0	0
14	Mook Manaar Bulatn	0	5	10	0	0
15	Tering	0	3	12	0	0
16	Sekolaq Darat	2	6	0	0	0

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung*



Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah Desa Mandiri di kabupaten Kutai Barat dari tahun 2020 ke tahun 2023 dimana pada tahun 2020 ada 9 Desa Mandiri dan pada Tahun 2021 naik menjadi 19 Desa Mandiri, tahun 2022 terdapat 32 Desa Mandiri dan pada Tahun 2023 terdapat 47 Desa Mandiri.

**b. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator**

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator yaitu :

- a. Program Administrasi Pemerintahan Desa

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solisi yang telah dilakukan**

Adapun Faktor pendukung tercapainya indikator ini yaitu, sesuai hasil pengukuran Evaluasi Penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) Di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 dengan perkembangan dari tahun sebelumnya :

1. Adanya peningkatan status Kampung dari Tahun sebelumnya (2022) yaitu terdapat 15 Kampung Maju meningkat ke Mandiri dan 3 Kampung Berkembang ke maju. Pada tahun 2023 terdapat peningkatan 47 kampung mandiri;
2. Pemerintah Kampung telah dapat melihat apa saja yang menjadi kelemahan didalam penyelenggaraan kampungnya dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan didalam rencana kerja Pemerintahan Kampung dan APBKam melalui sumber daya dan dana yang tersedia yang telah dianggarkan pada tahun sebelumnya;
3. Adanya Evaluasi Penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung bersama tenaga ahli Kabupaten, Pendamping Desa dan Pendamping



Lokal Desa ke Kecamatan dan Kampung-Kampung sangat membantu Pemerintah Kampung di dalam memenuhi Indikator Penilaian Indeks Desa.

4. Adanya Pemberian Reward ( Penghargaan ) Kinerja dalam bentuk piagam/plakat penghargaan Kampung dengan PAD terbesar sehingga merupakan salah factor pendorong untuk meningkatkan status.
5. Pemberian reward kepada kampung yang memiliki kinerja yang baik, terutama pada kampung yang tertib secara administrasi.

Adapun yang menjadi Faktor Penghambat terkait ketercapaian indikator yaitu :

1. Akses Jalan Desa/Kampung yang menghubungkan antara Kecamatan ke Kampung yang masih terhubung dengan aspal/beton atau jalan mengalami rusak parah sehingga terkendala dalam segala bidang.
2. Tenaga Dokter dan tenaga Kesehatan lainnya belum semua tersedia di Kampung.
3. Akses/ Jarak tempuh menuju SMP dan SMU masih terlalu jauh dan jalannya sulit dilalui.
4. Taman Baca Masyarakat Desa atau Perpustakaan Desa masih tidak tersedia di kampung.
5. Penanganan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) Kejar Paket A,B,C.
6. Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) masih belum semua desa/kampung yang memiliki PAUD.
7. Jumlah Kelompok kegiatan olahraga dan jumlah kegiatan olahraga masih belum tersedia secara optimal di kampung.
8. Jumlah Keluarga yang memakai Listrik + Non Listrik/ Jumlah Keluarga memakai listrik di Desa Kampung masih belum terpenuhi secara optimal.



9. Fasilitas/Akses Internet warga kampung yang belum ada/masih lemah.
10. Masyarakat Kampung masih membuang sampah secara Tradisional dengan digali lubang atau dibakar dan masih belum memiliki TPS/TPA Kampung.
11. Fasilitas Mitigasi Bencana yang belum sesuai karakteristik wilayah kampung sesuai hasil identifikasi kebencanaan masih belum menjadi perhatian dari pihak kampung.
12. Masih belum tersedianya pasar desa/kampung secara permanen.
13. Jumlah Koperasi Aktif dan BUMK yang masih belum Optimal, BUMK belum menghasilkan Pendapatan Asli Kampung.
14. Belum semua kampung yang mengisi Profil kampung dengan lengkap.

Adapun Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu

1. Perlu adanya kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana Dimensi Sosial, Ekonomi dan Ekologi/Lingkungan menjadi kekuatan yang saling mengisi.
2. Agar Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan Indikator Penilaian Indeks Desa Membangun dapat memprioritaskan program kegiatan sehingga segala keterbatasan pada prasarana sosial dasar yang selama ini menjadi persoalan di tingkat kampung dapat teratasi dengan baik.
3. Mendukung Pemerintahan Kampung untuk membuat Profil Desa/Kampung dan mengupdate data-data Kampungnya secara berkala.
4. Melakukan Fasilitas dan Pembinaan kepada Adan Usaha Milik Kampung ( BUMK ) agar dapat aktif dan mampu menghasilkan Pendapatan Asli Kampung ( PAK ) dengan menggali potensi-potensi yang ada di Kampungnya.



5. Melakukan Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Kampung untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

## **6. Indeks Pembangunan Gender**

### **a. Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya**

<b>Indikator</b>	<b>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b>
<b>Konsep</b>	IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.
<b>Rumusan</b>	$IPG = \frac{IPM \text{ perempuan}}{IPM \text{ laki-laki}}$
<b>Kegunaan</b>	Untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan.
<b>Keterangan</b>	Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), (ii) Pengetahuan (knowledge), dan (iii) Standar hidup layak (decent standard of living)
<b>Interpretasi</b>	Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan



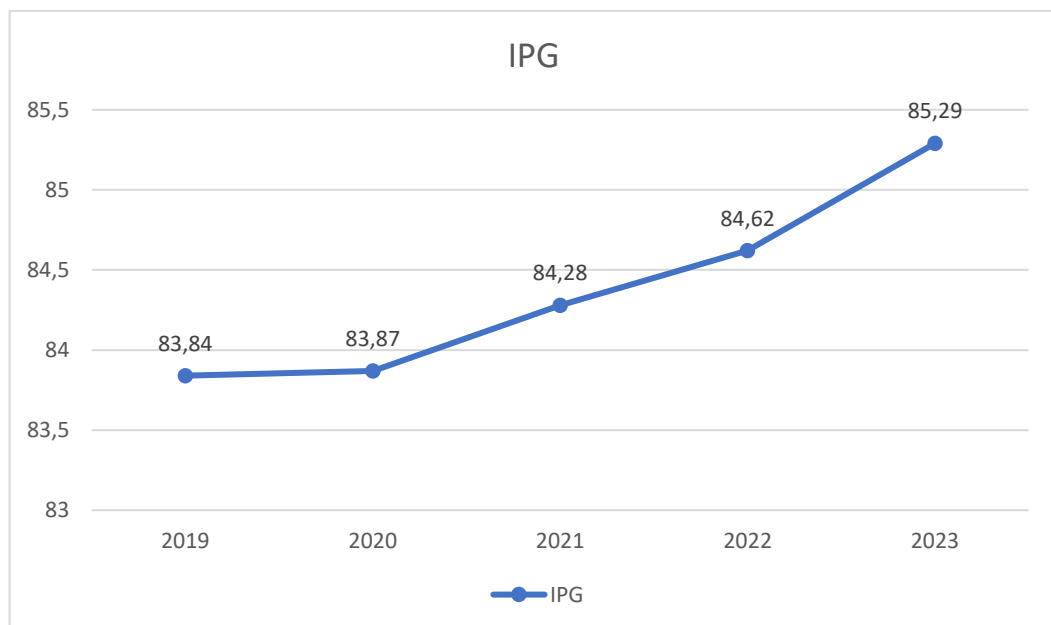
	dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.
--	--

**Tabel 3.75**  
**Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kutai Barat**  
**Tahun 2019 – 2023**

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Gender	83,84	83,87	84,28	84,62	85,29

*Sumber : Badan Pusat Statistik*

**Grafik 3.24**  
**Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kutai Barat**  
**Tahun 2019 – 2023**



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022. Dan Jika dibandingkan



dengan Provinsi Kalimantan Timur Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kutai Barat lebih Rendah, hal tersebut dapat dilihat pada table dibawah:

Tabel 3.76  
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

No	Indeks Pembangunan Gender	
1	Kutai Barat	85,29
2	Paser	72,84
3	Kutai Kartanegara	80,64
4	Kutai Timur	77,83
5	Berau	88,2
6	Penajam Paser Utara	86,93
7	Mahakam Ulu	83,07
8	Balikpapan	90,13
9	Samarinda	90,07
10	Bontang	87,89
11	Kalimantan Timur	87,13

*Sumber : Badan Pusat Statistik*

Pada Tahun 2023 fokus kegiatan yang dilakukan untuk ketercapaian indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) melakukan sosialisasi PUG termasuk PPRG kepada Pejabat Kecamatan, PKK, Organisasi Perempuan. Melakukan Advokasi PUG termasuk PPRG kepada Pejabat Kecamatan.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator yaitu :



1. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.
  - a. Kualitas Pendidikan meningkat berpengaruh pada kualitas Pendidikan Perempuan;
  - b. Kualitas Kesehatan meningkat berpengaruh pada kualitas Kesehatan Perempuan;
  - c. Pendapatan Perempuan berpengaruh pada peningkatan pengeluaran perkapita Perempuan.

Adapun yang menjadi Faktor Penghambat terkait ketercapaian indikator yaitu :

1. Minimnya data terpilah Gender;
2. Belum di sahkannya Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender;
3. Belum dilaksanakannya Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Alternatif/Solusi yang dilakukan

1. Koordinasi dan konsolidasi dengan perangkat daerah terkait data Gender;
2. Koordinasi dengan sekretariat DPRD terkait percepatan pengesahan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender;
3. Melakukan Pelatihan PPRG kepada Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.



## SASARAN 8

### MENINGKATNYA DAN MERATANYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR

#### Capaian Kinerja Sasaran

Capaian Strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi Keempat yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Barat Periode 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penopang Ekonomi Kerakyatan”.

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 8 menggunakan 3 indikator kinerja yaitu Presentase Penduduk Berakses Air Minum Layak, Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik, dan Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dengan tingkat keberhasilan **184,32 %** dengan kategori **”MELAMPAUI TARGET (MT)”**. Pencapaian target kinerja sasaran **Meningkatnya Dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar** dapat dilihat pada tabel diawah:

Tabel 3.77  
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya dan Meratanya Kualitas  
Infrastruktur Dasar Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Presentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	90,60	91,70	101,21	Melebihi Target
2	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	99,6	87,05	87,39	Mencapai Target
3	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	27	7,41	364,37	Melebihi Target
Rata-rata Capaian Kinerja				184,32	Melampaui Target

Tabel 3.78  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
1	Presentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	77,79	86,84	91,70
2	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	85,60	86,26	87,05
3	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	15,26	8,96	7,41

Tabel 3.79  
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Capaian Kinerja	%	
		2023	2026	2023	2023	2026
1	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	90,60	100	91,70	101,21	91,70
2	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	99,6	99,75	87,05	87,39	87,27
3	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	27	24	7,41	364,37	323,88

Adapun pencapaian Sasaran pada indikator kinerja dapat dijelaskan melalui analisis sebagai berikut:



## **1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak**

### **a. Perbandingan Capaian Indikator**

Urusan pekerjaan umum merupakan urusan yang berkaitan dengan pembangunan secara fisik. Selama beberapa tahun terakhir pembangunan fisik di Kutai Barat menunjukkan peningkatan yang cukup tajam, dan pemerintah memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur yang mampu mendukung aktivitas masyarakat, sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi.

Perkuatan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Infrastruktur Pelayanan Dasar berupa penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau, penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, keselamatan dan keamanan transportasi, dan pembangunan jaringan irigasi. Sedangkan infrastruktur ekonomi dengan prioritas pada konektivitas jalan untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Selain itu, infrastruktur ketenagalistrikan dan transformasi digital juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan serta penuntasan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Infrastruktur pelayanan dasar untuk cakupan layanan air minum layak dan aman menjadi prioritas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi kabupaten/ kota sesuai Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka



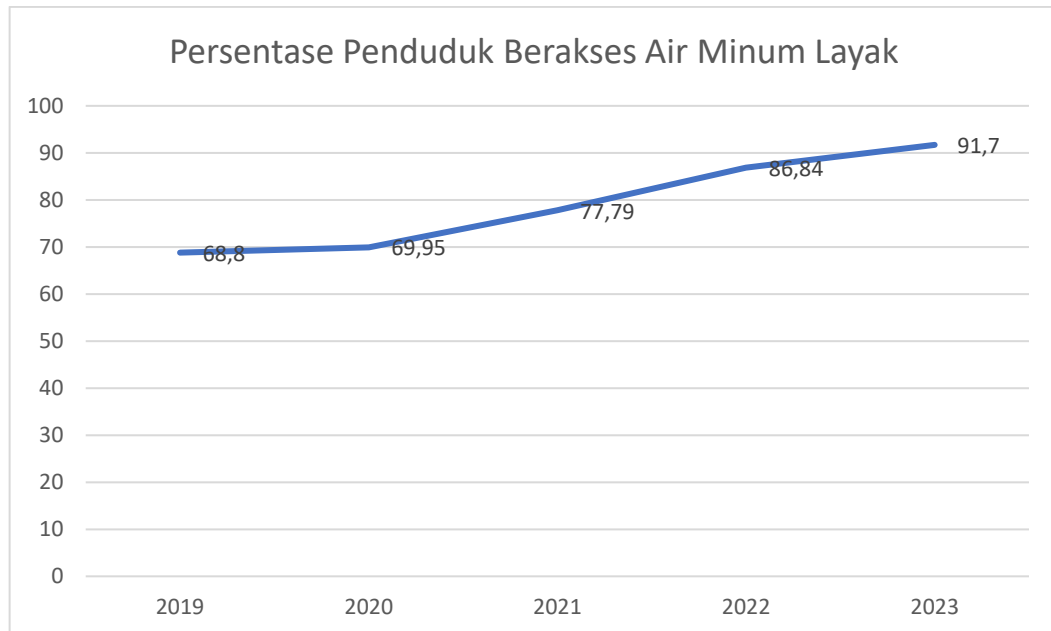
penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya - merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa Penerapan SPM menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Berdasarkan Permen PUPR nomor 29/PRT/M/2018 indikator capaian layanan air minum merupakan persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi. Pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari minimal 60 liter/org/hari dari sisi kuantitas air.

**Tabel 3.80**  
**Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak**  
**Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023**

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	68,80	69,95	77,79	86,84	91,70

*Sumber : Dinas PUPR Kab. Kutai Barat*

Grafik 3.25  
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak  
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023



Berdasarkan tabel dan grafik diatas perkembangan realisasi dari indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Adapun Jumlah Penduduk berakses air minum di Kabupaten Kutai Barat sejumlah 162.313 Penduduk dari 177.007 penduduk yang ada di Kabupaten Kutai Barat.

**b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator**

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator yaitu :

- a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Pada Tahun 2023 Aktivitas yang dilakukan dalam ketercapaian Indikator yaitu melakukan perluasan pembangunan jaringan perpipaan air minum pada 16 kecamatan antara lain Long Iram-



Kampung Anah (4.101.00 KM), Kampung Muara Nilik -Kampung Bermain (3.628.00 Km), Barong Tongkok-Asa-Juaq Asa-Pepas Asa-Ongko Asa (20.983 KM), Linggang Amer-Muara Asa (13.359.00 KM), Optimalisasi Pompa pada SPAM Sendawar sebanyak 3 Unit yang berimplikasi meningkatkan kapasitas (300 liter/detik).

Adanya penambahan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Reguler dari PDAM sebanyak 651Unit yang melayani 2.604 Jiwa dalam wilayah Perkotaan Sendawar. Serta komitmen Kepala Daerah untuk mencapai Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya terkait Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Layak.

**Tabel 3.81**  
**Cakupan Layanan Air Minum Sistem Perpipaan Perunit Pengolahan (WTP dan IKK) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023**

No	Nama Unit Infrastruktur	Wilayah Cakupan Layanan	Jumlah Penduduk Terfasilitasi
1	Wtp 1 (Kota Sendawar)	Kecamatan Barong Tongkok	7.071
		Kecamatan Sekolaq Darat	2.601
		Kecamatan Melak	2.210
2	Wtp 2	Kecamatan Tering	2.136
		Kecamatan Linggang Bigung	1.219
3	Wtp Damai	Kecamatan Damai	2.660
4	Wtp Muara Pahu	Kecamatan Muara Pahu	2.937
5	Wtp Penyinggahan	Kecamatan Penyinggahan	1.231
6	Wtp Tanjung Isuy	Kampung Tanjung Isuy	845
7	Wtp Muara Nayan	Kampung Muara Nayan	1.269
8	Wtp Muara Kedang	Kampung Muara Kedang	400
9	Wtp Jambuk	Kampung Jambuk	725
10	Wtp Muara Jawaq	Kampung Muara Jawaq	354
11	Wtp Muara Lawa	Kecamatan Muara Lawa	649
12	Wtp Siluq Ngurai	Kecamatan Siluq Ngurai	1.797
13	Spam	Penambahan 2022	253
Jumlah			29.676

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kutai Barat

Tabel 3.82  
Data yang Terfasilitasi Spam Pedesaan

No	Nama Unit Infrastruktur	Wilayah Cakupan Layanan	Jumlah Penduduk Terfasilitasi
1	Sab Intu Lingau	Kampung Intu Lingau	511
2	Sab Merayaq	Kampung Merayaq	503
3	Sab Pepas Asa	Kampung Pepas Asa	262
Jumlah Penduduk Yang Terfasilitasi			<b>1.276</b>

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kutai Barat

Berdasarkan Data pada kedua tabel diatas ada beberapa sistem yang mencakup layanan air minum yang ada di Kabupaten Kutai Barat yakni WTP, SPAM dan SAB yang mencakup 29.676 penduduk yang menggunakan sistem perpipaan perunit pengelolaan (WTP) dan juga SPAM serta 1.276 yang menggunakan layanan SAB, untuk itu bila di jumlah keseluruhan jumlah penduduk yang terealisasi cakupan layanan air minum sebanyak 30.952 dari jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Barat yakni 177.007 di tahun 2023.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Adapun yang menjadi Faktor Penghambat terkait ketercapaian indikator yaitu :

1. Banyaknya masyarakat yang menggunakan Air Tanah/Air Permukaan sebagai sumber air bersih;
2. Minimnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh akses air minum layak melalui Jaringan PDAM;
3. Kondisi sebaran penduduk dan kondisi Geografis/luas wilayah menyebabkan Proses pembangunan jaringan Perpipaan dan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) dilakukan berdasarkan Zona wilayah;



4. Ketersediaan Jaringan Listrik PLN berpengaruh secara signifikan terhadap biaya operasional Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA).

Adapun Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu

1. Pemberian Subsidi biaya pendaftaran dan Pemasangan Sambungan Rumah PDAM kepada masyarakat kurang mampu agar mereka memiliki akses air minum yang layak;
2. Perluasan dan Pembangunan jaringan perpipaan yang baru pada 16 Kecamatan dilingkungan Kabupaten Kutai Barat;
3. Peningkatan ketersediaan Jaringan Listrik PLN di beberapa Kampung/desa yang belum memiliki jaringan listrik;
4. Penyediaan layanan air minum layak sesuai target SPM.

## **2. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik**

### **a. Perbandingan Capaian Indikator**

Realisasi Kinerja dari Indikator “Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik” pada tahun 2023 adalah 87,05% dari target yakni 99,60% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kabupaten Kutai Barat dengan capaian kinerjanya adalah 87,05%, capaian ini belum mencapai target yang diperjanjikan. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 sebesar 99,75% maka capaian kinerja ditahun 2023 ini mencapai 87,27%.

Berikut ini Rasio Elektrifikasi Tahun 2023 untuk wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah :

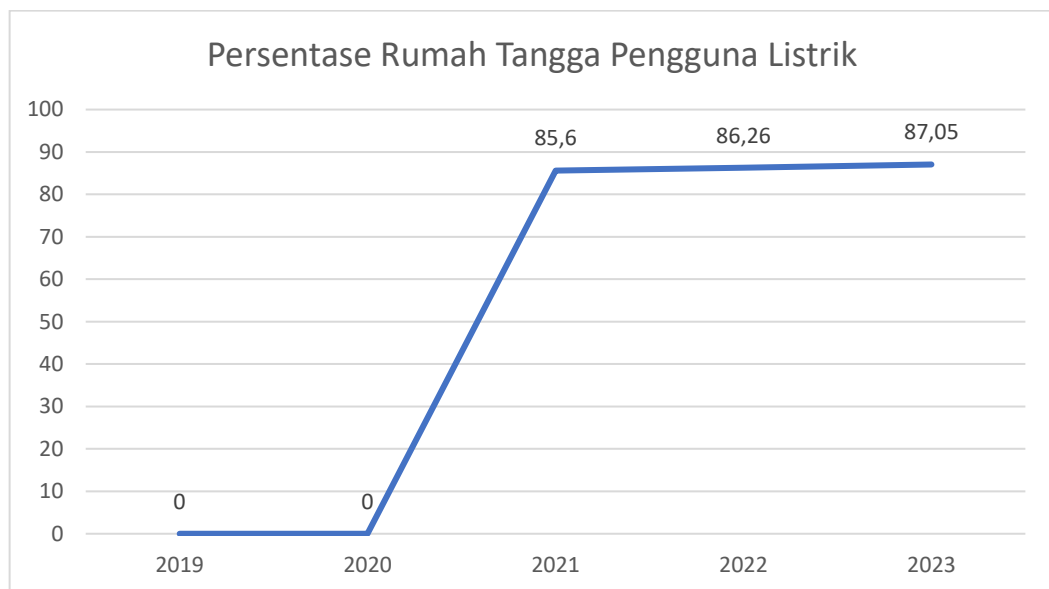
Jumlah Rumah Tangga yang terdata	: 55.998
Jumlah Pelanggan PLN	: 48.749
Persentase	: 87,05%

Tabel 3.83  
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik 2019 – 2023

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	n.a	n.a	85,60	86,26	87,05

Sumber : ULP Melak/Bagian SDA Setkab Kutai Barat

Grafik 3.26  
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik 2019 – 2023



Berdasarkan tabel dan grafik diatas perkembangan realisasi dari indikator Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan, Kabupaten Kutai Barat berada diposisi ke-8 (Delapan) hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.84  
Perbandingan Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten/Kota  
Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
1	Kutai Barat	87,05
2	Kutai Kartanegara	95,80
3	Kutai Timur	83,37
4	Berau	88,15
5	Penajam Paser Utara	95,57
6	Paser	91,40
7	Mahakam Ulu	61,21
8	Samarinda	99,99
9	Bontang	98,75
10	Balikpapan	99,89
11	Prov. Kalimantan Timur	95,03

*Sumber : ULP Melak/Bagian SDA Setkab Kutai Barat*

Adapun aktivitas yang telah dilakukan untuk ketercapaian indikator yaitu melakukan fasilitasi dan koordinasi ke PT. PLN dan pihak swasta terkait pembukaan akses jalan dan jembatan pendukung dalam percepatan Pembangunan kelistrikan di 35 Kampung pada 10 Kecamatan yang berada di Kabupaten Kutai Barat. Dan masih ada 30 Kampung yang belum teraliri Listrik yang tersebar di 9 Kecamatan.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Adapun Faktor yang mendukung ketercapaian Indikator yaitu :

1. Infrastruktur yang memadai dalam mendukung Pembangunan kelistrikan di Kab. Kutai Barat;
2. Sinergi pemerintah Daerah dengan PT. PLN, Swasta, Pemerintah kampung dan Masyarakat dalam Pembangunan kelistrikan.



Adapun yang menjadi Faktor Penghambat terkait ketercapaian indikator yaitu :

1. Penolakan Masyarakat terhadap pemasangan tiang Listrik yang dianggap merugikan tanam tumbuh di lahannya;
2. Kondisi alam yang menghambat Pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Adapun Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu

1. Perlunya melakukan pendekatan persuasive dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kepada Masyarakat;
2. Perlunya percepatan Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dalam pengangkutan material.

### **3. Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)**

#### **a. Perbandingan Capaian Indikator**

Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC).

RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

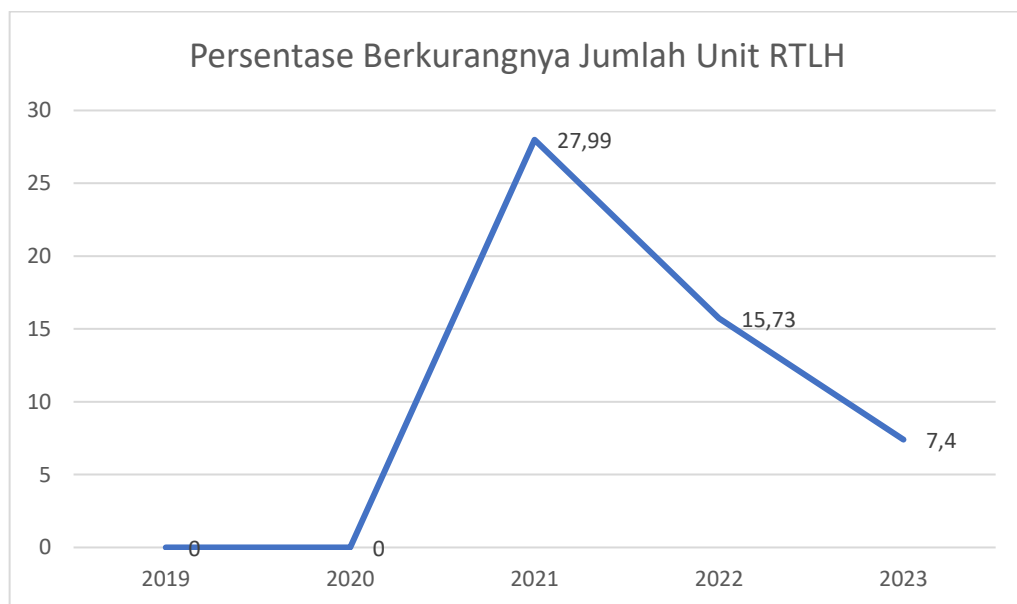


Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

**Tabel 3.85**  
**Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)**  
**Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023**

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	n.a	n.a	27,99	15,73	7,4

**Grafik 3.27**  
**Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)**  
**Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023**



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Berikut Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.86  
Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Kabupaten Kutai Barat  
Tahun 2019 – 2023

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	n.a	n.a	9.329	5.242	3.151

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Kutai Barat

**b. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator**

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator yaitu :

a. Program Kawasan Permukiman

Pada tahun 2023 fokus kegiatan yang dilakukan untuk ketercapaian indikator melakukan Rehab rumah tidak layak huni sebanyak 167 Unit di 5 Kecamatan se Kabupaten Kutai Barat yang bersumber dari APBD Kab.Kutai Barat, Pembangunan Rumah Baru sebanyak 20 Unit di 5 Kecamatan bersumber Anggaran CSR Provinsi Kaltim, Rehab RTLH sebanyak 240 Unit dari Bantuan Langsung APBD Provinsi Kaltim dibangun oleh Dinas PU PERA Provinsi Kaltim di 5 Kecamatan, Rehab RTLH sebanyak 100 Unit dari APBN yang dibangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II di 6 Kecamatan.

Tabel 3.87  
Data Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dan Jumlah RTLH  
Di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023

No	Jenis Data	Volume	Satuan	Keterangan
1	Luas Kawasan Permukiman	8.024,17	Ha	16 Kecamatan
2	Luas Kawasan Permukiman Perkotaan	3.459,45	Ha	Barong Tongkok, Sekolaq Darat, Melak



3	Luas Kawasan Permukiman Kumuh sesuai SK. Bupati No. 592/K.425/2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh	1.045,63	Ha	Barong Tongkok, Sekolaq Darat, Melak, Damai, Muara Lawa.
4	Kumuh Perkotaan sesuai SK. No. 592/K.425/2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh	662,15	Ha	Barong Tongkok, Sekolaq Darat, Melak
5	Kumuh Pedesaan sesuai SK. No. 592/K.425/2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh	423,48	Ha	Muara Lawa, Damai
6	Jumlah Rumah Se-Kabupaten Kutai Barat	42.498	Unit	16 Kecamatan
7	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Se-Kabupaten Kutai Barat	3.151	Unit	16 Kecamatan
8	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Perkotaan	603	Unit	Barong, Sekolaq Darat, Melak

*Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Kutai Barat*

**Tabel 3.88**  
**Data Jumlah Rumah**  
**Di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Barong Tongkok	8289
2	Bentian Besar	1034
3	Bongan	2586
4	Damai	2004
5	Jempang	2110
6	Linggang Bigung	3989
7	Long Iram	1467
8	Melak	4037
9	Mook Manaar Bulatn	2387
10	Muara Lawa	2401



11	Muara Pahu	1961
12	Nyuatan	2089
13	Penyinggahan	1043
14	Sekolaq Darat	3124
15	Siluq Ngurai	1680
16	Tering	2297
Total		<b>42.498</b>

*Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Kutai Barat*

**Tabel 3.89**  
**Data Jumlah Rumah Tidak Layak Huni**  
**Di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Barong Tongkok	266
2	Bentian Besar	107
3	Bongan	373
4	Damai	163
5	Jempang	98
6	Linggang Bigung	324
7	Long Iram	112
8	Melak	185
9	Mook Manaar Bulatn	272
10	Muara Lawa	72
11	Muara Pahu	251
12	Nyuatan	250
13	Penyinggahan	117
14	Sekolaq Darat	152
15	Siluq Ngurai	195
16	Tering	214
Total		<b>3.151</b>

*Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Kutai Barat*



**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Adapun Faktor yang mendukung ketercapaian Indikator

1. Sinergitas Program penanganan RTLH Oleh Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Pusat;
2. Kemandirian Masyarakat dalam membangun/rehab rumah sendiri.

Adapun yang menjadi Faktor Penghambat terkait ketercapaian indikator yaitu :

1. Keterbatasan ketersediaan material kayu dalam melaksanakan rehab/pembangunan rumah;
2. Sulitnya akses ke lokasi penerima bantuan;
3. Masih terbatasnya penyedia material yang memiliki legalitas izin usaha.

Adapun Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu

1. Mencari alternatif bahan yang mengalami keterbatasan;
2. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait terhadap akses.



## SASARAN 9

### TERSEDIAANYA INFRASTRUKTUR PENOPANG KEGIATAN EKONOMI KERAKYATAN

#### Capaian Kinerja Sasaran

Capaian Strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi Keempat yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Barat Periode 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penopang Ekonomi Kerakyatan”.

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 9 menggunakan 2 indikator kinerja yaitu Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap dan Cakupan Layanan Telekomunikasi dengan tingkat keberhasilan **113,83%** dengan kategori **”MELAMPAUI TARGET (MT)”**. Pencapaian target kinerja sasaran **Meningkatnya Dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar** dapat dilihat pada tabel diawah:

Tabel 3.90  
Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan  
Ekonomi Kerakyatan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	64,7%	68,7%	106,1	Melebihi Target
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	53	61,86%	116,71	Melebihi Target
Rata-rata Capaian Kinerja				111,40	Melampaui Target

Tabel 3.91  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	68,77%	65,00%	68,7%
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	28%	55,67%	61,86%

Tabel 3.92  
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Capaian Kinerja	%	
		2023	2026	2023	2023	2026
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	64,70	75,20	68,7	106,18	91,35
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	53	68	61,86	116,71	90,97

Adapun pencapaian Sasaran pada indikator kinerja dapat dijelaskan melalui analisis sebagai berikut:

**1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap**  
**a. Perbandingan Capaian Indikator**

Urusan pekerjaan umum merupakan urusan yang berkaitan dengan pembangunan secara fisik. Selama beberapa tahun terakhir pembangunan fisik di Kutai Barat menunjukkan peningkatan yang cukup tajam, dan pemerintah memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur yang mampu mendukung aktivitas masyarakat, sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan



kegiatan ekonomi. Perkuatan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Infrastruktur Pelayanan Dasar berupa penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau, penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, keselamatan dan keamanan transportasi, dan pembangunan jaringan irigasi. Sedangkan infrastruktur ekonomi dengan prioritas pada konektivitas jalan untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

Selain itu, infrastruktur ketenagalistrikan dan transformasi digital juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan serta penuntasan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Infrastruktur jalan menjadi prioritas utama yang terus dibangun di Kutai Barat. Kondisi jalan yang baik akan sangat mendukung kelancaran mobilitas barang dan jasa sehingga akan berpengaruh pada berjalannya roda perekonomian daerah dengan lancar.

Pembangunan infrastruktur jalan di Kutai Barat, sesuai target RPJMD untuk mewujudkan jaringan jalan dalam kondisi mantap. Menurut kriteria Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, jalan dalam kondisi mantap adalah jalan dalam kondisi baik dan kondisi sedang.

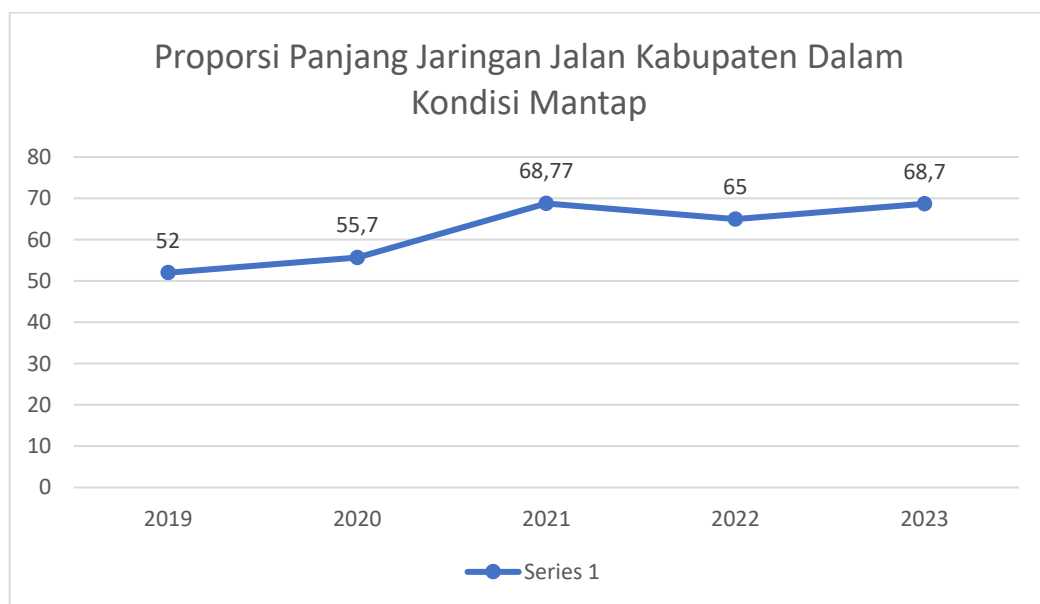
Prioritas pembangunan jalan adalah jalan yang mampu meningkatkan akses masyarakat antar wilayah, sehingga mampu mendukung aktivitas ekonomi dan distribusi barang dan jasa di Kutai Barat. Selain itu, pembangunan jalan diharapkan mampu mengatasi keterisoliran beberapa kampung atau daerah yang terjadi selama ini. Kelancaran akses antar wilayah akan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga tingkat

ketimpangan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi yang ada di antara wilayah dapat direduksi.

**Tabel 3.93**  
**Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap**  
**Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023**

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	52	55,7	68,77	65,00	68,7

**Grafik 3.28**  
**Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap**  
**Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2023**



Berdasarkan tabel dan grafik diatas perkembangan realisasi dari indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Kutai Barat Dalam Kondisi Mantab Tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.



**b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator**

Adapun Program/Kegiatan yang menunjang Ketercapaian Indikator yaitu :

a. Program Penyelenggaraan Jalan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :800.05.581/K.726/2022 Tanggal 22 April 2022 Tentang Penetapan Ruas Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Kutai Barat, total panjang jalan di Kabupaten Kutai Barat 1.523,44 Km. Sedangkan Jalan Nasional 330,8 Km, Jalan Provinsi 0 Km, dan Jalan Lingkungan 892,2 Km. Adapun Jumlah Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap Tahun 2023 di Kabupaten Kutai Barat adalah 1.046,6 Km, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.94  
Panjang Jalan Di Kabupaten Kutai Barat  
Menurut Status Tahun 2023

No	Status Jalan	Panjang Jalan (Km)
1	Jalan Nasional	330,8
2	Jalan Provinsi	-
3	Jalan Kabupaten	1.523,44
4	Jalan Lingkungan	892,2

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kutai Barat

Tabel 3.95  
Kondisi Jalan Di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)
1	Baik/Mantap	1.046,6
2	Rusak	218,20
3	Tanah	258,64

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kutai Barat



**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Adapun Faktor yang mempengaruhi ketercapaian Indikator yaitu :

1. Komitmen Kepala Daerah melalui Program Prioritas Tuntas khususnya terdapat pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap konektivitas antar wilayah.
2. Adanya dukungan dan sinergitas bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dalam rangka pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Kutai Barat.

Adapun yang menjadi Faktor Penghambat terkait ketercapaian indikator yaitu :

1. Kondisi geografis Kutai Barat serta jarak antar kecamatan merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengerasan jalan.
2. Kewenangan penanganan Jalan sesuai penetapan status jalan sebagai Jalan Nasional, Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten.
3. Regulasi dan penggunaan jalan yang belum sesuai dengan fungsinya, misalnya Kondisi Jalan Jalan Nasional, Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten yang dilewati oleh kendaraan bertonase besar yang mengangkut hasil Tambang dan hasil Perkebunan.

Adapun Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu

1. Sinergitas Kabupaten Kutai Barat dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi terkait pembangunan jalan di Kabupaten Kutai Barat.
2. Penuntasan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah yang menghubungkan antar simpul pusat aktivitas masyarakat.

## **2. Cakupan Layanan Telekomunikasi**

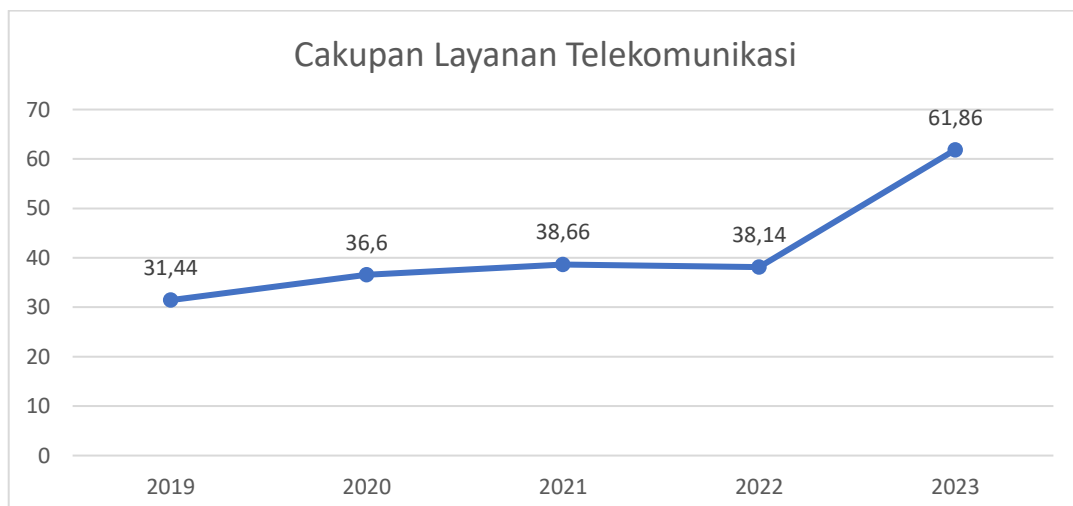
### **a. Perbandingan Capaian Indikator**

Realisasi Kinerja dari Indikator “Cakupan Layanan Telekomunikasi” pada tahun 2023 adalah 61,86% dari target yakni 53% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kabupaten Kutai Barat dengan capaian kinerjanya adalah 100,41%, capaian ini melebihi dari target yang diperjanjikan. Hal ini dicapai dari indikator jumlah Desa/ Kampung yang mampu mengakses internet atau jumlah Desa/ Kampung yang mampu *tercoverage* layanan telekomunikasi pada tahun 2023 dengan penetapan target sejumlah 102 Desa/ Kampung (53%) dan mampu terealisasi sejumlah 120 Desa/ Kampung (61,86%).

**Tabel 3.96**  
Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Kutai Barat  
Tahun 2019 – 2023

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Layanan Telekomunikasi	31,44	36,60	38,66	38,14	61,86

**Grafik 3.29**  
Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Kutai Barat  
Tahun 2019 – 2023





Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas, realisasi dari Indikator Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 ini cukup meningkat dari tahun sebelumnya karena adanya penambahan Desa/ Kampung yang *tercoverage* jaringan telekomunikasi yakni 120 Desa/ Kampung dan layanan VSAT (internet satelit) sebanyak 49 Desa/ Kampung diantaranya 32 simpul disediakan oleh Badan Aksibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) dan 17 simpul layanan disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat.

Laju pertumbuhan realisasi Desa/ Kampung dengan akses internet pada tahun 2023 ini menurut Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat adalah dengan perincian sebagai berikut :

- Koneksi internet dengan menggunakan V-SAT (untuk 1 tahun anggaran 2023) yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Kutai Barat dengan rincian:
  - a. Pelaksanaan 8 (delapan) kontrak berlangganan dengan PT. Pasifik Satelite Nusantara untuk 8 (delapan) kampung;
  - b. Pelaksanaan 9 (sembilan) kontrak berlangganan dengan PT. Telkomsat Indonesia untuk 9 (sembilan) kampung;
  - c. Pelaksanaan 32 (tiga puluh dua) simpul layanan VSAT yang disediakan oleh Pemerintah Pusat melalui BAKTI;

Tabel 3.97  
Rekap Penyediaan Layanan Internet Satelite- Vsat  
Di Kecamatan Se Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2023

No	Kecamatan	VSAT (Internet Satelit)		
		2021	2022	2023
1	Barong Tongkok	0	1	1
2	Bentian Besar	5	6	5
3	Jempang	0	1	1
4	Melak	0	4	0
5	Manor Bulatn	3	4	5
6	Linggang Bigung	0	0	0
7	Sekolaq Darat	0	0	0
8	Tering	3	4	5
9	Bongan	7	5	7
10	Damai	3	6	5
11	Long Iram	4	4	5
12	Muara Lawa	0	0	0
13	Muara Pahu	0	1	5
14	Nyuatan	2	2	2
15	Penyinggahan	0	0	0
16	Siluq Ngurai	6	6	8
Total		33	43	49

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

- Sebanyak 120 Desa/Kampung dengan jumlah 119 menara telekomunikasi yang tercoverage layanan telekomunikasi;

Berikut ini Jumlah Desa/Kampung yang mampu mengakses internet dengan menggunakan transmiter menara telekomunikasi dari 3 operator layanan (Indosat, XL, Telkomsel) tahun 2023:



**Tabel 3.98**  
**Rekap Data Cakupan Area Telekomunikasi**  
**Dengan Transmitter Menara Telekomunikasi Di Kecamatan**  
**Se Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2023**

No	Kecamatan	Jumlah Kampung dengan Kategori														
		Blankspot					Lemah					Coverage				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Barong Tongkok	9	1	1	1	0	5	13	13	12	3	7	7	7	8	18
2	Bentian Besar	1	3	3	3	4	6	5	5	5	3	2	1	1	1	2
3	Jempang	1	0	0	0	0	6	3	3	3	3	5	9	9	9	9
4	Melak	1	0	0	0	5	3	4	4	4	1	2	2	2	2	0
5	Manor Bulatn	3	4	4	4	1	10	10	10	10	9	2	2	2	2	6
6	Linggang Bigung	4	4	4	4	0	3	3	3	3	1	4	4	4	4	10
7	Sekolaq Darat	1	0	0	0	1	2	1	2	1	1	4	7	7	7	7
8	Tering	6	2	3	2	1	4	8	7	8	3	3	5	5	5	11
9	Bongan	3	8	6	7	6	8	2	4	3	3	5	6	6	6	7
10	Damai	7	6	2	2	2	3	6	7	8	4	3	6	8	7	11
11	Long Iram	4	6	6	6	3	5	2	2	2	1	2	3	3	3	7
12	Muara Lawa	3	0	0	0	0	2	5	5	5	2	3	3	3	3	6
13	Muara Pahu	0	0	0	0	0	6	7	7	7	5	6	5	5	5	7
14	Nyuatan	7	3	2	3	2	1	3	4	3	1	2	4	4	4	7
15	Penyinggahan	3	0	0	0	0	0	3	2	3	3	3	3	4	3	3
16	Siluq Ngurai	3	8	3	5	4	8	3	8	6	8	5	5	5	5	4
<b>Total</b>		<b>56</b>	<b>45</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>72</b>	<b>78</b>	<b>85</b>	<b>83</b>	<b>51</b>	<b>61</b>	<b>71</b>	<b>75</b>	<b>74</b>	<b>120</b>

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika*

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solisi yang telah dilakukan**

Adapun Faktor yang mempengaruhi ketercapaian Indikator yaitu :

1. Kekuatan Komunikasi dan koordinasi antara lintas operator penyedia Infrastruktur Telekomunikasi yang sinergis :  
Dalam rangka percepatan pemenuhan penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang kuat dan terintegrasi secara baik antar lintas operator pada beberapa wilayah/



lokus adalah salah satu penyebab utama keberhasilan cakupan layanan internet di Kabupaten Kutai Barat;

2. **Komitmen Pemerintah Daerah :**

Keberhasilan ini juga dapat dikaitkan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan layanan internet. Keterlibatan dan dukungan dari pemerintah Daerah dalam hal kebijakan pro-inovasi dan kerja sama dengan sektor swasta telah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan layanan internet;

3. **Partisipasi Aktif Masyarakat :**

Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan internet juga merupakan faktor penting. Hal ini dilakukan berlandaskan pada situasi masa sekarang, bahwa internet telah cukup berpengaruh kepada sendi perekonomian masyarakat dimana internet dan komunikasi telah menjadi kebutuhan penunjang utama dalam kegiatan aktivitas ekonomi masyarakat itu sendiri;

4. **Kemitraan Strategis dengan Swasta :**

Kerjasama yang erat antara pemerintah daerah dan penyedia layanan swasta turut andil dalam keberhasilan ini. Kemitraan ini dapat mencakup investasi bersama, pembaharuan teknologi dan peningkatan kapasitas jaringan yang semuanya berkontribusi pada peningkatan cakupan layanan internet;

Adapun yang menjadi Faktor Penghambat terkait ketercapaian indikator yaitu :

1. **Topografi dan Geografis :**

Keadaan topografi dan geografis Kabupaten Kutai Barat yang relatif sulit diakses dan memiliki kondisi alam yang beragam sehingga kami anggap sebagai menjadi penghambat laju pertumbuhan. Wilayah yang terpencil atau sulit dijangkau oleh infrastruktur jaringan telekomunikasi seringkali menjadi



kendala primer dalam kemampuan menyediakan layanan internet yang optimal dan memadai;

2. Keterbatasan Infrastruktur Dasar :

Meskipun telah ada investasi dalam infrastruktur telekomunikasi, beberapa daerah di Kabupaten Kutai Barat masih mengalami keterbatasan dalam infrastruktur dasar seperti listrik dan akses jalan yang memadai. Hal kebutuhan akan jalan dan listrik ini juga merupakan penghambat dalam pembangunan infrastruktur baru dan pemeliharaan perangkat yang mendukung layanan internet.

3. Tingkat Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat :

Tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat pada beberapa daerah Kabupaten Kutai relatif masih rendah untuk memenuhi biaya yang timbul dari penyediaan layanan internet, sehingga beberapa operator enggan untuk segera melakukan investasi pembangunan infrastruktur komunikasi dan internet;

4. Tingkat Literasi Digital yang Rendah :

Meskipun telah ada upaya pemerintah dalam mengkampanyekan literasi digital, beberapa lapisan masyarakat masih kurang sadar dan memiliki tingkat pemahaman yang rendah terhadap manfaat dan penggunaan layanan internet. Ini dapat mempengaruhi adopsi teknologi di kalangan masyarakat.

5. Ketidakstabilan Jaringan dan Kualitas Layanan :

Masalah ketidakstabilan jaringan dan kualitas layanan internet dapat menjadi penghambat serius. Gangguan teknis, lambatnya koneksi dan masalah lainnya yang berhubungan dengan stabilitas perangkat keras dukung dapat membuat pengguna layanan enggan mengandalkan layanan internet secara konsisten.



Adapun Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu

1. Program Infrastruktur Prioritas :  
Melakukan peninjauan ulang dan mengidentifikasi daerah yang masih belum tercover dengan baik oleh infrastruktur telekomunikasi. Kemudian, merancang program prioritas untuk memperluas jaringan di daerah-daerah tersebut dengan memperhatikan topografi dan kebutuhan khusus setiap wilayah.
2. Subsidi dan Bantuan Keuangan :  
Menyusun program subsidi atau bantuan keuangan khusus untuk masyarakat dengan pendapatan rendah. Hal ini dapat mencakup subsidi biaya langganan internet atau penyediaan perangkat dengan harga terjangkau, sehingga meningkatkan aksesibilitas layanan internet di kalangan masyarakat ekonomi lemah.
3. Kampanye Literasi Digital Intensif :  
Menggelar kampanye literasi digital yang intensif di seluruh kabupaten. Melibatkan sekolah, pusat komunitas, dan lembaga pendidikan untuk memberikan pelatihan dan seminar tentang manfaat, cara penggunaan, dan keamanan internet. Menargetkan semua kelompok usia agar literasi digital dapat merata di seluruh lapisan masyarakat.
4. Kolaborasi Pemerintah dan Swasta :  
Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan penyedia layanan swasta. Menggandeng perusahaan telekomunikasi untuk berinvestasi dalam perluasan infrastruktur dan menyediakan layanan internet dengan harga bersaing. Kemitraan ini dapat membantu meningkatkan kualitas layanan dan cakupannya.
5. Pengembangan Inovatif :



Mendorong pengembangan inovasi teknologi seperti teknologi satelit atau jaringan nirkabel yang dapat mencapai daerah terpencil atau sulit dijangkau. Pemerintah dapat memberikan insentif atau dukungan untuk penelitian dan pengembangan teknologi baru yang mendukung keberlanjutan dan efisiensi cakupan layanan internet.

6. Audit dan Pemeliharaan Rutin :

Melakukan audit rutin terhadap infrastruktur yang ada dan melaksanakan pemeliharaan preventif secara teratur. Dengan demikian, dapat mencegah dan mengatasi gangguan teknis yang mungkin terjadi, sehingga kualitas layanan internet tetap optimal.

7. Pelatihan Keterampilan Teknologi :

Menyusun program pelatihan keterampilan teknologi khusus untuk kelompok masyarakat yang kurang akses. Melibatkan lembaga-lembaga pelatihan kerja dan pendidikan non-formal untuk memberikan keterampilan teknologi dasar dan meningkatkan kapabilitas penggunaan internet.

8. Pengawasan dan Evaluasi Terus - Menerus :

Membentuk tim pengawasan dan evaluasi yang terus-menerus memantau pelaksanaan solusi-solusi yang diimplementasikan. Evaluasi berkala akan membantu mendeteksi perubahan dalam kebutuhan dan tantangan yang mungkin muncul, sehingga kebijakan dapat disesuaikan dengan cepat.

Dengan mengimplementasikan serangkaian solusi ini secara terkoordinasi, diharapkan Kabupaten Kutai Barat dapat mengatasi faktor penghambat dan meningkatkan capaian cakupan layanan internet dengan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.



### 3.4 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam rangka mengukur tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*), Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui 47 (Empat Puluh Delapan) Perangkat Daerah yang ada, telah berusaha memaksimalkan Sumber Daya Manusia dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Beberapa target yang telah ditetapkan tersebut ada pencapaian kinerjanya yang melebihi target yang telah ditetapkan.

Ini adalah salah satu bentuk efisiensi penggunaan anggaran yang patut dibanggakan karena target yang telah ditetapkan dapat dilampaui dengan menggunakan Sumber Daya yang ada. Dari 9 (Sembilan) Sasaran Strategis yang ada sebanyak 8 (Delapan) sasaran yang pencapaian kinerjanya diatas 100% dengan Rata-rata Tingkat Efisiensi sebesar **60,60 %** dengan nilai **Rp 518.993.906.334,62** Untuk lebih jelasnya terkait penghitungan efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.99  
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Nilai Efisiensi (Rp)	Realisasi %	Efisiensi %
1	2	3	4	5	6	7	8 = (3-7)
1	1. Meningkatnya peran sektor unggulan daerah berbasis kluster terhadap perekonomian daerah	140,64	123.974.449.993	104.165.767.414	19.808.682.579	84,02	55,62
2	2.Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan Wirausahawan Lokal baru	297,65	13.239.515.507	12.604.292.574	635.222.933	95,20	202,45
3	3. Meningkatnya standar hidup layak masyarakat Kutai Barat	112	2.233.469.021	2.083.040.870	150.428.151	93,26	18,74
4	5. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	102,97	175.815.396.191	146.672.575.096,04	29.142.821.094,96	83,42	19,55

5	6. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	100,05	146.697.735.132	114.078.854.885,34	32.618.880.246,66	77,76	22,29
6	7. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah	109,88	909.594.561.586	534.551.261.338	375.043.300.248	57,77	52,11
7	8. Meningkatnya dan meratanya kualitas Infrastruktur dasar	184,32	95.090.772.526	84.795.310.356	10.295.462.170	89,17	95,15
8	9. Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan	111,40	673.081.722.994	621.782.614.082	51.299.108.912	92,38	19,02
	Jumlah		2.139.727.622.950	1.620.733.716.615,38	518.993.906.334,62	Rata-rata	60,60



### **3.5 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam menjabarkan Visi dan Misi RPJMD 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja serta Target yang harus dicapai dalam setiap tahunnya. Untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan tersebut telah dibentuk Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

Pada RPJMD 2021-2026 terdapat Program dan Kegiatan yang disiapkan untuk melaksanakan Visi dan Misi Bupati Kutai Barat 2021-2026. Pada Tahun 2023 berdasarkan RKPD tahun 2023 terdapat **210** Program dan **598** Kegiatan yang diselenggarakan ke seluruh Perangkat Daerah untuk mencapai target-target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023.

Dari **210** Program dan **598** Kegiatan pada tahun 2023 sebanyak **165** Program dan **316** Kegiatan yang dialokasikan untuk merealisasikan target dalam 23 Indikator Kinerja Utama dari 9 Sasaran strategis yang terdapat dalam RPJMD 2021-2026. Untuk lebih jelasnya terkait program dan kegiatan yang dianggarkan dengan mengacu pada tercapainya target dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.100  
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Program Dan Kegiatan

No	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	Nilai Efisien (Rp)	%	Total Program / Kegiatan yang dianggarkan		Jumlah Program / Kegiatan yang dialokasikan untuk Mencapai Sasaran		Keterangan
					Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	19.976.446.200,00	16.317.187.399,00	3.659.258.801,00	81,68	2	19	2	19	Sekretariat DPRD
2	99.863.793.216,00	86.374.624.021,00	13.489.169.195,00	86,49	3	19	3	19	Sekretariat Daerah
3	23.601.490.466,00	21.920.988.013,00	1.680.502.453,00	92,88	6	11	5	5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
4	11.107.174.827,00	9.137.709.721,00	1.969.465.106,00	82,27	3	11	2	6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	17.087.546.190,00	10.514.615.219,00	6.572.930.971,00	61,53	3	14	2	6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	890.122.365.556,00	516.139.842.206,00	373.982.523.350,00	57,99	3	11	2	5	Badan Keuangan dan Aset Daerah
7	10.492.562.975,00	7.791.774.627,00	2.700.788.348,00	74,26	4	16	3	9	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
8	4.221.619.444,00	4.015.879.540,00	205.739.904,00	95,13	2	9	1	1	Badan Pendapatan Daerah
9	22.250.674.104,00	19.055.682.309,00	3.194.991.795,00	85,64	5	15	4	9	Dinas Perikanan
10	24.860.286.453,00	24.338.295.002,00	521.991.451,00	97,90	3	11	2	5	Dinas Pemuda dan Olahraga

11	33.908.170.657,00	21.620.182.276,00	12.287.988.381,00	63,76	10	20	9	14	Dinas Lingkungan Hidup
12	7.743.682.869,00	7.639.747.037,00	103.935.832,00	98,66	5	13	4	6	Dinas Ketahanan Pangan
13	175.815.396.191,00	146.672.515.069,04	29.142.881.121,96	83,42	8	20	7	13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	1.550.949.512,00	1.460.817.259,00	90.132.253,00	94,19	5	11	4	5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15	18.249.771.679,00	17.015.713.766,00	1.234.057.913,00	93,24	3	12	2	6	Dinas Perhubungan
16	4.882.995.606,00	4.698.321.754,00	184.673.852,00	96,22	3	10	2	3	Inspektorat Daerah
17	21.231.076.438,00	10.391.074.740,00	10.840.001.698,00	48,94	5	13	4	6	Dinas Pariwisata
18	2.746.816.056,00	2.575.165.261,00	171.650.795,00	93,75	7	10	6	8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
19	2.891.442.343,00	2.540.872.303,00	350.570.040,00	87,88	6	13	5	6	Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	146.697.735.132,00	114.078.854.885,34	32.618.880.246,66	77,76	5	25	4	15	Dinas Kesehatan
21	641.527.900,00	634.262.370,00	7.265.530,00	98,87	5	13	4	7	Dinas Arsip & Perpustakaan
22	7.003.431.980,00	6.772.924.515,00	230.507.465,00	96,71	9	22	8	16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak
23	5.760.130.279,00	4.686.123.793,00	1.074.006.486,00	81,35	5	13	4	6	Dinas Komunikasi dan Informatika
24	7.002.522.400,00	6.921.070.126,00	81.452.274,00	98,84	3	11	2	4	Satuan Polisi Pamong Praja
25	10.492.699.451,00	10.029.127.313,00	463.572.138,00	95,58	15	25	13	14	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
26	80.492.115.548,00	69.523.611.891,00	10.968.503.657,00	86,37	5	19	4	11	Dinas Pertanian

27	6.787.238.300,00	6.704.819.879,00	82.418.421,00	98,79	5	10	4	4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
28	988.336.416.513,00	839.402.327.912,00	148.934.088.601,00	84,93	11	24	10	17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
29	2.233.469.021,00	2.083.040.870,00	150.428.151,00	93,26	5	14	4	8	Dinas Sosial
30	37.881.010.626,00	35.513.097.183,00	2.367.913.443,00	93,75	9	17	8	11	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
31	13.996.151.526,00	11.765.593.058,00	2.230.558.468,00	84,06	47	147	31	52	16 Kecamatan
	<b>2.699.928.709.458,00</b>	<b>2.038.335.861.317,38</b>	<b>661.592.848.140,62</b>	<b>75,50</b>	<b>210</b>	<b>598</b>	<b>165</b>	<b>316</b>	



## **BAB IV PENUTUP**

Penyusunan LKjIP Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 ini merupakan bentuk perekaman kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan membandingkan antara rencana dan realisasi serta melakukan penajaman sasaran strategis lewat indikator-indikator sasaran yang ditetapkan. Sudah menjadi konsekuensi bagi daerah hasil pemekaran yang terbentuk tahun 1999 ini memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan terhadap masyarakat sebagai agenda pembangunan selain usaha pengentasan kemiskinan sebagai prioritas. Hal ini dimaklumi mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kutai Barat dengan kampung-kampung yang terpencar dan sulitnya mengakses daerah-daerah tertentu. Meski secara umum pengukuran kinerja program dan kegiatan yang dijalankan masing-masing Perangkat Daerah dianggap berhasil, namun pembangunan dirasakan masih menyisakan kekurangan dan kelemahan terutama pada sisi perencanaan dan usaha pencapaian dari target yang dikehendaki.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Seiring dengan terjadinya musibah global dan nasional yaitu pandemi covid-19 memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi, dimana pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha berada pada angka **4,87%**. Semenjak Pandemi Covid-19 berangsur berkurang membuat perlahan-lahan sektor ekonomi di Kutai Barat berangsur membaik, dimana berdasarkan data dari BPS Laju Pertumbuhan Ekonomi Kutai Barat tahun 2023 meningkat menjadi **5,82%**. Tentunya ini berdampak pada rasa optimis masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kutai Barat akibat badai



pandemi covid-19 untuk bangkit dan terus berbenah untuk membangun daerah ini.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang memuaskan atas sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kutai Barat yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun dibalik keberhasilan yang dicapai Pemerintah Kutai Barat, masih dijumpai berbagai hambatan baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mempersiapkan strategi-strategi yang diupayakan untuk pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Adapun program kegiatan dan sub kegiatan yang dijalankan selama tahun 2023, senantiasa memperhatikan urusan yang menjadi prioritas baik karena tuntutan peraturan perundangan maupun karena kebutuhan sejatinya masyarakat seperti urusan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum (infrastruktur) dan lain sebagainya yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik terus dibenahi dan ditingkatkan. Dan upaya ini dinilai berhasil oleh pemerintah, sehingga Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2023 berhasil meraih penghargaan antara lain :

1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** selama 8 tahun berturut-turut dari BPK dan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
2. **TPID Kab/Kota Berprestasi Kawasan Kalimantan** dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



3. **Predikat B** (Baik) dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi untuk Bidang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. **Predikat Kepatuhan Tinggi** Tahun 2023 dengan Nilai 87,56 Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang – Undang no. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dari OMBUDSMAN Republik Indonesia;
5. **Peringkat Pratama Kabupaten Layak Anak** Tahun 2023 dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
6. **Juara Terbaik 1** Panji Bidang Pegelolaan Keuangan Daerah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
7. **Juara Terbaik 2** Bidang Dekranasda dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
8. **Juara Terbaik 3** Bidang Perdagangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
9. **Multy Award Mulawarman University**
  - a. **Inovasi Denda Antang** Winner Cumlaude Indikator Kesenambungan dan Kelembagaan Politik
  - b. **Inovasi Sang Asmara** Nominator Indikator Partisipasi Publik
  - c. **Inovasi Kubar Meyapa** Nomiator Indikator Pertanggungjawaban Publik
  - d. **Inovasi Lapor Kadis** Nominator Indikator Pelayanan Pendidikan
  - e. **Inovasi Teka Teki** Nominator Indikator Pelayanan Kesehatan

Penghargaan tersebut membuktikan bahwa dalam kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat, Bapak FX. Yapan,SH dan H. Edyanto Arkan,SE telah berhasil melakukan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang merupakan salah satu cita-cita otonomi daerah.

Terlepas dari keberhasilan tersebut diatas, tidak sedikit pula program dan kegiatan yang ditetapkan seringkali tidak mencapai target karena banyaknya kendala atau permasalahan yang dihadapi. Hal inilah yang



kemudian memberi ruang yang seluas-luasnya kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembinaan dan pengawasan dalam perbaikan penyelenggaraan otonomi daerah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran pembangunan melalui LKjIP ini, masih terdapat ada beberapa indikator kinerja sasaran yang belum tercapai secara maksimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain :

1. Belum adanya sinkronisasi antara target yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD yang selanjutnya dituangkan dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Target yang ditetapkan dalam RKPD belum diaktualisasikan sesuai anggaran APBD sehingga target capaian kinerja sasaran belum selaras.
2. RPJMD belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam mengevaluasi capaian indikator kinerja karena ada beberapa indikator yang ditetapkan bukan merupakan indikator *outcome*, target yang tidak realistis, satuan indikator dan indikator yang seharusnya penting belum dimasukkan dalam RPJMD.
3. Ada beberapa indikator kinerja sasaran tidak didukung ketersediaan data. Indikator Kinerja Utama sebagai instrument untuk mengukur pencapaian sasaran belum sepenuhnya dipahami oleh masing-masing Perangkat Daerah, dan belum adanya petunjuk teknis dari beberapa penerapan SPM sehingga Perangkat Daerah belum dapat menggali data profil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya.
4. Pemahaman oleh masing-masing Perangkat Daerah terhadap ketentuan pedoman Penyusunan LKjIP masih kurang sehingga penyusunan LKjIP belum memberikan hasil optimal.
5. Rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementrian PANRB untuk SAKIP Kabupaten dan oleh Inspektorat Daerah untuk SAKIP Perangkat Daerah belum sepenuhnya



ditindaklanjuti dengan baik, sehingga belum terlihat kemajuan yang berarti dalam penerapan SAKIP terutama terkait efektivitas penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja yang diharapkan serta kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja.

Dalam upaya mengatasi masalah dan hambatan tersebut, maka strategi yang dapat ditempuh yaitu :

1. Mengadakan evaluasi pada target-target yang telah ditetapkan di RPJMD sehingga ada sinkronisasi antara RKPD dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.
2. Memacu penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara penuh, yaitu SKPD selain menyusun Renstra, Perjanjian Kinerja dan LKjIP juga harus menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Aksi atas pelaksanaan kinerja yang akan diwujudkan.
3. Menyelenggarakan pendampingan (*coaching clinic*) Penguatan Akuntabilitas dengan mengundang Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk peningkatan SDM Aparatur sehingga pengetahuan dan pemahaman terkait implementasi SAKIP agar kedepan akan memberikan dampak pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.
4. Peningkatan kapasitas SDM para evaluator LKjIP dengan mengikuti Bimtek Evaluasi LKjIP di luar daerah atau mengundang Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
5. Memberikan *reward* kepada Perangkat Daerah yang meraih poin tertinggi pada implementasi SAKIP sehingga akan memacu Perangkat Daerah yang lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk meningkatkan kualitas penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented goverment*).



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023**



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

**Sendawar, 26 Maret 2024**

**BUPATI KUTAI BARAT**

**FX, YAPAN, SH, MH**



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat Telp. 0545- 4043944 Fax. 0545- 4043943 Kode Pos 75575

## SENDAWAR

### PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kutai Barat untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sendawar, 29 Februari 2024

INSPEKTUR DAERAH





# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

## SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Telepon (0542) 594754 Faximile (0545) 41375 – (0542) 594756

### SENDAWAR

#### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 180/288/HK-TU-P/I/2024

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH TAHUN 2023 DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, Efektif, transparan dan akuntabel menuju tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih (*good governance and clean government*) perlu adanya Pertanggungjawaban dari Pemerintah Daerah yang dilaporkan pada setiap akhir tahun dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka menentukan tolak ukur keberhasilan Pemerintah Daerah, pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai serta menjadi dasar penilaian dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) maka dipandang perlu untuk menyusun Perjanjian Kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/II/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 Nomor 9).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dengan susunan tim sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kabupaten Kutai Barat;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu senantiasa berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati Kutai Barat melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui DPA-PD Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal, 23 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,



AYONIUS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Barat di- **Sendawar**
2. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Kutai Barat di- **Sendawar**
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat di- **Sendawar.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 180/208 /HK-TU-P/I/2024 TANGGAL 19 JANUARI 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

=====

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN ORGANISASI

KOORDINATOR DAN ANGGOTA PENYUSUN LKjIP TAHUN 2023 DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

1. POKJA I : PENYUSUN BAB I (PENDAHULUAN)  
KOORDINATOR : SEKRETARIS BAPPEDA LITBANG  
ANGGOTA : KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KUTAI BARAT  
KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, BAPPEDA DAN LITBANG
2. POKJA II : PENYUSUN BAB II (PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA)  
KOORDINATOR : SEKRETARIS BKAD  
ANGGOTA : KABID ANGGARAN, BKAD  
KABID AKUTANSI, BKAD
3. POKJA III : PENYUSUN BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA)  
KOORDINATOR : KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, BAPPEDA DAN LITBANG  
ANGGOTA : KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA, BAPPEDA DAN LITBANG  
KABID PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN, BAPPEDA DAN LITBANG
4. SEKRETARIAT  
KOORDINATOR : KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB. KUTAI BARAT

ANGGOTA

- : 1. ALIF ANANDA ZULFI, S.STP  
2. HUSNI MUBBARAK  
3. MICHAEL E'EN, S.IP  
4. HENDIKA JULIANDA, S.IP  
5. YOEVTA, S.Hut  
6. MANDASARI  
7. SUMARNI  
8. TRIFENA WULANDARI

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal, 23 Januari 2024.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,



AYONIUS



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FX.YAPAN, SH, MH.

Jabatan : Bupati Kutai Barat

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sendawar, 25 Maret 2023

**BUPATI KUTAI BARAT**

**FX.YAPAN, SH, MH.**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KABUPATEN KUTAI BARAT**

MISI I Meningkatnya Perekonoian Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kawasan Berdasarkan Potensi Unggulan Lokal Secara Berkelanjutan			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya peran sektor unggulan daerah berbasis kluster terhadap Perekonomian Daerah	Kontribusi Sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB	15,52
		Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	0,575
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	0,425
2.	Terciptanya lapangan kerja baru dan Wirausahawan lokal baru	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,31
		Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	0,44%
3.	Meningkatnya standar hidup layak Masyarakat Kutai Barat	PDRB Perkapita	203,35
4.	Terjaganya kelestarian dan keberlanjutan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	62,4
		Indeks Kualitas Udara	94,54
		Indeks Kualitas Lahan	67,53
MISI II Peninkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Pendidikan dan Pelatihan yang didukung Optimalisasi Pelayanan Kesehatan			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	8,55
		Angka Harapan Lama Sekolah	13
6.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,25
MISI III Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83
		Opini BPK	WTP
		Nilai LPPD	3,8
		Persentase Desa Mandiri	0,14
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84,27
		Nilai SAKIP	70
MISI IV Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penopang Ekonomi Kerakyatan			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
8.	Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar	Persentase penduduk berakses air minum layak	100,00%
		Persentase rumah tangga pengguna listrik	99,65%
		Berkurangnya jumlah unit RTLH ( Rumah Tidak Layak Huni )	26%
9.	Tersedianya infrastruktur penopang kegiatan ekonomi kerakyatan	Proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	68,30%
		Cakupan layanan telekomunikasi	58%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
<b>DINAS PERTANIAN</b>		
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	32.963.513.217,00
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	43.321.582.608,00
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.364.765.764,00
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	719.954.733,00
5	Program Penyuluh Pertanian	12.022.296.900,00
<b>Jumlah</b>		<b>90.392.113.222,00</b>
<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>		
1	Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan	4.385.011.154,00
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.879.998.447,00
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	350.000.000,00
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	200.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.815.009.601,00</b>
<b>DINAS PERIKANAN</b>		
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.769.284.309,00
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.276.482.545,00
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	99.993.500,00
4	Program Pengelolaan dan Pemasaran hasil Perikanan	49.301.755,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.222.062.109,00</b>
<b>DINAS PARIWISATA</b>		
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	22.520.000,00
2	Program Pemasaran Pariwisata	1.000.000.000,00
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	350.000.372,00
4	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5.169.999.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.542.519.972,00</b>
<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>		
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	254.217.803,00
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	299.999.400,00
3	Program Hubungan Industrial	162.650.144,00
4	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	54.218.000,00
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	54.218.000,00
6	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	54.216.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>879.519.317,00</b>
<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>		
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	230.000.000,00
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	200.000.000,00
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	130.000.000,00
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	439.999.952,00
5	Program Pengembangan UMKM	1.609.999.952,00
6	Program perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	300.000.000,00
7	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	800.000.000,00
8	Program Stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	725.000.000,00

9	Program Pengembangan Ekspor	57.500.000,00
10	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100.000.000,00
11	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	4.199.999.711,00
12	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	150.000.000,00
13	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	260.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.202.499.631,00</b>
<b>DINAS SOSIAL</b>		
1	Program Pemberdayaan Sosial Program	383.311.900,00
2	Program Rehabilitas Sosial	1.330.023.190,00
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	424.135.800,00
4	Program Penanganan Bencana	753.997.563,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.891.468.453,00</b>
<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>		
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	575.000.000,00
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	774.999.918,00
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	60.231.971.491,00
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	150.000.000,00
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	423.959.200,00
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100.000.000,00
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100.000.000,00
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	199.997.700,00
9	Program Pengelolaan Persampahan	6.583.526.150,00
<b>Jumlah</b>		<b>69.139.454.459,00</b>
<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>		
1	Program Pengelolaan Pendidikan	151.639.307.165,00
2	Program Pengembangan Kurikulum	200.000.000,00
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	800.000.000,00
4	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	400.000.000,00
5	Program Pengembangan Kebudayaan	3.482.013.899,00
6	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	674.999.600,00
7	Program Pembinaan Sejarah	200.000.000,00
8	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	799.987.710,00
9	Program Pengelolaan Permuseuman	1.314.897.435,00
<b>Jumlah</b>		<b>159.511.205.809,00</b>
<b>DINAS KESEHATAN</b>		
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	213.877.932.853,00
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.342.622.280,00
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	438.891.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>216.659.446.133,00</b>
<b>DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN</b>		
1	Program Pembinaan Perpustakaan	284.949.800,00
2	Program Pengelolaan Arsip	484.000.000,00
3	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	500.000.000,00
4	Program Perizinan Penggunaan Arsip	15.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.283.949.800,00</b>

<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	87.940.461.300,00
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	5.442.325.847,00
<b>Jumlah</b>		<b>93.382.787.147,00</b>
<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>		
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.349.967.720,00
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.151.572.000,00
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.850.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.351.539.720,00</b>
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>		
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	22.565.176.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>22.565.176.500,00</b>
<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>		
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	579.970.400,00
2	Program Promosi Penanaman Modal	300.000.000,00
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.097.496.400,00
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	350.000.000,00
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	190.262.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.517.728.800,00</b>
<b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		
1	Program Kepegawaian Daerah	1.935.333.431,00
2	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	2.803.671.327,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.739.004.758,00</b>
<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>		
1	Program Pengelolaan Pendapatan	4.391.512.585,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.391.512.585,00</b>
<b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>		
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	565.963.018.873,00
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	23.640.322.700,00
<b>Jumlah</b>		<b>589.603.341.573,00</b>
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>		
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.751.044.500,00
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.748.111.105,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.499.155.605,00</b>
<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG</b>		
1	Program Penataan Desa	300.000.000,00
2	Program Peningkatan Kerja sama Desa	275.000.000,00
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.000.000,00
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4.825.530.700,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.400.530.700,00</b>
<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	416.000.000,00
2	Program Perlindungan Perempuan	223.610.000,00
3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	150.000.000,00
4	Program Pemenuhan Hak Anak(PHA)	410.000.000,00

5	Program Perlindungan Khusus Anak	436.330.000,00
6	Program Pengendalian Penduduk	533.600.000,00
7	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.325.509.927,00
8	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	600.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.756.018.428,00</b>
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	15.735.500.000,00
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	46.890.670.000,00
3	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	700.000.000,00
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limabh	4.200.038.160,00
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase	28.425.000.000,00
6	Program Penataan Bangunan Gedung	50.228.000.000,00
7	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	159.545.260.000,00
8	Program Penyelenggaraan Jalan	481.460.087.000,00
9	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	3.526.732.426,00
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.150.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>793.861.287.586,00</b>
<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	374.758.745,00
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.106.910.578,00
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	136.351.905,00
4	Program Penyelenggaraan Persandian unntuk Pengamanan Informasi	137.997.200,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.756.018.428,00</b>
<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b>		
1	Program Pengembangan Perumahan	1.506.446.900,00
2	Program Kawasan Permukiman	3.415.000.000,00
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.485.000.000,00
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	13.434.272.000,00
5	Program Penyelesaian Sengketa Tahan Garapan	260.848.691,00
6	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	3.319.210.000,00
7	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	366.079.198,00
8	Program Penataguna Tanah	630.568.893,00
<b>Jumlah</b>		<b>26.417.425.682,00</b>
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>2.005.180.776.018,00</b>

Sendawar, 25 Maret 2023

BUPATI KUTAI BARAT

FX.YAPAN, SH, MH.